

Dr. Yenrizal, M.Si.

Lestarkan Bumi *dengan*
**KOMUNIKASI
LINGKUNGAN**

Editor: Taufik Wijaya | Henny Yusalia, M.Hum

Pengantar: Dr. Ridzki R Sigit (Mongabay Indonesia)

Lestarkan Bumi
dengan
Komunikasi Lingkungan

UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Terkait Pasal 49

1. Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Lestarkan Bumi
dengan
Komunikasi Lingkungan

Dr. Yenrizal M.Si.



LESTARIKAN BUMI DENGAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN

Yenrizal

Editor : Taufik Wijaya & Henny Yusalia, M.Hum
Desain Cover : Herlambang Rahmadhani
Tata Letak Isi : Cinthia Morris Sartono

Cetakan Pertama: Februari 2017

Hak Cipta 2017, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2017 by Deepublish Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT DEEPUBLISH
(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)

Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581
Telp/Faks: (0274) 4533427
Website: www.deepublish.co.id
www.penerbitdeepublish.com
E-mail: deepublish@ymail.com

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

YENRIZAL

Lestarikan Bumi dengan Komunikasi Lingkungan/oleh Yenrizal.--Ed.1, Cet. 1--
Yogyakarta: Deepublish, Februari 2017.

xvii, 145 hlm.; Uk:15.5x23 cm

ISBN 978-602-453-157-7

1. Lingkungan

I. Judul

333.7

SALAM KOMUNIKASI LINGKUNGAN !

(Sekapur Sirih dari Penulis)

Saat memulai meneruskan studi S₃ (Doktoral) di Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, 2011 lalu, penulis sudah memantapkan diri untuk mendalami sebuah bidang yang tergolong baru dalam keilmuan komunikasi, yaitu Komunikasi Lingkungan. Alasan memasuki ranah ini bukan semata-mata ingin tampil beda, tetapi berangkat dari kegelisahan bahwa masalah lingkungan hidup nyata-nyata sudah didepan mata. Selama ini kajian lingkungan hanya didominasi oleh bidang-bidang *mainstream* seperti, Ilmu Lingkungan, Antropologi Lingkungan, Sosiologi Lingkungan, Biologi, dan beberapa disiplin ilmu eksakta lainnya. Sementara disiplin ilmu komunikasi sendiri, belum terlalu banyak membahas masalah ini, padahal isu-isu dan masalah lingkungan, sudah berada pada taraf krusial dan sangat parah sekali.

Kemarau, kekeringan, kebakaran hutan, kabut asap, banjir, longsor, adalah realitas yang saban waktu selalu dihadapi negara ini. Perubahan iklim yang sangat luar biasa, menjadi momok yang menakutkan dan terkadang sulit diprediksi. Tahun 2014 dan 2015, beberapa provinsi di Indonesia, dilanda kekeringan panjang dan kebakaran hutan dan lahan yang sangat parah. Kabut asap terjadi dimana-mana dengan segala resiko bawannya. Sementara di kala musim penghujan, banjir dan longsor menjadi sesuatu yang harus pula diterima. Inilah fakta yang selalu dirasakan dan dialami, terutama dalam 20 tahun terakhir.

Pada posisi itulah, sumbangsih ilmu pengetahuan, melalui sudut pandangnya masing-masing, dirasa sangat diperlukan. Ilmu komunikasi adalah salah satu aspek terpenting. Sebagai *applied science*, seharusnya bidang ini bisa memberikan sumbangan penting bagi penyelamatan lingkungan, karena nyata bahwa banyak *tools* dalam keilmuan ini yang menjadi penyokong utama keberhasilan upaya penyelamatan alam dengan segala isinya. Terpenting lagi, *core* ilmu ini yang terfokus pada manusia dalam berinteraksi dan memaknai sesuatu, menjadi sangat relevan. Bukankah kerusakan alam sebenarnya adalah karena ulah manusia itu sendiri? Disinilah sudut pandang pemaknaan manusia terhadap lingkungan harus didudukkan. Disitulah komunikasi lingkungan harusnya mengambil peran strategis.

Atas dasar itu, terhitung sejak 2011, sesuai kapasitas yang dimiliki, penulis mencoba memulai mengkaji dan membahas berbagai aspek terkait dengan lingkungan dalam sudut pandang keilmuan komunikasi. Hasil telaahan, diskusi, perenungan, maupun pengalaman langsung, coba dituangkan dalam bentuk tulisan-tulisan yang kemudian terpublikasikan diberbagai media massa, baik cetak maupun online.

Buku ini adalah kumpulan tulisan yang sudah terpublikasikan di berbagai media massa, sejak periode 2011 hingga 2016. Selain itu terdapat juga beberapa tulisan yang belum terpublikasikan, pembedanya bisa dilihat dari keterangan di bawah masing-masing tulisan.

Susunan tulisan ini tidak diurutkan berdasarkan tanggal terbit, tetapi disesuaikan dengan masing-masing tema yang memiliki korelasi dengan tulisan lainnya. Di akhir tulisan, penulis sengaja menampilkan karya *feature*, untuk menegaskan kepada pembaca bahwa memahami lingkungan adalah suatu kerja yang baik dan mengasikkan.

Kendati berupa kumpulan artikel, pada bagian awal buku ini, diberikan terlebih dahulu pengantar untuk memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi lingkungan, terutama kajian secara teoritisnya. Hal ini penting, karena sampai saat buku ini diterbitkan (2017), sejauh pengamatan penulis, belum ada referensi buku komunikasi berbahasa Indonesia yang membahas mengenai komunikasi lingkungan. Penulis bisa mengatakan bahwa inilah pertama kalinya buku komunikasi lingkungan yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kajian teoritis di bagian awal buku ini, bisa memberikan sedikit pengantar singkat untuk masuk dalam konteks-konteks yang lebih faktual. Sembari pada saatnya nanti, penulis juga berencana akan membuat buku khusus mengenai Komunikasi Lingkungan dengan mengkhhususkan pada kajian teoritis sebagaimana buku referensi umumnya. Inshaallah dalam waktu dekat ini akan terealisasi.

Judul buku ini sengaja dipilihkan “Lestarkan Bumi dengan Komunikasi Lingkungan”. Terdapat makna penting dari kalimat ini bahwa, persoalan bumi sudah jadi isu strategis dan aktual sekali. Sementara komunikasi lingkungan adalah bidang fokus yang dirasa sangat perlu dimunculkan, didorong dan dijadikan kajian penting keilmuan ini. Semua untuk Bumi, karena Bumi untuk semua.

Harapan penulis, buku ini bisa memberikan wawasan penting bagi pembaca, khususnya yang mendalami bidang lingkungan dan ilmu komunikasi, bahwa ilmu komunikasi nyata-nyata memiliki kajian yang sangat luas. Ilmu komunikasi bukan semata-mata hanya soal media massa, komunikasi politik, komunikasi kesehatan, komunikasi antar budaya, dan sebagainya. Komunikasi lingkungan adalah juga sesuatu yang sangat penting untuk terus dikembangkan.

Dalam menyelesaikan buku ini, tentu banyak pihak yang turut berperan serta. Untuk itu, rasa terimakasih penulis ucapkan pada mas Ridzki R Sigit dari Mongabay Indonesia, sebuah situs berita

lingkungan yang menjadi barometer isu lingkungan di dunia, yang di tengah kesibukannya, bersedia memberikan pengantar singkat terhadap buku ini. Beberapa tulisan di dalam buku ini juga sudah pernah diterbitkan oleh Mongabay. Terimakasih juga kepada Taufik Wijaya, seorang jurnalis lingkungan di Sumsel yang menjadi teman diskusi serta bersedia pula sebagai editor gratisan sekaligus juga memberikan saran untuk memilih judul buku ini. Terimakasih pula untuk Prof Amin Suyitno (Dekan FISIP UIN Raden Fatah) atas dorongan-dorongan yang diberikan. Rasa terimakasih juga disampaikan untuk rekan-rekan media, terutama dari Tribun Jabar, Mongabay, HU Berita Pagi, HU Sriwijaya Post, serta Sriwijayapeat.org, yang selama ini telah setia mempublikasikan artikel-artikel yang penulis buat. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan pejuang lingkungan, khususnya di Sumsel seperti HaKI Institute dan Walhi Sumsel. Tak lupa Dr. Tareh Rasyid, M.Si, yang juga menjadi kawan diskusi bagi penulis. Terimakasih juga untuk Tim Restorasi Gambut (TRG) Sumsel, yang banyak menjadi ilham penulisan pada buku ini.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada guru-guru penulis semasa di Unpad, karena walau bagaimanapun karya ini terilhami dari diskusi dan masukan-masukan baik saat perkuliahan ataupun saat menulis disertasi. Untuk itu penghargaan diberikan kepada Prof. Deddy Mulyana, MA, Ph.D., Dr. Atwar Bajari, M.Si., Dr. Agus Rahmat, M.Pd., Prof Johan Iskandar, Ph.D., Prof. Dr. Engkus Kuswarno, Prof Haryo S Martodirjo, dan Dr Suwandi Sumartias, M.Si. Terimakasih juga kepada rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Unpad angkatan 2011 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, karena karya ini juga lahir dari diskusi-diskusi kecil saat kuliah dulu.

Buku ini juga tidak akan bisa diselesaikan tanpa pengorbanan dan kerelaan dari dua orang terkasih dalam kehidupan penulis, yaitu Henny Yusalia, M.Hum (yang juga terlibat sebagai editor buku ini),

dan Muhammad Nabil Athalla (4,7 tahun), buah hati penerus masa depan. Banyak hak-hak mereka yang saya abaikan, demi penyelesaian karya ini. Tak lupa juga doa tulus kedua orang tua, Papa Tarmizi dan Ibu Dahlina serta kedua mertua H Syamsul Bahri (alm) dan Hj Ernawilis.

Terakhir, tak ada karya yang sempurna, selalu ada kelemahan dan kekurangan, itulah fitrah manusia. Penulis menampung semua masukan dan kritikan, sehingga bisa menjadi penyempurna dalam karya-karya berikutnya. Wassalam.

Palembang, Januari 2017

KATA PENGANTAR

Komunikasi Lingkungan Yang Dinantikan

Saya menyambut gembira dengan terbitnya buku ini. Suatu karya yang secara khusus mengkaji perihal lingkungan dalam lingkup komunikasi. Buku ini menjadi amat bermakna karena disarikan dari berbagai pergumulan tentang kegelisahan, pengamatan dan keterlibatan empiris dari Dr Yenrizal Tarmizi terhadap berbagai permasalahan dan aspek-aspek lingkungan yang ada di Indonesia.

Dalam ruang akademik, secara khusus dalam ilmu komunikasi, teramat sulit, bahkan tidak ada, suatu buku yang secara khusus mencoba membedah ranah komunikasi lingkungan di Indonesia. Bagaikan telaga, maka buku ini melepaskan dahaga dalam upaya memahami dan menyelami komunikasi lingkungan yang sangat khas Indonesia.

Kelangkaan dan kesulitan dalam mencari referensi selanjutnya, tidaklah aneh, jika pada akhirnya menyebabkan tidak banyak karya-karya yang muncul dari ranah akademis ini.

Tidak ada yang menyangsikan bahwa Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan alam dan berbagai keunikan, baik biota maupun lanskap yang tidak ada duanya di dunia.

Sebagai negara bahari Indonesia adalah salah satu tempat keragaman hayati. Juga demikian daratannya yang dipenuhi oleh berbagai kekhasan endemik. Nyata, bahwa Indonesia negeri mega kekayaan dan keragaman hayati dunia.

Namun, disisi lain kerusakan alam yang masif telah membawa negeri ini menjadi terpuruk.

Dalam 18 tahun berturut-turut (1997-2015) negeri ini terus dilanda kabut asap hasil kebakaran lahan dan hutan tanpa henti. Hutannya terus dibabat, buminya terus digali, satwanya terus diburu

dan hilang habitatnya. Pun, pencemaran terjadi di sungai-sungai, juga polusi udara yang terjadi di wilayah perkotaan.

Tak heran, negeri ini mencatat serangkaian rekor buruk, pernah dinobatkan sebagai negeri yang paling cepat menghabiskan hutannya karena deforestasi, hingga masuk sebagai salah satu peringkat teratas negeri yang paling mencemari laut karena limbah plastiknya.

Hal ini tidak terlepas dari hilang dan bergesernya paradigma ekosentris yang dulu dianut dan dihayati oleh para leluhur bangsa. Kearifan tradisional dan pengetahuannya perlahan secara berangsur-angsur menghilang. Digantikan oleh logika baru, rasionalitas baru, sebuah cara pikir dimana manusia berkuasa atas alam dan lingkungannya.

Bertumpu pada antroposentris, derap ekonomisasi sumberdaya alam bertumpu pada bagaimana memanfaatkan alam sebagai obyek eksploitasi. Dalam cermatan ini munculah istilah baru seperti “lahan tidur”, “intensifikasi”, dan “efisiensi”. Alam lingkungan dihitung dengan seberapa banyak dia mampu memberi jasa bagi kehidupan manusia. Manusialah yang berkuasa alam. Alam adalah obyek yang dapat diperas untuk mendukung kehidupan manusia.

Setidaknya, Inilah yang terlihat dan terjadi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir ini.

Sumberdaya alam dan lingkungan tidak menjadi konsideran penting yang diperhitungkan dalam pengambilan keputusan politis pengambil kebijakan. Padahal tanah, air dan bumi yang kita tempati ini bukanlah milik kita, tapi titipan dari anak cucu.

Pertumbuhan ekonomi ternyata mengorbankan sumberdaya alam. Namun, tidak terelakkan bahwa kesenjangan kemakmuran pun semakin membesar yang dinyatakan dalam angka gini ratio. Eksploitasi alam lingkungan hanya membawa kemakmuran bagi para segelintir orang.

Dampak eksploitasi alam dan lingkungan pun telah terlihat nyata. Ratusan ribu orang terdampak asap dari kebakaran, demikian pula puluhan ribu orang yang terpaksa kehilangan kenyamanan hidup akibat tanah longsor, banjir, maupun cemaran polutan dari debu batubara, cemaran sungai, hingga hilangnya biota di perairan laut.

Lalu dimana letak relevansi isu-isu lingkungan dilihat dari kajian ilmu komunikasi?

Ilmu komunikasi bertujuan untuk melihat makna, representasi simbol-simbol yang kemudian diungkapkan dalam sebuah isi pesan yang tersampaikan. Dalam ontologinya, komunikasi berupaya untuk mencari “yang ada”, sebuah arti, struktur, prinsip serta realitas yang terkandung dalam sebuah isi pesan.

Dengan demikian, komunikasi lingkungan pun tak luput dari proses untuk mencari kebenaran dan kenyataan hakiki. Lingkungan harus dilihat dan dipahami lewat berbagai dialektika tentang sifat dasar realitas yang ada.

Penelitian dalam bidang komunikasi lingkungan harus didorong untuk lebih mencari tahu jawaban tentang keberadaan tentang “ada” alih-alih sekedar menempatkan obyek dan isu lingkungan dalam pengukuran lewat tindak metodologis tertentu.

Hakikat kebendaan yang terbentang dalam berbagai fenomena lingkungan yang hadir haruslah mampu untuk dimaknai secara lengkap. Harus dikupas tentang “dari kenyataan hal ada” yang berada di berbagai tingkatan alam semesta. Sebuah tindak transendental keilahian yang akan membawa dan membuka tingkat kesadaran kemanusiaan.

Lingkungan tidak dapat bicara tentang dirinya sendiri. Manusalah yang akan memaknainya. Pengetahuan tentang alam lingkungan tersebut tidak akan muncul dan menampakkan dirinya

jika tidak terdapat sebuah proses perjumpaan. Mustahil, jika persoalan lingkungan selalu ditempatkan sebagai obyek terpisah.

Cara pandang antroposentris (*cogito ergo sum*), akan menyebabkan alienasi, memisahkan manusia dari alamnya, dari lingkungannya. Menyalahi kodrat hakiki, karena pada dasarnya lingkungan tempat hidup manusia tidak akan pernah lepas dari persoalan kemanusiaan.

Dalam posisi positivistik, hubungan epistemologis ini menempatkan posisi manusia *melulu* sebagai subyek. Berbagai kajian yang dilakukan tidak dilihat dalam bentuk kaca mata tentang posisi manusia dalam dimensi sebuah bagian (*part of*) tetapi terpisahkan (*separate*), sehingga menempatkan lingkungan dalam kaca mata “dia ada di sana”.

Akibatnya, persoalan yang muncul dilihat tidak terlihat secara holistik, hanya terbatas pada fenomena yang tampak dan yang terlihat jelas, namun tidak pernah sampai dalam bentuk kesadaran batin dan nomena.

Prakarsa menempatkan komunikasi lingkungan akan membawa dalam satu aras baru bentuk etika terhadap hubungan antara manusia dan alam lingkungannya. Moral terhadap alam yang harus dihargai, dimaknai, dibawa dalam konteks kesadaran empirik.

Komunikasi lingkungan pada hakikatnya alam melahirkan bentuk-bentuk penjabaran dalam perilaku keseharian, yang dapat digunakan secara praktis oleh berbagai kalangan. Baik itu para peneliti, siswa, para pengambil kebijakan, jurnalis, kelompok masyarakat sipil, hingga publik secara luas.

Komunikasi lingkungan diharapkan tidak lagi hanya sekedar seperangkat pengetahuan, namun akan masuk dalam kesadaran hakiki, sebuah nilai norma yang muncul yang tidak berasal dari keterpaksaan tapi buah dari rasa terimakasih kepada alam, ibu pertiwi dimana kita dilahirkan dan dibersarkan.

Penyampaian pesan komunikasi lingkungan yang tepat akan menghadirkan wawasan baru, sebuah kesadaran kritis baru untuk mencerna tujuan pembangunan yang selaras dengan keberlanjutan dan keberadaan sumberdaya alam dan lingkungan, tempat manusia tinggal didalamnya. Sehingga akan tercapai kesejahteraan bagi segenap elemen anak bangsa.

Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini. Saya berharap agar buku ini semakin memperkaya khazanah dan referensi tentang bahasan komunikasi lingkungan di Indonesia.

Bogor, Februari 2017

Dr. RIDZKI R. SIGIT
(*Mongabay Indonesia*)

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| SEKAPUR SIRIH DARI PENULIS..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | xi |
| DAFTAR ISI | xvi |
| 1 | |
| POSISI KOMUNIKASI LINGKUNGAN..... | 1 |
| 2 | |
| SAATNYA KOMUNIKASI LINGKUNGAN | 27 |
| 3 | |
| MEMAKNAI LINGKUNGAN BUKANLAH BERNOSTALGIA..... | 32 |
| 4 | |
| DARURAT MEMAKNAI ALAM..... | 38 |
| 5 | |
| KEMARAU DAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN..... | 44 |
| 6 | |
| HARI BUMI, MOMENTUM MEMAKNAI ALAM..... | 49 |
| 7 | |
| SENSITIVITAS KASUS LINGKUNGAN, BERKACA PADA KASUS PT. BMH..... | 54 |
| 8 | |
| BAMBU Dan MAKNA LINGKUNGAN..... | 60 |
| 9 | |
| BAMBU LEBIH CEPAT MERESTORASI LAHAN GAMBUT | 65 |
| 10 | |
| GAMBUT YANG HARUS DIMAKNAI..... | 70 |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 11 | KAMPANYE GAMBUT, KAMPANYE ANTI ASAP | 75 |
| 12 | KAMPANYE LINGKUNGAN YANG (TIDAK) PENTING | 81 |
| 13 | TALANG TUWO DAN HARI BUMI | 86 |
| 14 | SPIRIT LINGKUNGAN DARI TALANG TUWO..... | 91 |
| 15 | BELAJARLAH KE DESA..... | 97 |
| 16 | HAKIM SEBAGAI KOMUNIKATOR..... | 103 |
| 17 | PERLU, “EKSPLOITASI” LINGKUNGAN DI TV..... | 109 |
| 18 | KOMUNIKASI LINGKUNGAN DAN CERITA RAKYAT | 113 |
| 19 | TNI DAN KEPEDULIAN LINGKUNGAN | 118 |
| 20 | TUMBAL IWAK BELIDO | 124 |
| 21 | MENYOAL HUTAN DESA DI SEMENDE | 129 |
| 22 | BURUNG MIGRAN DAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN..... | 133 |
| 23 | SEMENDE, NEGERI PARA TUNGGU TUBANG | 139 |
| | Biodata Singkat Penulis..... | 145 |

1

POSISI KOMUNIKASI LINGKUNGAN

Pengantar

Saat seseorang berada dalam sebuah hamparan tanah yang luas, tiupan angin semilir, gemericik air, dan sesekali terdengar desauan daun bambu, maka dia bisa saja berpikir bahwa inilah sumber kehidupan, inilah penyambung hidup, dan inilah anugerah alam terbesar. Ia kemudian bisa saja memaknai bahwa disinilah padi bisa ditanam, disinilah ikan-ikan bisa dipelihara, disinilah rumah bisa dibangun, atau bisa pula disinilah pabrik bisa didirikan. Bisa apa saja, tergantung pada motivasi dan kepentingannya.

Itulah simbol yang berasal dari alam. Perbukitan, tanah yang luas, air, angin, pepohonan, adalah simbol-simbol yang berasal dari alam. Manusia yang hidup di wilayah tersebut, bisa saja punya makna berbeda terhadap simbol-simbol yang ada.

Saat satu orang bertemu dengan orang yang lainnya, berbicara, bersepakat, dan kemudian lahirlah makna bersama. Komunikasipun terjadi, komunikasi antar manusia mengenai lingkungan atau alam sekitarnya. Di sisi lain, dalam perspektif yang lebih dalam, komunikasi bukan saja antar manusia, tetapi antara manusia dengan lingkungan itu sendiri, yaitu saat manusia

memaknai lingkungan dan lingkungan juga memaknai dalam bentuk respon tertentu.

Pada situasi yang lain, saat sebuah pemerintah kota akan menata wilayahnya, ditetapkanlah bahwa daerah tertentu adalah kawasan resapan air, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan hijau, dan kawasan perdagangan. Muncullah dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang kemudian dilegalkan dalam bentuk peraturan daerah. Mengapa pemerintah kota membuat penetapan seperti itu? Tentu setelah dilakukan pengkajian dengan melihat dan menganalisa topografi alam, termasuk proyeksi kependudukan dalam beberapa periode kedepannya.

Apa yang dilakukan pemerintah kota tersebut, itulah bagian penting komunikasi lingkungan, yaitu saat melakukan pemaknaan, karena saat itu pemerintah memberikan makna terhadap topografi alam yang ada. Memaknai adalah kata kunci untuk masuk dalam definisi tentang komunikasi lingkungan.

Begitupun, saat sebuah media massa, begitu gencarnya memberitakan fakta-fakta tentang kerusakan lingkungan, usaha perbaikan lingkungan, atau aspek lain tentang lingkungan, maka saat itu sudah terjadi proses komunikasi lingkungan. Media massa adalah instrumen utama dalam membentuk opini publik tentang suatu objek, termasuk lingkungan. Media mengkomunikasikannya ke publik, yang sebelumnya sudah melalui proses pemaknaan oleh insan media itu sendiri.

Pada peristiwa lain, dapat pula dilihat munculnya berbagai baliho, spanduk, sticker, iklan, seminar, diskusi, dan sebagainya, yang membahas tentang lingkungan hidup. Ajakan dan dorongan agar semua pihak melakukan kepedulian terhadap lingkungan pada

dasarnya adalah upaya persuasif untuk membangun kesadaran publik, mengajak agar semua pihak peduli terhadap soal-soal lingkungan. Inilah perspektif lain dari komunikasi lingkungan, yang lazim dikenal dengan kampanye lingkungan hidup.

Semua peristiwa tersebut, punya makna penting yaitu manusia hidup dalam lingkungan tertentu, mereka memaknai dan kemudian membentuk makna bersama. Mereka juga meneruskan makna-makna tersebut ke pihak lain, disampaikan dari generasi ke generasi, menjadi sebuah kesepakatan. Pada sisi lain, makna ini bisa berubah, berkembang, tergantung pada komunitas masyarakat tersebut. Komunikasi lingkungan akan berbicara tentang ragam pemaknaan terhadap fenomena yang ada.

Gagasan Tentang Komunikasi Lingkungan

Sebelum masuk pada bahasan tentang komunikasi lingkungan, mula pertama perlu dibahas tentang konsep lingkungan itu sendiri. Konsep ini bisa dipinjam dari pakar-pakar ilmu lingkungan dan Antropolog. Cukup variatif juga makna lingkungan yang kemudian banyak disinggung para ahli.

Ahimsa-Putra (2004: 38) menjelaskan bahwa lingkungan atau *environment* secara garis besar dapat dibedakan berdasarkan (1) sifat atau keadaannya dan (2) asal-usulnya. Lingkungan berdasarkan sifat dapat dipilah lagi menjadi (Yenrizal, 2015):

1. Lingkungan fisik yang berupa benda-benda di sekitar manusia, makhluk hidup, dan segala unsur-unsur alam:
2. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial termasuk disini perilaku-perilaku manusia atau pelbagai aktivitas sosial yang berupa interaksi antarindividu serta berbagai aktivitas individu: dan

3. Lingkungan budaya. Lingkungan ini mencakup pandangan-pandangan, pengetahuan, norma-norma serta aturan-aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Sedangkan, lingkungan yang dilihat dari asal-usulnya berupa:

1. Lingkungan alami (*natural environment*), di mana lingkungan jenis ini memiliki pengertian keseluruhan unsur di luar diri manusia yang bukan ciptaan manusia.
2. Lingkungan buatan (*man made environment*) yakni lingkungan yang merupakan hasil kreasi manusia.

Gagasan Ahimsa Putra dapat pula dihubungkan dengan pendapat dari Otto Soemarwoto. Dikatakan oleh Soemarwoto (2004) bahwa manusia sebagai salah satu organisme hidup, tidak dilihat dalam isolasi, terpisah dari dan berada di atas alam, melainkan bagian dari dan berada di alam semesta. Ada kesatuan hubungan, yang disebut sebagai sebuah ekosistem. Seluruh benda dan keadaan yang terdapat di dalam ruang yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan hidup mesti kita artikan secara luas, yaitu tidak hanya sekedar untuk lingkungan biologi dan fisik akan tetapi juga untuk lingkungan budaya, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi. Penjelasan Soemarwoto ini meluaskan makna lingkungan yang tidak lagi sekedar definisi dari ilmuwan fisik belaka.

Pada penjelasan ini, ada indikasi kuat bahwa dalam memahami lingkungan, apabila salah satu unsur terganggu maka gangguan akan dirasakan pula oleh unsur lainnya. Amanat yang dibebankan Tuhan atas manusia bukanlah untuk menaklukkan alam serta mengeksploitasinya, akan tetapi kewajiban untuk menjaga keberlanjutan fungsi alam agar senantiasa dapat dimanfaatkan oleh manusia yang lain (Yenrizal, 2015). Mahatma Gandhi pernah

berkata, "Bumi cukup untuk memenuhi kebutuhan kita semua, namun ia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan segelintir orang yang tamak (Husen, 2007). Keterkaitan manusia dengan alam adalah sesuatu yang memang mendasar, bahkan dari sudut pandang agama juga menjadi titik fokus.

Dalam konteks buku ini, lingkungan yang dimaksud mengadopsi dari gagasan di atas, bahwa lingkungan bukan semata-mata lingkungan fisik. Segala yang terkait di sekitar manusia bisa dimaknai sebagai lingkungan. Terfokus lagi, lingkungan alam adalah sorotan kajian yang dirasa sangat mendesak, yaitu lingkungan yang ada di sekitar manusia, berupa segala karakteristik alam yang ada. Sungai, bukit, laut, tanah, udara, rawa-rawa, lahan gambut, dan segala ekosistem yang hidup di daerah tersebut adalah lingkungan. Disitulah lingkungan manusia, dan disitulah kehidupan itu ada.

Munculnya makna lingkungan, akan berkorelasi pula dengan posisi manusia disekitarnya. Terjadilah interaksi, terjadi pemahaman dan berlangsunglah hubungan yang dalam versi AT Rambo (1984) disebut sebagai hubungan antara ekosistem yang ada, membentuk sebuah kesepahaman tersendiri. Ini mempertegas bahwa manusia hakekatnya adalah makhluk yang memaknai lingkungan sekitarnya.

Mead (1967) berkata bahwa manusia adalah makhluk yang simbolik. Manusia memproduksi simbol, memaknai simbol, dan mentransformasikan simbol dalam proses komunikasinya. Simbol itu sendiri bersifat manasuka, sembarang, dan sangat tergantung konteks masyarakatnya. Semua orang, masyarakat, dengan ragam budayanya, punya kebebasan untuk memberikan makna-makna tersendiri terhadap apa yang ada disekitarnya. Kebenaran makna ada pada komunitas tersebut.

Hal ini menegaskan bahwa berkomunikasi bukanlah tindakan yang sekedar linear atau satu arah belaka. Berkomunikasi adalah aktifitas yang sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek. Faktor kejiwaan, faktor ruang dan waktu, faktor budaya, termasuk faktor lingkungan, sangat mempengaruhi.

Salah satu perspektif penting dalam keilmuan komunikasi adalah transaksional (Burlund, 1970). Tekanannya adalah mekanisme komunikasi yang mengedepankan aspek dua arah, berkelanjutan, dan tidak ada titik berhenti. Antara masing-masing pelaku komunikasi memiliki tanggungjawab yang sama, aktif, dan berperan dalam menentukan keberhasilan proses yang terjadi. Intinya, pelaku komunikasi adalah komponen yang aktif.

Istilah transaksi mengisyaratkan bahwa pihak yang berkomunikasi berada dalam keadaan interdependensi atau timbal balik, eksistensi satu pihak ditentukan pihak lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa semua unsur dalam proses komunikasi saling berhubungan. Persepsi seorang peserta komunikasi saling bergantung dengan persepsi orang lain terhadap dirinya, bahkan tergantung pula konteks lingkungannya (Mulyana, 2003:68).

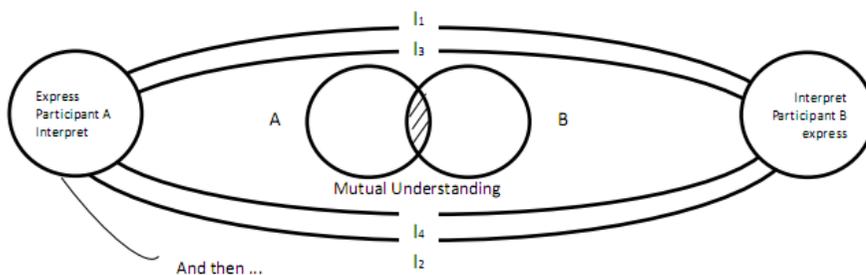
Penjelasan tentang komunikasi transaksional, memiliki korelasi dengan istilah model konvergensi dalam komunikasi, dan bahkan lebih maju lagi. Model yang dikemukakan oleh Kincaid (1979) ini menegaskan bahwa komunikasi digambarkan lebih interaktif dan bersifat seperti siklus. Tidak ada perbedaan tajam antara sumber dan penerimaan, keduanya bahkan memiliki posisi yang setara, bahkan antara pesan dengan umpan balik. Secara sederhana bisa dilihat dari bagan berikut. Model ini menekankan bahwa fungsi atau sasaran utama dari komunikasi adalah kesamaan pemahaman (*mutual understanding*).

Gagasan konvergensi inilah yang disampaikan oleh Florr (2004) bahwa model konvergensi lebih tepat dipakai dalam praktek komunikasi lingkungan. Model ini dianggap lebih sensitive terhadap aspek budaya, apalagi model ini berbasis pada filosofis Timur (Lao Tzu's) dengan konsep perpaduan antara totalitas dan pengalaman yang dinamis.

Oleh karena itu, Florr mengatakan bahwa dalam agenda lingkungan, komunikasi semestinya bukan hanya sekedar melakukan support semata, tetapi jadi bagian dari aspek tersebut. Ilmu komunikasi bisa mengambil peran sebagai bagian yang tak terpisahkan, bukan semata-mata kampanye lingkungan saja. Ilmu komunikasi harus bisa mendorong partisipasi besar dari pelaku komunikasi, dan komunikasi lingkungan harus bersifat bisa memberdayakan semua pelaku komunikasinya.

Gambaran model konvergensi yang kemudian bisa menjadi ilham komunikasi lingkungan, dapat dilihat dari bagan berikut.

Bagan 1. Convergence Models of Communications



Sumber : Florr, 2004.

Mekanisme konvergensi, yang merupakan perkembangan dari gagasan linear dan interaksional, tampak dalam berbagai peristiwa komunikasi. Baik komunikasi antar pribadi, komunikasi intra pribadi, komunikasi massa, dan ragam konteks komunikasi lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa proses komunikasi antar manusia mengalami fluktuasi dan dinamis, minimal ini tampak dalam berbagai kajian.

Perspektif konvergensi kemudian akan ditekankan pada aspek komunikasi lingkungan. Alasan penempatan komunikasi lingkungan dalam perspektif ini, dilatari oleh realita bahwa hidup manusia senantiasa berada dan dipengaruhi oleh konteks lingkungan, tanpa mengenal batas waktu. Manusia senantiasa akan berkomunikasi dan selalu memaknai pesan terikat pada konteks waktu dan ruang. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri, karena itu tekanannya tetap pada konteks komunikasi antar manusia, yaitu manusia yang terkait dengan lingkungan sekitar.

Mengenai ini (komunikasi lingkungan) terdapat beberapa pandangan. Kajian yang banyak muncul adalah pada konteks pola adaptasi manusia dengan alam dengan dasar pada kearifan lokal yang dimiliki.

Wilayah komunikasi lingkungan adalah salah satu bidang yang juga mengalami proses fluktuasi dan terus dinamis. Fluktuasi ini berkisar seputar posisi manusia dengan lingkungan dan sudut pandang dalam melihat lingkungan itu sendiri. Apakah lingkungan dianggap sebagai posisi yang aktif atukah justru pasif yang bersifat hanya menerima saja perlakuan dari manusia.

Berlangsungnya proses komunikasi yang intensif antara sesama manusia ataupun manusia terhadap lingkungan alam,

hakekatnya adalah proses penciptaan dan pertukaran simbol-simbol. Ada lambang-lambang tertentu yang mereka tangkap dan kemudian dimaknai bersama. Pada prosesnya bisa saja terjadi ragam pemaknaan. Disinilah simbol tersebut dikomunikasikan. Misalnya, pohon kayu besar yang sudah berumur ratusan tahun di tengah hutan akan dimaknai manusia sebagai pohon yang mungkin saja memiliki buah-buahan tertentu. Makna ini kemudian diteruskan pula pada generasi-generasi berikutnya. Peristiwa inilah yang bisa dikatakan berlangsungnya proses komunikasi tersebut (Yenrizal, 2015). Pada sisi lain, ini melebar menjadi pemahaman tentang komunikasi lingkungan.

Cox dalam tulisannya *"Environmental Communication and Public Sphere"* (2010:20), menyatakan bahwa komunikasi lingkungan adalah sarana konstitutif dan pragmatis bagi pemahaman manusia dengan lingkungan serta hubungan manusia dengan alam. Hal ini adalah media simbolis yang digunakan dalam mengkonstruksi masalah-masalah lingkungan dan menegosiasikan respon yang berbeda dalam masyarakat.

Cox (2010:20-21) juga menyatakan bahwa komunikasi lingkungan meliputi dua fungsi utama yaitu, pragmatis dan konstitutif. Secara pragmatis ini berkaitan dengan pendidikan, kewaspadaan, meyakinkan, memobilisasi, dan membantu manusia mengatasi masalah-masalah lingkungan. Sedangkan dalam pemahaman konstitutif, meliputi aspek mengatur, menyusun, merepresentasikan alam dan masalah-masalah lingkungan itu sendiri sebagai subjek bagi pemahaman manusia. Melalui kerangka pemahaman ini, komunikasi lingkungan membawa pada pemahaman bahwa alam seperti hutan atau sungai sebagai

ancaman ataupun sebagai sahabat, menghormati sumber daya alam apakah untuk sebatas eksploitasi atau sebagai sistem pendukung vital bagi kehidupan, atau bisa juga sebagai penakluk ataukah sebagai sahabat yang baik (Yenrizal, 2015).

Dalam sudut pandang lain, Corbett (2006) menyatakan sebuah pemahaman yang lebih luas melalui pendekatan kosmopolitannya. Lewat tulisannya pada *Communicating Nature: How We Create and Understand Environmental Messages* (2006), Corbett menyatakan bahwa komunikasi lingkungan adalah,

1. Disajikan dalam nilai-nilai, kata-kata, tindakan, dan praktek sehari-hari,
2. Diinterpretasikan dan dinegosiasikan secara individual,
3. Berakar secara historis dan budaya,
4. Memiliki akar ideologis,
5. Tertanam dalam paradigma sosial dominan yang memberikan nilai instrumental untuk lingkungan dan percaya itu ada untuk melayani manusia,
6. Rumit terkait dengan budaya pop, terutama iklan dan hiburan,
7. Dibingkai dan dilaporkan oleh media dengan cara yang umumnya mendukung status quo,
8. Dimediasi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga sosial seperti pemerintah dan bisnis.

Tampak bahwa batasan yang dibuat oleh Corbett menyuguhkan pemahaman yang lebih luas, mencakup banyak aspek dan meliputi banyak bidang kajian. Corbett seakan ingin berkata bahwa komunikasi lingkungan tak bisa berdiri sendiri, ia harus dan akan selalu berkolaborasi dengan berbagai wilayah kajian. Komunikasi lingkungan itu sangat faktual dan sekaligus rumit.

Oravec dan Klurke (Senecah, ed., 2004:3), pada literatur berbeda menyebutkan bahwa komunikasi lingkungan adalah suatu studi tentang cara pandang manusia dalam melihat, mengetahui, dan membangun secara sosial budaya terhadap alam sekitarnya, dengan menggunakan bahasa dan simbol-simbol tertentu, sebagai bahan dalam bertindak dan menuntun perilaku manusia terhadap lingkungannya.

Ilmuwan lain yang berbicara secara lebih detil tentang kajian ini adalah Richard Jurin (2010). Jurin (2010:15) berkata bahwa komunikasi lingkungan adalah sebuah generasi sistematis dan pertukaran pesan manusia dalam, dari, untuk, dan tentang dunia di sekitar manusia dan interaksi manusia dengan alam. Jurin mengutarakan beberapa aksioma komunikasi lingkungan (2010:3-4), yaitu

1. *Komunikasi adalah aktifitas manusia.* Meskipun para ilmuwan telah mengidentifikasi banyak proses antara organisme non-manusia yang dapat diberi label 'komunikasi', kesengajaan dan kekayaan pesan yang membentuk komunikasi lingkungan hanya ditemukan di antara manusia. Memang, anggapan manusia berada di atas seluruh alam telah menjadi sumber dari banyak masalah lingkungan. Hal ini adalah ironis dan berharap bahwa sudut pandang yang sekarang sedang digunakan oleh komunikator lingkungan bisa membantu mengatasi degradasi yang disebabkan manusia biosfer.
2. *Manusia tidak bisa tidak berkomunikasi.* Eksistensi dasar adalah tindakan komunikasi: bertindak adalah berkomunikasi. Mencoba untuk tidak mengirimkan pesan apapun adalah mengirimkan pesan itu sendiri. Jika seseorang tidak

mengirimkan pesan, sesungguhnya itu adalah mencoba berkomunikasi dengan tujuan dan kompetensi tertentu. Menjadi hal yang paling tepat ketika manusia memilih berkonsentrasi pada sumber daya alam. Pemahaman tergantung pada bentuk yang sesuai dan pengiriman pesan. Kebingungan adalah satu hasil dari komunikasi yang buruk.

3. *Pemahaman adalah sasaran komunikasi.* Komunikasi berhasil bila pesan dipahami oleh penerima yang diinginkan. Banyak pesan disalahpahami, tertutup oleh beberapa kesalahan dalam sistem. Gangguan ini disebut *noise*. *Noise* dapat terjadi dalam setiap bagian dari sistem komunikasi. Komunikator berusaha untuk mengatasi dan menghindari *noise* ini.
4. *Tanggung jawab terletak pada komunikator, bukan penerima.* Kesuksesan komunikator adalah kemampuan mereka mengemas pesan untuk tampil dengan efektivitas maksimum. Mereka harus tahu persis kepada siapa mereka mengirimkan informasi spesifik, bagaimana publik ini lebih suka menerima informasi tersebut, dan bagaimana mereka dapat diharapkan untuk menerjemahkannya. Mengetahui mengapa seseorang ingin mengirim pesan membantu komunikator untuk bertanggungjawab dengan sukses. Jadi, etika memainkan peranan yang menentukan dalam komunikasi lingkungan. Saat suatu pesan tidak dipahami, kesalahan jatuh kembali pada pencetus pesan.
5. *Manusia bergantung pada alam untuk bertahan hidup.* Segala sesuatu yang dilakukan untuk berkembang dan mengelompokkan masyarakat secara khusus, tergantung pada tindakan yang dilakukan dalam hidup (Baskin 1997: Harian

1997 dalam Jurin, 2010:13). Bumi adalah satu-satunya rumah yang dimiliki dan fungsi biosfernya mendukung kehidupan manusia. Sistem alam memberi manusia udara bersih, air bersih, makanan, tempat tinggal, kesenangan, keindahan dan keyakinan dalam urusan di luar diri manusia sendiri. Manusia hidup dan bekerja jika, dan hanya jika, alam kehidupan bekerja (Cohen 2007 dalam Jurin, 2010:13).

6. *Bumi/alam memiliki pesannya sendiri untuk dibagikan pada manusia.* Mendengarkan planet ini adalah salah satu cara untuk mengkonseptualisasikan karya ilmu pengetahuan. Para ilmuwan merupakan sumber penting dari informasi untuk semua lingkungan komunikator. Mereka berkomunikasi mengenai lingkungan untuk memahami apa yang lingkungan telah katakan pada mereka. Indra manusia telah diberikan segala macam *gadget* dan instrumentasi.

Aspek-aspek yang dijelaskan Jurin di atas, terasa sangat aktual dan menarik untuk dikontekskan pada aspek lingkungan saat ini. Unsur terakhir yang menyebutkan bahwa bumi memiliki pesannya sendiri untuk dibagikan pada manusia, artinya bumi/alam bukanlah komponen yang pasif, padanya ada unsur-unsur aktif yang selalu memberikan respon terhadap aktifitas manusia.

Sementara itu, Alexander G Flor (2004:5) berkata yang lebih menohok lagi bahwa komunikasi lingkungan adalah aplikasi dari pendekatan-pendekatan, prinsip-prinsip, strategi, dan teknik-teknik komunikasi dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan. Hal ini bisa dimaknai sebagai pertukaran informasi, pengetahuan dan kearifan antara manusia dengan lingkungan. Flor (2004:4) mengatakan tiga asumsi utama dalam komunikasi lingkungan yaitu

pertukaran atau transaksi, (1) materi, (2) energi, dan (3) informasi, antara lingkungan dengan sistem kehidupan lainnya.

Ada yang sangat menarik dari penjabaran Flor (2004:25) bahwa komunikasi seharusnya tidak melulu sebagai pendukung pengelolaan lingkungan, tetapi harus ada dalam konteks tersebut. Apabila hanya sebagai pendukung, maka yang terjadi adalah adanya kecenderungan komunikasi digunakan sebagai alat untuk memanipulasi program-program yang akan dilaksanakan. Program-program komunikasi seharusnya tidak sekedar berorientasi sumber dan *media-centric* belaka. Harus ada partisipasi besar dari penerima atau dari masyarakat. Program komunikasi lingkungan mutlak harus fokus memberdayakan audien, melibatkannya, dan bukan menempatkannya pada posisi yang pasif (Yenrizal, 2015).

Pendapat dari Flor serta Cox relevan sekali untuk terus dielaborasi dalam ranah komunikasi lingkungan. Ini tidak lepas dari fenomena bahwa antara manusia dengan lingkungan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dilepaskan. Pendekatannya menjadi sangat kompleks dan harus pula mempertimbangkan aspek budaya serta kepercayaan yang berkembang. Konteks lanjutannya, keharmonisan dan keserasian hubungan menjadi kunci penting dalam melihat pola hubungan yang terjadi. Tak ada dominasi atau yang tertindas, semua dalam posisi setara, demikianlah komunikasi lingkungan harusnya ditempatkan.

Kajian Komunikasi Lingkungan

Ada kecenderungan selama ini, riset-riset dan kajian tentang komunikasi lingkungan, lebih terfokus pada kajian media, kampanye, atau tepatnya berorientasi sumber. Tidak salah memang,

karena kajian komunikasi bisa masuk ke wilayah tersebut. Tetapi pada posisi itu, komunikasi cenderung hanya dijadikan sebagai alat semata, baik dalam kampanye lingkungan, ataupun untuk mengangkat isu-isu lingkungan. Kajian yang berorientasi subjek secara keseluruhan, sangat minim dilakukan, atau bahkan mungkin tidak ada. Justru yang banyak melakukan kajian ini adalah kalangan dari Antropologi Lingkungan ataupun Sosiologi Lingkungan (Yenrizal, 2015).

Berikut ini akan ditampilkan beberapa contoh riset komunikasi lingkungan yang pernah dilakukan oleh beberapa ahli komunikasi .

Tabel 1
Riset-riset Mengenai Komunikasi Lingkungan

| No | Nama | Judul | Fokus |
|----|---|---|--|
| 1 | Tudor B Ionescu <i>(Environment Communication, Journal of Nature and Culture, Vol 6 No. 2, June 2012)</i> | Communicating in Germany about Fukushima Accident : How Direct Encounter Beat Media Representation | Kajian media, kampanye, teknik komunikasi sebagai sarana membangun opini |
| 2 | Robert J Brulle <i>((Environment Communication, Journal of Nature and Culture, Vol 4 No. 1, March 2010)</i> | From Environmental Campaign to Advancing the Public Dialog : Environmental Communication for Civic Management | Kampanye tentang isu lingkungan berdasarkan partisipasi masyarakat |
| 3 | Mariel Vilella Casaus <i>(Catalan Journal of Comunication)</i> | Press News Coverage of GM Crops in Catalonia in 2005 : A Case Study in Environmental Communications | Kajian media, khususnya pada liputan media seputar isu |

| No | Nama | Judul | Fokus |
|----|--|--|--|
| | <i>and Culture Studies, Vol 2, No.1, 2010)</i> | | modifikasi genetik pada tanaman. |
| 4 | Yaron Katz <i>(International Journal of Communication, Vol 3, 2009)</i> | Protecting Local Culture in Global Environment : The Case of Israel's Broadcast Media | Kajian media, penekanan pada bagaimana pemanfaatan media massa untuk melindungi budaya lokal |
| 5 | Richard Maxwell and Toby Miller <i>(International Journal of Communication, Vol 2, 2008)</i> | Ecology Ethics and Media Technology | Efek dari kemajuan teknologi terhadap etika lingkungan, terutama limbah teknologi |
| 6 | Olaf Schroth, Jeannette Angel, Stephen Sheppard & Aleksandra Dulic <i>(Environment Communication, Journal of Nature and Culture, Vol 8, Issue 4, 2014)</i> | Visual Climate Change Communication: From Iconography to Locally Framed 3D Visualization | Media visual, aspek praktis ilmu komunikasi |
| 7 | Jonathan P. Schuldt & Sungjong Roh <i>(Environment Communication, Journal of Nature and</i> | Media Frames and Cognitive Accessibility: What Do "Global Warming" and "Climate Change" Evoke in Partisan Minds? | Kajian media, fokus pada hubungan frame media terhadap pemikiran publik |

| No | Nama | Judul | Fokus |
|----|---|--|---|
| | <i>Culture, Vol 8, Issue 4, 2014)</i> | | |
| 8 | Jess A Koepler, Joe E Heimlich, Victor S Yoco <i>(International Journal of Applied Environmental Education and Communications, Vol 9, 2010)</i> | Communicating Climate Change to Visitor of Informal Science Environments | Teknik Komunikasi, fokus pada aspek persuasi dengan topik perubahan iklim |
| 9 | Adriana Bailey, Lorine Giangola, Maxwell T Boykoff <i>(Environment Comunication, Journal of Nature and Culture, Vol 8, No 2, 2014)</i> | How Gramatical Choice Shapes Media Representations of Climate (Un)certainity | Kajian media, terfokus pada unsur gramatikal pilihan media dalam melihat ketidakpastian iklim |
| 10 | Stefan Fladutescu <i>(Journal of Sustainable Development Studies, Vol 6, No. 1, 2014)</i> | Communication Environment: Context/Situation/Framework | Fokus pada hubungan dan pengaruh lingkungan pada perilaku komunikasi, terutama konteks tempat |
| 11 | M Najib Husain (2011) | Tata Kelola Komunikasi Lingkungan pada Kepemimpinan Parabela | Kearifan lokal, Opinion Leader dalam konteks Komunikasi Antar Pribadi. |

| No | Nama | Judul | Fokus |
|----|-------------------------------|---|---|
| | | | Mengetahui peran kelembagaan lokal dalam menjaga lingkungan |
| 12 | Ekna Satriyati/ 2011 | Pengelolaan Komunikasi Lingkungan Berbasis Nilai-Nilai Multikultural Di Pulau Masalembu Dan Kangean Madura | Mengungkapkan persepsi pengelolaan komunikasi lingkungan berbasis nilai-nilai multikultural di Pulau Masalembu dan Pulau Kangean Kabupaten Sumenep Madura |
| 13 | Valerrie Briere (2011) | Celebrity and Credibility in Environmental Communications (A Rhetorical Analysis of a Video Advocating for a Moratorium Regarding Shale Gas Exploitation in Quebec) | Analisis terhadap video protes eksplorasi gas di Quebec Kanada. Tekanannya adalah pada analisis isi video, sumbernya, aspek retorika yang dimunculkan. |

Sumber : Yenrizal, 2015 dan ditambahkan dengan beberapa data lainnya.

Jelas sekali sebagaimana tabel 1, kecenderungan kajian komunikasi lingkungan adalah aspek "luar" komunikasi itu sendiri. Tidak mengapa, karena memang itu adalah kajian komunikasi.

Perkembangan memang sangat dimungkinkan, karena ilmu pengetahuan bersifat dinamis, selalu berdialektika. Beberapa kajian malah ada yang menyentuh sisi budaya dan tradisi masyarakat. Di kajian lain juga ada bahasan tentang teknologi komunikasi yang berhubungan dengan aspek lingkungan. Semua adalah dinamika ilmu pengetahuan, yang tentunya harus direspon positif.

Memang, fokus kajian sebagaimana tabel 1, menempatkan lingkungan dan masyarakat sebagai objek kajian. Fokusnya sangat dominan berorientasi sumber. Manusia (dalam hal ini pemerintah, organisasi, perusahaan, kelompok masyarakat) dianggap sebagai sumber yang akan mengusahakan solusi terhadap masalah lingkungan, atau bisa juga ingin melakukan upaya pelestarian lingkungan (Yenrizal, 2015). Gejala seperti ini, pernah dibantah oleh Flor (2004:18), bahwa komunikasi lingkungan itu hakekatnya terdapat pada budaya manusia, spesifik, di dalam budaya tradisional. Alam dan budaya bukanlah sesuatu yang terpisah, tetapi satu kesatuan. Sebagai perbandingan, ini bisa dilihat perbandingan pada tabel 1, yang dominan pada kajian budaya masyarakat, namun juga tidak banyak dilakukan oleh ilmuwan komunikasi. Oleh karenanya kajian komunikasi lingkungan harus memasukkan dimensi budaya. Gagasan ini juga sama dengan pandangan Cox (2010) bahwa komunikasi lingkungan harus dipandang dalam perspektif keterkaitan manusia dengan lingkungan tersebut. Keunikan manusia akan berperan besar dalam interaksinya melihat lingkungan itu sendiri.

Dapat dikatakan bahwa bahasan mengenai lingkungan, budaya masyarakat, serta aspek komunikasinya harus mendapatkan porsi yang berimbang. Tidak bisa salah satu pihak diabaikan, karena

efektifitas kajian lingkungan ada pada wilayah tersebut. Tanpa bauran itu, masalah lingkungan tetap saja menjadi retorika belaka, sulit diimplementasikan dan tidak membumi.

Pada kajian komunikasi, ini termaktub dalam ranah persepsi sebagai inti komunikasi. Persepsi yang sejatinya berhubungan dengan budaya yang berkembang di masyarakat. Hubungan penting antara komunikasi dengan lingkungan, ada pada aspek persepsi dan perlakuan manusia dalam menindaklanjuti persepsinya tersebut.

Mulyana (2001:56) menjelaskan, secara teoretis dan praktis, persepsi manusia bisa dibagi dua, yaitu persepsi terhadap lingkungan fisik dan persepsi terhadap manusia. Persepsi terhadap manusia lebih sulit dan kompleks, karena manusia bersifat dinamis. Sedangkan persepsi terhadap lingkungan fisik, bisa dikatakan adalah persepsi terhadap lingkungan alam yang ada disekitar manusia. Hanya saja, persepsi terhadap lingkungan ini, akan dipengaruhi pula oleh persepsi terhadap manusia ketika berkomunikasi. Persepsi terhadap lingkungan fisik akan berjalan beriringan dengan persepsi dari manusia lainnya.

Kuswarno (dalam Bajari, 2010:12-15), pernah pula mengatakan bahwa kajian interaksi manusia dengan alam, sebenarnya mengacu pada paradigma dunia Timur. Bahasannya menjadi lebih holistik dan universal. Salah satunya adalah komunikasi dengan lingkungan (*communication with the environment*). Pendapat ini memang sangat ideal, dalam arti kata memperluas cakupan komunikasi pada aspek lain (Yenrizal, 2015). Tetapi tentu tidak mudah merumuskan kajian tersebut, kesulitan akan timbul pada wilayah metodologi, termasuk justifikasi ilmiah terhadap fenomena yang dikaji. Seperti

kesulitan menjelaskan bahwa rumput terbakar dan mengeluarkan asap gara-gara ada energi negatif dari manusia disekitarnya, atau longsor terjadi karena alam marah (dalam makna yang sebenarnya) karena manusia merusak pepohonan.

Untuk masa sekarang ini, semua terasa masih sulit, tetapi bukan tidak mungkin suatu saat riset komunikasi lingkungan akan sampai pada wilayah itu, yaitu komunikasi manusia dengan lingkungan alam dalam perspektif ilmiah. Beberapa pakar, seperti Peter Tompkin, ataupun Masaru Emoto, sudah mencoba ke wilayah itu. Tetapi dialektika akan selalu terjadi dan itu adalah proses dalam penguatan jati diri keilmuan komunikasi, khususnya komunikasi lingkungan.

Referensi

- Ahimsa-Putra, Heddi Shri, 2012. *Etno Bencana, Etno Sains untuk Kajian Bencana*, dalam Respon Masyarakat Loka atas Bencana, Agus Indiyanto dan Arqom Kuswanjono (ed.), Penerbit Mizan dan CRCS UGM, Bandung.
- Anderson, James A. 1987. *Communication Research*. USA : The McGraw Hill
- Bajari, Atwar dan Salaha Tua Saragih, 2010, *Komunikasi Kontesktual, Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer*, Remaja Rosda Karya, Bandung
- Bicker, Alan, Paul Silitoe, Johan Pottier (ed.), 2004, *Developmental and Local Knowledge*, Routledge, London
- Bonny, Eleanor, dan Fikret Berkes, 2008, *Communicating Traditional Environment Knowledge : addresing the diversity of knowledge, audiences and media types*, Polar Record, United Kingdom
- Brosius J Peter, George W Lovelace dan Gerald Marten, 1986, *Ethnoecology : An Approach to Understanding Traditional Agricultural Knowledge*, dalam Gerarld Marten, *Traditional Agriculture in Southeast Asia, A Human Ecological Perspective*, Westview Press, Colorado
- Bulle, Robert J, 2010, *From Environmental Campaign to Advancing the Public Dialog : Environmental Communication for Civic Management*, Environment Comunication, Journal of Nature and Culture, Vol 4 No. 1.
- Conklin, Harold, 1963, *The Study of Shifting Cultivation*, Washington DC.
- Cox, Robert, 2010, *Environment Communication and Public Sphere, Second Edition*, Sage Publications, USA

- Flor, Alexander G, 2004, *Environmental Communication : Principles, Approaches and Strategies of Communication, Applied to Environmental Management*, University of the Philippines.
- Gluch, Pamela and Christine Raisanen, 2009, *Interactional Perspective on Environmental Communication in Construction Projects*, Journal of Building Research and Information, Routledge, Taylor and Francis Group
- Hellsten, Ina, Amanda J. Porter & Brigitte Nerlich, 2012, *Imagining the Future at the Global and National Scale: A Comparative Study of British and Dutch Press Coverage of Rio 1992 and Rio 2012*, Environmental Communications, Journal of Culture and Nature, Volume 8 Issue 4, 2012.
- Hill, Anne, James Watson, Danny Rivers, and Mark Joyce, 2007, *Key Themes in Interpersonal Communications, Culture Identity and Performance*, Open University Press, Mc Graw Hill, London
- Husaini, M Najib, 2011, *Tata Kelola Komunikasi Lingkungan Pada Kepemimpinan Parabela Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Buton*, Konferensi Komunikasi Nasional "Membumikan Ilmu Komunikasi di Indonesia" Depok, 9-10 November 2011, Jawa Barat
- Ionescu, Tudor B., 2012, *Communicating in Germany about Fukushima Accident : How Direct Encounter Beat Media Representations*, Environmental Communications, Journal of Culture and Nature, Volume 6, No 2, Taylor and Francis Group.
- Iskandar, Johan, 2001, *Manusia, Budaya dan Lingkungan, Kajian Ekologi Manusia*, Humaniora Press, Bandung
- Jurin, Richard, Donny Roush, and Jeff Danter., 2010, *Environmental Communications, Skill and Principles for Natural Resources Managers, Scientist, and Engineer*, Springer Doerdrecht Heidelberg, Newyork London.

- Katz, Yaron, 2009, *Protecting Local Culture in Global Environment ; The Case of Israel's Broadcast Media*, International Journal of Communication, Volume 3.
- Keraf, A Sonny, 2002, *Etika Lingkungan*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Keraf, A Sonny, 2014, *Filsafat Lingkungan Hidup*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Koepler, Jess A., Joe Heimlich, and Victor S Yossco, 2010, *Communicating Climate Change to Visitor of Informal Science Environment*, Journal of Applied Environment Education and Communication, Volume 9 No. 4, Taylor and Francis Group.
- Littlejohn, Stephen W. 1996. *Theories of Human Communication*. USA: Wadsworth Publishing Company
- Maxwell, Richard and Toby Miller, 2008, *Ecology Ethics and Media Technology*, International Journal of Communication, Volume 2.
- Mead. George H. 1967. *Mind, Self, and Society*. London: The University of Chicago Press
- Mulyana, Deddy, 2003, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Rosda Karya
- Mulyana, Deddy. 2002. *Ilmu Komunikasi: suatu Pengantar*. Bandung: Rosda Karya
- Pillman, Werner, 2002, *Environmental Communication, Systems Analysis of Environmentally Related Information Flows as a Basis for the Popularization of the Framework for Sustainable Development*, Vienna, International Society for Environmental Protection
- Rambo, A Terry dan Percy Sajise (ed.), 1984, *An Introduction to Human Ecology Research on Agricultural Systems in Southeast Asia*, University of the Philippines, University Publication Program, College, Laguna, Philippines

- Satriyati, Ekna, 2011, *Pengelolaan Komunikasi Lingkungan Berbasis Nilai-Nilai Multikultural di Pulau Masalembu dan Kangean Madura*, Konferensi Komunikasi Nasional "Membumikan Ilmu Komunikasi di Indonesia" Depok, 9-10 November 2011, Jawa Barat
- Schroth, Olaf, Jeannette Angel, Stephen Sheppard & Aleksandra Dulic, 2004, *Visual Climate Change Communication: From Iconography to Locally Framed 3D Visualization*, Environmental Communication, Journal of Culture and Nature, Vol 8 Issue 4.
- Schuldt, Jonathon P. & Sungjong Roh, 2014, *Media Frames and Cognitive Accessibility: What Do "Global Warming" and "Climate Change" Evoke in Partisan Minds?*, Environmental Communication, Journal Culture and Nature, Volume 8, issue 4.
- Senecah, Susan L, ed., 2004, *The Environmental Communication Year Book*, New Jersey, London, Lawrence Erlbaum Associates Publisher
- Sereno, Kenneth K dan Edwar M Bodaken, 1975, *Understanding Human Communication*, Boston:Houghton Mifflin
- Soeharto, 1994, *Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Menuju Pembangunan Pertanian Berkelanjutan, Kasus Daerah Aliran Sungai Solo Hulu*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran
- Soemarwoto, Otto, 2004. *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Soemarwoto, Otto, 2008. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Djambatan, Jakarta
- Soemarwoto, Otto. 2004. *Problematik Pelik Kesetaraan Pembangunan Desa-Kota*, Makalah untuk Seminar Sehari

- Peringatan Hari Habitat Indonesia, Yogyakarta, 4 Oktober 2004.
- Soeprapto, H.R. Riyadi. 2002. *Interaksionisme Simbolik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Strongman, Luke, 2012, *Modern Nature, Essays in Environmental Communications*, Universal Publishers, Boca Raton, Florida, USA
- Sundar, Nandini, 2005, *The Construction and Destruction of Indigenous Knowledge in India's Joint Forest Management Programe*, dalam Roy Ellen, Peter Parkers, Alan Bicker, *Indigenous Environtmental Knowledge*
- Trenholm, Sarah & Arthur Jensen. 1992. *Interpersonal Communication*. Belmont, California: Wadsworth
- Tubbs, Stewart L and Sylvia Moss, 2008, *Human Communication, Principles and Contexts*, Mc Graw-Hill Publishing Company, USA.
- Vladetsceu, Stephen, 2014, *Communication Environment, Context/Situation/ Framework*, Journal of Sustainable Development Studies, Volume 6, No. 1, 2014, Infinity Press.
- Weber, Estelle ed., 2009, *Environmental Ethics, Sustainability and Education*, Inter Disciplinary Press, Oxford, United Kingdom
- Yenrizal, 2015, *Komunikasi Lingkungan Masyarakat Petani Pedesaan*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Bandung

2

SAATNYA KOMUNIKASI LINGKUNGAN

Peristiwa tahunan yang saat ini jadi agenda rutin di tanah air adalah bencana alam. Ada dua penyebab bencana, faktor internal serta faktor eksternal. Secara internal, berarti bencana yang berasal dari fenomena alam itu sendiri, kondisinya sulit dicegah dan dihindari. Secara eksternal adalah bencana yang disebabkan perilaku manusia ketika berinteraksi dengan alam. Faktor kedua ini penting dicermati, karena punya peluang untuk dihindari dan diantisipasi.

Fakta bencana tampak dari kondisi yang dialami belakangan. Ketika musim kemarau berbagai wilayah dilanda kekeringan. Kebakaran hutan, kabut asap dan kesulitan air jadi menu sehari-hari. Kendati sekarang kemarau sudah hampir lewat, namun di beberapa tempat seperti Kalimantan, Sumsel, Riau, Jambi, kabut asap masih terasa. Sementara saat musim hujan datang, ancaman banjir dan tanah longsor, siap menanti.

Sebuah liputan dari Tribun Jabar (21/09/11) menjelaskan beberapa fakta ancaman bencana di penghujung musim kemarau. Khusus untuk daerah Jawa Barat terdapat fakta-fakta yang penting dicermati. Dari 113 peristiwa tanah longsor di Indonesia tahun 2010, 57% terjadi di provinsi ini. Parahnya lagi, peristiwa tersebut terjadi

hampir di seluruh kabupaten/kota. Selain longsor, banjir juga penting diwaspadai.

Ini menegaskan Jawa Barat adalah daerah yang perlu perhatian khusus soal karakteristik alam. Apalagi ditambah kondisi curah hujan di wilayah ini tergolong tinggi yang memerlukan wilayah resapan yang luas dan kuat. Secara sederhana, curah hujan memiliki korelasi dengan rentannya terjadi peristiwa tanah longsor. Maka terlihat bahwa daerah yang rawan longsor adalah lokasi yang bertopografi perbukitan seperti Garut, Tasikmalaya, Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, Purwakarta, Kuningan, Sumedang, dan beberapa daerah lainnya. Umumnya pula itu adalah bukit-bukit yang sudah tidak/minim dengan pepohonan alias gundul.

Pada konteks inilah perlu dipahami bagaimana kuasa alam terhadap apa yang dimilikinya. Alam ada sebagai satu kesatuan antara manusia, hewan, tumbuhan, tanah, air, dan udara. Semua itu adalah ekosistem yang saling berkaitan. Apabila kemudian muncul istilah hukum alam, diartikan sebagai bentuk norma-norma yang berlaku atas "kesepakatan" antara semua unsur dalam ekosistem. Semua unsur dalam ekosistem dianggap sebagai komponen aktif, mampu merespon berbagai stimulus yang datang padanya.

Keaktifan unsur dalam ekosistem menandakan terjadinya interaksi antara semua makhluk. Ada proses komunikasi yang berlangsung sesuai kapasitas masing-masing. Kemampuan interaksi tergantung pada kemampuan logis dan rasio makhluk yang ada. Di antara semua unsur, manusia adalah makhluk yang paling aktif karena punya unsur akal. Manusia tidak sekedar mengandalkan intuisi, tapi ada proses pengolahan data yang membuatnya bisa menentukan bagaimana mesti berinteraksi.

Artinya, memandang lingkungan alam harusnya berada pada titik kesetaraan antara manusia dengan alam, bukan dominasi salah satu pihak, terutama manusia. Kiranya kesalahan dalam sudut pandang selama ini, berorientasi pada kepentingan pragmatis manusia atau dalam bahasa ilmu lingkungan disebut Antroposentrisme, berdampak pada rutinitas bencana. Antroposentrisme dengan ciri khas pada sisi instrumentalnya (Keraf, 2002), menciptakan manusia-manusia perambah hutan, manusia penggundul bukit, dan manusia penimbun rawa. Sisi kepentingan alam diabaikan. Hukum keseimbangan terganggu, alampun bereaksi kepada manusia, sebagai pertanda bahwa ia adalah ekosistem yang aktif.

Manusia hakekatnya harus mau belajar dari berbagai peristiwa yang terjadi serta memahami bahwa alam adalah komponen aktif. Berkomunikasi dengan lingkungan alam mutlak dikedepankan. Proses komunikasi yang sudah menyentuh level kosmologis (terkadang juga perlu metafisis), yaitu kesadaran posisi semua unsur di alam semesta. Komunikasi lingkungan dapat dimaknai sebagai proses interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar, proses saling memaknai, proses saling memberikan stimulus, dengan menempatkan diri pada level setara. Tentu saja tidak bisa ditarik pada garis linear, karena hakekatnya antara manusia dengan lingkungan terjadi proses dialogis dalam bahasanya masing-masing.

Alam cenderung memiliki karakteristik adaptasi yang kuat. Kemampuan adaptasi ini ditunjukkan dengan respon yang diberikan menyesuaikan dengan stimulus yang diterima. Dalam bahasa sederhana dikatakan, "alam akan senantiasa menyesuaikan diri dengan perlakuan yang datang padanya." Apabila tanah digunduli,

ia menjadi gembur, air tidak meresap, longsor ketika hujan. Alampun mengeluarkan energinya, dan energi ini bisa merespon dengan baik rangsangan-rangsangan yang menghampirinya. Ini pesan yang mesti bisa dimaknai oleh manusia.

Kelemahan dasar komunikasi lingkungan selama ini adalah pengabaian terhadap hal tersebut. Mengapa wilayah tertentu (seperti Garut, Cianjur, Puncak, dll) menjadi sangat rentan terhadap bencana longsor. Bukan karena topografi alam, tetapi orientasi manusia terhadap alam itu yang sudah keliru. Baik di tataran masyarakat maupun level kebijakan pemerintah. Banyak data yang menunjukkan hal tersebut, seperti di Bogor, dari tahun 2000-2008 sebanyak 74% hutan lindung telah beralih fungsi (DCK Kab. Bogor, 2011). Tak akan jauh beda juga dilihat di beberapa wilayah lain.

Sebenarnya, pranata-pranata lokal di masyarakat sudah mengenal dengan baik komunikasi manusia dengan lingkungan alam. Konsep kearifan lokal masyarakat adalah bukti bahwa instrumen tersebut pernah berjalan. Tetapi kuatnya terpaan sikap pragmatis dan orientasi Antroposentrisme, telah mengaburkan semua itu. Disinilah pentingnya melakukan reposisi lingkungan di mata manusia dalam konsep komunikasi lingkungan.

Reposisi tersebut bisa saja diwujudkan dalam kegiatan yang bersifat praktis. Tidak menggunduli perbukitan adalah komunikasi pada konteks keseimbangan curah hujan dan ketahanan tanah. Tidak mendirikan bangunan di lereng perbukitan yang berkemiringan ekstrem adalah bentuk interaksi dengan menekankan aspek kepentingan lingkungan yang lebih luas. Memberikan ruang-ruang kosong yang cukup antar bangunan adalah bentuk komunikasi yang mempertimbangkan keseimbangan

sirkulasi udara. Menjaga kelancaran saluran air dari tumpukan sampah adalah wujud komunikasi yang mempertimbangkan hakekat air sebagai komponen yang memerlukan ruang khusus.

Sulitkah melaksanakan itu? Tidak, karena sejak jaman para leluhur dulu, semua ini sudah dilakukan. Seperti kata bijak mereka, "jika tak bisa memperbaiki, tidak merusakpun jadilah". Konsep ini mungkin sudah terabaikan, atau bahkan hilang. Sekaranglah saatnya merevitalisasi kembali.

**) Tulisan ini pernah dimuat di Harian Tribun Jabar,
tanggal 28 September 2011*

3

MEMAKNAI LINGKUNGAN BUKANLAH BERNOSTALGIA

Bagi generasi yang lahir tahun 1975-an ke bawah, tentu masih ingat dengan berbagai situasi di era itu. Orang Sumsel yang tinggal di daerah Uluan, tentu akrab dengan gunung, bukit, lembah, sawah berjenjang, gemericik air sungai nan bening, serta anak-anak telanjang yang bermain lumpur di sawah. Bagi yang hidup di daerah liran, akan terkenang dengan hamparan rawa tertutupi pohon gelam dan belukar, rumah panggung yang dibawahnya kerap tergenang air pasang, suara kodok dari rawa pinggir sungai, serta getek-getek kecil yang berseliweran di antara rumah-rumah kayu. Tidak lupa, sebelum tidur biasanya bapak atau kakek dengan telaten melantunkan *Andai-andai* (dongeng) tentang para *Puyang*, sungai, hutan, dan tokoh-tokoh mistis dari negeri antah berantah.

Itu dulu, zaman yang tidak mungkin lagi akan terulang. Zaman dimana semuanya begitu asri, tak ada banjir, tanah longsor, kabut asap, dan berbagai petaka lingkungan. Era yang mungkin jika diceritakan kepada generasi sekarang, generasi yang lahir di atas 1990-an, dianggap sebagai negeri dongeng belaka.

Saat ini yang ada di depan mata adalah realitas yang serba kosmopolit dan segalanya dihargai atas nama materi dan hitungan untung rugi ala bisnis. Era dimana banjir dianggap hal lumrah dan merasa aneh jika air tidak masuk rumah di kala hujan, atau terheran-heran kenapa tidak ada kabut asap di masa kemarau. Merasa aneh pula jika melihat lebatnya buah duku tapi tidak dijual, merasa heran jika melihat rawa luas tapi tidak ditanami kelapa sawit. Kenyataan itu adalah dunia yang sebenarnya saat ini.

Apa yang terjadi sebenarnya, itulah pergeseran dan perubahan manusia dalam melihat alam sekitarnya. Perubahan yang sebenarnya pula tidak terjadi begitu saja. Semasa dulu segalanya terlihat asri dan sederhana, karena masyarakat sendiri tidak memiliki pembanding atau pemancing untuk merubah prilaku terhadap alam. Saat di awal 1990-an banyak perusahaan mulai beroperasi, terutama sektor perkebunan, mata itupun terbelalak dan terbuka. Gencarnya asupan informasi dari TV, radio, bahkan kemudian internet dan telepon selular, makin melorotkan pandangan tersebut. Alam bukan lagi sahabat sejati, tapi disitulah sumber materi, sumber kekayaan. Terbuktilah kemudian filosofis Cartesian dengan kata kunci Antropocentris menjadi acuan.

Memaknai alam, itulah kata penting. Kata yang bisa dikatakan penyebab malapetaka yang senantiasa dialami. Kata yang memiliki dua sisi pemaknaan berbeda, untuk alam dan manusia atukah untuk manusia semata. Kata inilah yang akan bermuara pada banyak aspek, mulai dari prilaku manusia, sampai pada kebijakan pemerintah. Terbayang saat tahun 2009 lalu, penambangan batu bara digencarkan sedemikian rupa, karena batubara dianggap sumber pendapatan dan sumber energi luar biasa. Teringat pula saat tahun 1990-an, perkebunan kelapa sawit menyebar ke berbagai

pelosok, menghabiskan ribuan kubik kayu bernilai tinggi, mengeringkan rawa-rawa gambut, karena sawit dianggap punya nilai ekonomis tinggi.

Memaknai alam, itulah filosofis Komunikasi Lingkungan. Antropolog klasik, AT Rambo, pernah berkata bahwa antara manusia dengan alam selalu berinteraksi menyalurkan materi, energi, dan informasi yang kemudian terwujud dalam berbagai tindakan yang terjadi. Gagasan sang Antropolog ini mengilhami pentingnya aspek komunikasi dalam persoalan lingkungan. Enaknya disebut dengan etnoekologi komunikasi, sebuah sudut pandang pemahaman tentang lingkungan yang berakar dari sudut pandang kesatuan manusia dengan alam. Lagi-lagi, inilah pemaknaan, hal paling dasar dalam berkomunikasi.

Menjadi jelas, mengapa di masa lalu, keharmonisan, keserasian itu begitu indah terjalin, karena ada sudut pandang pemaknaan yang seimbang tentang hak alam dan hak manusia. Sekarang, justru fenomena itu yang dirindukan, walau kecil kemungkinan akan terwujud. Sekaligus menyatakan bahwa etnoekologi komunikasi menjadi penting untuk diperkuat dan dijadikan landasan berpikir.

Persoalan lingkungan kemudian semakin menemukan momentumnya, menjadi sangat aktual, seolah-olah ini sejalan dengan ide klasik dari Malthus, makin banyak manusia, makin tinggi pula persoalan lingkungan. Logika sederhana bisa menerima ini. Banyaknya orang tentu banyak pula kebutuhan, terutama kebutuhan dasar. Darimana sumbernya? Dari alam. Eksploitasi dan eksplorasi, itulah yang terjadi. Sementara sisi perbaikan, pencegahan atau upaya konservasi sangat terlambat dan sangat minim.

Saat masalah lingkungan menemukan momentum, maka memutar balik pemaknaan terhadap lingkungan juga mendapat porsi terbesar, karena pangkalnya dari sini. Andai tak dilakukan itu, niscaya kegagalan saja yang akan terjadi. Tak ada niat baik atau tidak menjadikan isu lingkungan sebagai masalah bersama, adalah faktor pertama. Seakan masalah ini hanya urusan aktifis lingkungan, BNPB, Kementerian Lingkungan Hidup, dan segelintir jurnalis lingkungan atau akademisi lingkungan. Kedua, hukum lingkunganpun tak pula bergigi tajam, kerap kandas oleh manisnya konflik lingkungan, dan ketiga, yang terparah, cara pandang bahwa sumber pendapatan asli daerah dari lingkungan hidup masih mengental di para pemangku kebijakan.

Dimasa sekarang, memutar balik pemaknaan terhadap hakekat lingkungan sangat strategis dan krusial sekali. Inilah momentum dan peran besar komunikasi lingkungan. Berkomunikasi tentang dan dengan lingkungan bukanlah pekerjaan akademisi atau ilmuwan belaka, tapi semua elemen, karena seluruh unsur terlibat dalam aktifitas tersebut. Yang diperlukan adalah merancang dan mengawal gerakan pemaknaan ulang terhadap lingkungan, setidaknya, jadikanlah itu sebagai isu bersama terlebih dahulu. Mulailah dari sekarang, karena masalah lingkungan bukan masalah nanti, tapi saat ini.

Melakukan gerakan ini dengan harapan untuk masa depan, yang dalam bahasa lain sering pula disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*). Sederhananya, apa yang dikerjakan hari ini harus memikirkan kepentingan generasi 20-50 tahun kedepan. Dalam bahasa komunikasi, setidaknya ada 4 aspek terkait, kampanye lingkungan, advokasi lingkungan,

pendidikan lingkungan, dan penguatan sistem informasi tentang lingkungan.

Opini publik adalah capaian yang harus direbut. Itulah peran media massa, media kampanye, kelompok penekan (*pressure group*), NGO, akademisi, yang sebaiknya dibarengi dengan mengangkat aspek ini ke level isu kebijakan publik. Melalui kampanye, yang dibarengi dengan tindakan advokasi, maka kesadaran, pemberdayaan, perlindungan, dan termasuk pengawasan kegiatan lingkungan bisa lebih efektif. Kalangan pemodal besar yang banyak meraih untung dari eksploitasi lingkungan, bisa ditekan. Pemerintah yang selama ini cenderung tutup mata harus dibangun dengan kampanye yang gencar. Teknik propaganda, kampanye, penggalangan opini, yang dikenal dalam komunikasi bisa jadi alat utama.

Di sisi lain, kelompok masyarakat, generasi muda, dan unsur lain, termasuk aparatur pemerintah harus pula dipersiapkan. Pendidikan lingkungan yang berakar dari pemaknaan ulang terhadap posisi lingkungan, dijadikan agenda utama. Mengkomunikasikan ke semua pihak bahwa masalah lingkungan adalah masalah bersama. Tidak mesti di dalam kelas yang sangat formil, di tengah sawah, di pinggir sungai kadang jauh lebih efektif. Bukankah, "aku berbuat maka aku bisa" ketimbang "aku mendengar maka aku lupa".

Sejalan dengan semua itu, kemajuan teknologi informasi harus pula diikuti. Teknologi internet yang semakin canggih harusnya jadi modal besar. Sistem informasi lingkungan hidup, yang memberikan pencerahan pada semua pihak, sekaligus mekanisme tanggap bencana, akan mengikat semua itu dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Berpadulah komunikasi lingkungan itu dalam

sebuah sistem informasi LH yang berbasis pada pemaknaan posisi seimbang antara manusia dengan lingkungan.

Tentu saja mewujudkan itu bukanlah masalah sederhana, banyak tantangan dan hambatan akan terjadi. Apalagi ini bicara soal industri yang padat modal, soal masyarakat yang sudah tergeser pemahamannya, soal hak ekonomi dan hak hidup warga, soal tekanan global yang masih berorientasi keuntungan, termasuk soal paradigma pemerintah yang masih terbelit-belit dalam dilema ekonomi politik lingkungan.

Kajian komunikasi lingkungan sebenarnya tidak memusingkan soal itu. Ilmu yang terfokus pada pemaknaan manusia ini, punya banyak celah untuk menerobosnya. Terpenting sasaran awal adalah rebut opini publik, dengan sumber daya yang ada. Saat jalan sudah tersumbat, maka lubang kecillah yang bisa dimanfaatkan.

Membalikkan pemaknaan bukanlah berarti bernostalgia ke masa lalu, berkhayal tentang zaman yang sudah lewat, tetapi mengambil hal-hal penting yang masih berceceran, yang tersangkut di pondok-pondok tua di tengah kebun, atau di *bong-bong* (jamban) pinggir sungai, atau mungkin di *pance-pance* (pelataran bambu) masyarakat Uluan Sumsel. Nilai penting inilah yang didorong agar masuk jadi isu bersama dan selanjutnya ke level kebijakan publik, menjadi aturan bersama, memaksa siapapun untuk patuh. Kawalan dan kontrol dari media akan membantu sekali, disinilah tampak bahwa menyelesaikan masalah ini harus bersama-sama.

**) Tulisan ini sudah diterbitkan di www.mongabay.co.id,
tanggal 22 Desember 2016*

4

DARURAT MEMAKNAI ALAM

Selepas musim penghujan tahun ini, dalam beberapa waktu ke depan, ancaman kabut asap di musim kemarau sudah menghantui Palembang dan Sumsel secara keseluruhan. Inilah rutinitas yang sepertinya sejak beberapa tahun belakangan sudah jadi “proyek” rutin di kota ini.

Ada dua masalah pokok sebenarnya yang selalu menghampiri daerah ini, banjir dan kabut asap. Keduanya dapat dikatakan bukanlah bencana yang disebabkan oleh alam. Secara teoritis memang, kedua hal tersebut bersumber dari alam. Banjir berawal dari luapan air yang besar, tidak menemukan salurannya, kemudian menggenangi daerah-daerah yang dianggapnya rendah. Hukum alam sudah berkata seperti itu. Begitu juga dengan kabut asap, yang disebabkan oleh hutan, belukar, ataupun rumput-rumput yang terbakar. Hasil pembakaran akan menyebabkan asap, dan asap sesuai karakteristik yang dikandungnya, pasti akan membumbung ke udara dan memenuhi langit. Logika teoritis akan berbicara seperti itu.

Akan tetapi, alam tidak akan bereaksi dengan sendirinya. Reaksi alam cenderung statis sesuai stimulus yang datang padanya.

Pemberi stimulus dominan sudah bisa dipastikan adalah manusia yang hidup di lingkungan alam tersebut. Oleh karena itu, munculnya reaksi alam seperti banjir dan kabut asap, jelas adalah akibat dari perilaku manusia. Ada hukum keseimbangan yang terganggu sehingga sebaran materi dan energi dari alam menjadi sesuatu yang negatif bagi kehidupan manusia. Inilah yang terjadi pada wilayah Palembang saat ini, dan Sumatera Selatan secara lebih luas lagi.

Sebagai catatan saja, suhu udara di Palembang di saat musim kemarau dan maraknya kabut asap, bisa mencapai 35⁰C. Ini sudah bisa dikatakan sangat ekstrem dan berbahaya untuk manusia. Data dari Kementerian LH RI menyebutkan bahwa secara keseluruhan suhu udara ditengarai mengalami kenaikan setiap tahun rata-rata 0,65⁰C. Efeknya kemudian berantai dan berpengaruh langsung pada kehidupan manusia, seperti suhu panas, kekeringan, kebakaran, terganggunya musim tanam, meningkatnya batas permukaan air laut, termasuk munculnya berbagai penyakit.

Tidak heran banyak muncul kegiatan-kegiatan kampanye dan aktifitas yang menyerukan agar manusia sadar bahwa akibat dari perilakunya adalah, segala persoalan terkait dengan lingkungan terjadi sekarang. Mulai dari aktifis LSM, pemerintah, dan anggota kelompok masyarakat lain, sudah mulai membicarakan dan bertindak nyata terhadap hal ini. Sayangnya sampai sekarang, dari sekian banyak kegiatan peduli lingkungan yang dilakukan, terutama oleh pemerintah, yang namanya banjir dan kabut asap semakin menjadi-jadi, sementara suhu panas semakin menyengat.

Wilayah Sumatera Selatan dan Palembang khususnya, mungkin bisa sedikit bersyukur di banding daerah lain di Indonesia, terutama daerah yang rawan bencana alam seperti gempa bumi

atau Tsunami. Sumsel hampir tidak memiliki potensi bencana yang bersifat massif tersebut. Tetapi, tetap saja realitas cuaca dan pergerakan musim di provinsi ini sudah dalam taraf mengkhawatirkan. Saya malah mengatakannya darurat lingkungan, situasi yang membutuhkan solusi saat ini juga, bukan besok atau tahun depan.

Perubahan drastis kondisi musim di Sumsel, sangat terkait sekali dengan kondisi pembangunan yang dilakukan, baik yang dicanangkan pemerintah, maupun aktifitas masyarakat itu sendiri. Kasat mata saja kita sudah bisa lihat bagaimana perubahan peruntukan lahan di sebagian daerah di Palembang, terutama penimbunan rawa, pembangunan ruko, pembangunan mall, pusat kegiatan olahraga, dan sebagainya. Hampir semua kegiatan tersebut melakukan perubahan peruntukan lahan, menghilangkan tempat resapan air, menebang pohon dan seterusnya. Artinya, persoalan lingkungan hidup mau tidak mau bermula dari aktifitas manusia itu sendiri, terutama aktifitas pembangunan.

Pembangunan adalah soal kemajuan, soal kemodernan. Untuk mencapai level modern, dituntutlah berbagai infrastruktur yang menjadi simbol kemajuan tersebut. Disinilah industrialisasi menjadi pemicunya. Kota-kota besar akan menjadi sasaran utama, yang secara pasti akan berentet pada komunitas lain. Ini pernah ditengarai oleh Soemarwoto (2004) bahwa masalah industrialisasi adalah masalah terbesar yang kemudian menciptakan dominasi baru dalam menguasai lingkungan.

Dominasi utama ini, sangat rentan sekali masuk dalam wilayah kebijakan, karena disitulah pangkal mula pembangunan diarahkan. Menjaga atau justru merusak lingkungan terlihat dari aplikasi

kebijakan yang dilakukan. Kita bisa lihat bagaimana realitas pembangunan di Sumsel, yang didominasi oleh dorongan besar untuk mengeksploitasi SDA, seperti lahan pertanian untuk perkebunan sawit, tambang batu bara, pembangunan mall, ruko, dan sebagainya.

Pada satu sisi, ini mungkin berefek positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan peluang kerja masyarakat. Tetapi, apakah peningkatan pendapatan tersebut sebanding dengan resiko lingkungan yang ditimbulkan? Ini yang jadi masalah besar dan sampai sekarang tak jua terpecahkan.

Dalam hal ini, saya melihat masalah mendasar adalah minimnya sudut pandang kesadaran lingkungan, baik di kalangan pembuat kebijakan atau mungkin juga di kalangan masyarakat itu sendiri. Konsep atau gagasan darurat lingkungan tidak mampu masuk sebagai masalah bersama, padahal efeknya sudah bisa dirasakan oleh semua pihak. Isu lingkungan masih sebatas isu yang dilontarkan oleh aktifis lingkungan hidup, sebatas sudut pandang dari Badan Lingkungan Hidup, atau hanya sekedar koar-koar akademisi di media massa. Internalisasi nilai-nilai kesadaran lingkungan tidak pernah terjadi.

Oleh karena itu, masalah lingkungan terkait sekali dengan masalah komunikasi lingkungan. Sudah saatnya, kendati juga sudah terlambat, soal lingkungan didorong menjadi musuh bersama yang harus diatasi bersama pula. Propaganda, kampanye lingkungan harus terus dilakukan, dan itu tidak bersifat parsial, namun menjadi kesatuan dalam semua aktifitas. Termasuk dalam program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Instansi pemerintah terkait boleh saja meluncurkan program eksplorasi batu bara,

perluasan kebun kelapa sawit, pembangunan mall, tetapi harus didasarkan pada pengendalian lingkungan yang ketat. Perlu kesatuan visi soal ini, yang diawali oleh kepemimpinan yang kuat dan tegas serta berpihak pada masalah lingkungan.

Komunikasi lingkungan sangat penting dalam konteks menyelamatkan lingkungan hidup dengan segala ekosistemnya. Titik tekannya bukan sekedar mengkomunikasikan ke semua pihak agar sadar lingkungan, tetapi menekankan pada kemampuan membangun kesadaran bahwa manusia hakekatnya berkomunikasi dengan lingkungan. Lingkungan bukan sesuatu yang pasif, tapi mampu merespon apa yang dilakukan manusia. Karenanya harus dimulai dengan sebuah gagasan yang memandang bahwa lingkungan adalah hidup dan bereaksi.

Gagasan ini harus masuk ke level pemerintah, karena disitulah aktifitas pembangunan bermula. Atas dasar itu, seharusnya semua kebijakan pemerintah didasarkan hitung-hitungan ketat tentang dampak lingkungan yang terjadi, dan itu tidak boleh dianggap main-main. Pemerintah harus menjadi komunikator yang kuat dalam persoalan lingkungan ini. Tidak cukup hanya dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) saja, tapi menyeluruh ke semua bagian dan mekanisme kerja. Selama ini, semua aktifitas perusahaan besar, rata-rata sudah punya AMDAL, tapi persoalan lingkungan tidak juga selesai. Artinya, ada sisi lain yang selama ini terabaikan, yaitu sudut pandang pemimpin tentang apa lingkungan hidup itu sebenarnya.

Kita memimpikan pemimpin yang mampu memberikan torehan positif dalam soal lingkungan ini. Pemimpin yang tidak mendasarkan PAD dari eksploitasi alam semata, pemimpin yang

tidak sekedar beretorika tentang masa depan Sumsel yang lebih mumpuni, atau pemimpin yang terbirit-birit ketika masalah lingkungan sudah terjadi.

Mungkin belum ada di Indonesia pemimpin seperti itu. Belum ada juga kepala daerah yang mencatat prestasi sebagai orang yang mampu meluncurkan kebijakan eksploitasi SDA yang ramah lingkungan. Mungkin juga belum ada juga kepala daerah yang mencatatkan diri sebagai sosok pendorong modernisasi yang peduli lingkungan. Saat ini, kita berharap ada pemimpin yang menorehkan capaian seperti ini yang patut kita angkat sebagai "manusia setengah dewa" dari Sumsel, bukan manusia yang dicitrakan seperti Dewa. Jika tidak, maka selamanya akan semakin banyak diwariskan kerusakan-kerusakan dan masalah-masalah kepada generasi-generasi mendatang, dan merekapun mewariskan pula pada generasi berikutnya.

**) Tulisan ini sudah dimuat di HU Sriwijaya Post, 18 Mei 2015*

5

KEMARAU dan KOMUNIKASI LINGKUNGAN

Tiap tahun, kemarau pasti datang. Ini adalah ritme rutin dalam sebuah wilayah tropis. Setelah diterpa musim penghujan, sekarang kekeringan muncul, kabut asap, dan kebakaran terjadi di berbagai tempat. Masyarakat, pemerintah, semua unsur mulai panik. Padahal, sebenarnya ini adalah rutinitas biasa. Hanya kualitas dan masa terjadinya saja yang berbeda. Dulu, kemarau mungkin tidak terlalu “menyengat” seperti sekarang, waktunyapun tidak terlalu lama. Sekarang, suhu udara terasa begitu menusuk kulit, terjadinyapun sangat panjang.

Sejak sekitar 10 tahun terakhir, eksekutif kemarau yang paling dirasakan adalah kebakaran hutan dan terjadinya kabut asap. Kekeringan sumber air juga jadi dampak bawaan. Ini tidak terjadi bukan satu atau dua tahun belakangan, tapi lebih dari 10 tahun terakhir. Disinyalir, dari berbagai pemberitaan, ini disebabkan oleh proses pembakaran lahan oleh masyarakat ataupun perusahaan perkebunan tertentu. Bisa juga ini karena memang terbakar secara tidak sengaja, dan kemudian merembet kemana-mana.

Apapun itu, yang jelas terjadinya kemarau dan kabut asap, adalah karena ulah manusia, baik disengaja atau tidak disengaja.

Mau mengakui atau tidak, tidak akan terjadi perubahan iklim dan asap yang begitu tebal tanpa campur tangan manusia. Sampai disini, pertanyaan penting yang kemudian bisa diajukan adalah, sudah sadarkah manusia terhadap ulah prilakunya sendiri? Jika tidak, maka tetaplah bersabar "menikmati" apa yang ada, sambil terus berharap dan berdoa pada Tuhan, semoga kemarau cepat berlalu. Walaupun kita juga yakin bahwa doa itu sulit untuk dikabulkan Tuhan.

Memahami alam sebenarnya hanya butuh logika sederhana saja. Alam ibaratkan konsep dalam teori sistem, dimana manusia, hutan, sungai, udara, binatang, adalah sebuah kumpulan dari subsistem, yang kemudian membentuk sebuah ekosistem tersendiri. Semua adalah satu kesatuan, saling berkaitan. Alam telah memiliki perangkat hukum keseimbangan yang saling berkaitan. Kalau hujan turun dengan deras, maka akan terjadi limpahan air yang besar. Kalau air melimpah, dan tidak disiapkan tempat penampungannya, banjir akan terjadi. Sebaliknya, jika hutan dibabat, tempat genangan air ditimbun, suhu udara akan meningkat. Ketika suhu udara meningkat, gumpalan awan menjadi tipis, cahaya mataharipun tidak lagi memiliki filter untuk sampai ke bumi. Akibatnya panas matahari terasa demikian kuat.

Dari logika sederhana di atas, jelas bahwa ada prinsip hukum keseimbangan yang terganggu. Efek dari gangguan itulah yang terasa sekarang. Siapa yang mengganggu hukum keseimbangan tersebut? Manusia, tak ada kambing hitam lainnya. Karena itu, solusinya adalah dari manusia itu sendiri.

Kalau kita analisa dari perspektif ilmu komunikasi, tekanan pada komunikasi lingkunganlah yang terabaikan selama ini. Komunikasi lingkungan berkaitan dengan etika lingkungan.

Terdapat pelanggaran prinsip komunikasi lingkungan, dan kemudian melakukan pula pengingkaran terhadap etika lingkungan.

Komunikasi lingkungan bukan semata ingin mengatakan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Memang berkaitan erat, namun fokusnya lebih pada proses komunikasi antar manusia mengenai kondisi lingkungannya. Saya contohkan, ketika terjadi proses pembakaran lahan dalam membuka kebun oleh masyarakat sekarang ini, darimanakah mereka mendapatkan informasi tentang itu? Tentu saja, dari komunikasinya dengan orang lain. Dulunya, ketika zaman nenek moyang, mungkin proses komunikasi yang terjadi masih mengarahkan pada larangan agar hutan dijaga. Sekarang mungkin sudah beralih pada pemanfaatan sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia semata.

Dulu, kalau anda berada di beberapa wilayah pedesaan Sumsel, seperti daerah Lahat, masih ditemukan kata-kata "kalau dide pacak ngilo'i, njage jadilah" (kalau tidak bisa memperbaiki, menjagapun jadilah). Sekarang, hampir tak terdengar lagi, kecuali sebatas tulisan di tugu selamat datang yang terletak di pinggir jalan. Artinya, pewarisan kata-kata yang sifatnya menjaga lingkungan sekitar, tidak lagi pernah dikomunikasikan. Kalaupun dikomunikasikan ke anak-anak dan generasi berikutnya, bunyinya adalah "disana tanah kita, carilah modal, dan bukalah kebun karet atau kebun kelapa sawit". Cara praktis membuka lahan adalah dengan membakar, dan waktu membakar yang terbaik adalah di musim kemarau. Jadi, kloplah sudah apa yang terjadi sekarang ini.

Komunikasi lingkungan sangat perlu diperluas dan didalami saat ini, namun bukan semata bagaimana memahami makna alam saja, lebih fokus lagi adalah pada bagaimana pesan-pesan moral tentang alam, bencana yang sudah terjadi, kerugian yang pernah dialami, diwariskan dan disampaikan ke generasi berikutnya.

Sayangnya ini sudah sangat dilupakan. Alam hanya dipandang dari sudut pandang nilai ekonomis semata. Alam hanya dilihat dari aspek keuntungan materi saat itu saja. Baik masyarakat, pemerintah, pengusaha, semua berkelindan menjadi satu.

Ada sebuah seloroh yang sangat menyindir karakteristik orang Indonesia, termasuk Sumsel. Orang Indonesia ini (baik pemerintah atau masyarakat) itu paling senang melarang dan sekaligus melanggar. Ketika terjadi satu masalah, biasanya selalu diikuti dengan larangan (aturan) agar tidak dilanggar lagi. Sebaliknya yang terjadi justru pelanggaran semakin banyak. Contoh gampangnya, dilarang mengemudi kendaraan sambil menggunakan telepon seluler. Hari ini dibuat larangan, hari itu juga banyak yang melanggar. Dilarang melakukan korupsi, faktanya semakin banyak yang korupsi. Dilarang membakar hutan, kenyataannya semakin banyak titik api yang terjadi. Itulah realitas di negara ini.

Menurut saya mengapa itu terjadi, karena muatan aturan yang dibuat hanya menekankan pada pelarangan, tidak pada upaya mengajak orang untuk tidak melanggar. Upaya untuk tidak melanggar inilah yang dimaknai sebagai aspek komunikasi. Ini juga yang selama ini diabaikan. Saya pikir tak akan efektif pemerintah capek-capek membuat larangan membakar hutan, menempatkan petugas menjaga hutan, menangkapi masyarakat, semua tidak akan bermanfaat secara besar. Kalaupun ada hasil, hanya sesaat. Justru kerusakan semakin parah.

Oleh karenanya, mulai sekarang ada baiknya konsep komunikasi lingkungan digalakkan. Komunikasi yang menempatkan keutuhan lingkungan bersama sebagai satu kesatuan. Komunikasi ini bisa dimulai di warung-warung kopi, di terminal-terminal, di atas perahu, di dalam rumah, di kebun-kebun, termasuk di dalam kantor pemerintah. Wujudnya nanti adalah kesadaran bersama dari

seluruh unsur bahwa manusia bergantung dari lingkungan. Dalam waktu singkat bisa muncul kelompok-kelompok sadar alam, atau berbagai kelompok lain. Merekalah nantinya yang akan menjaga alamnya, menjaga hutannya, menjaga kebunnya. Tak perlu pemerintah repot-repot mengirimkan petugas seperti Tagana ke hutan-hutan, masyarakat sebenarnya bisa melakukan itu, namun itu tak pernah dibiasakan lagi.

Seorang Antropolog pernah berujar ke penulis, dalam sebuah diskusi. Apakah dulunya, ketika zaman nenak moyang, masyarakat tidak pernah membakar lahan? Tentu saja pernah, karena itu cara yang efektif. Cuma bedanya, kalau dulu orang membakar lahan untuk membuka lahan seluas satu hektar, sekarang untuk puluhan bahkan ratusan hektar. Dulu orang membakar lahan dengan mempersiapkan penjagaan ketat agar api tidak kemana-mana, sekarang setelah dibakar lahan ditinggalkan karena takut dikejar aparat keamanan. Akibatnya kebakaran meluas kemana-mana. Itulah faktanya dan solusinya ada pada manusia di sekitarnya.

6

HARI BUMI, MOMENTUM MEMAKNAI ALAM

Tanggal 22 April ini diperingati diseluruh dunia sebagai Hari Bumi (*earth day*). Gagasan yang awalnya bermula dari seorang ilmuwan dan praktisi lingkungan di AS, Gaylord Nelson, 1970 silam. Sejak gerakan jutaan orang turun ke jalan kala itu, sampai sekarang momentum bersejarah itu diperingati sebagai hari khusus mengingat keberadaan bumi.

Hal terpenting dari peringatan hari bumi yang berlanjut ke tahun-tahun berikutnya hingga sekarang adalah, membangun kesadaran semua pihak untuk senantiasa menjaga bumi dengan segala kekayaan didalamnya, untuk selalu diwariskan pada generasi-generasi berikutnya, para anak cucu di generasi mendatang. Gagasan in berkelindan dan berkaitan dengan berbagai aksi menjaga lingkungan hidup, baik oleh kalangan masyarakat, LSM, pemerintah, perguruan tinggi, dan unsur lainnya.

Apa yang dilakukan Nelson dulu itu, sebenarnya bisa kita katakan sebagai gagasan untuk melakukan gerakan bersama secara massif di seluruh dunia. Tentu saja, walau tidak pada 22 April, gerakan dan kesadaran mencintai bumi, harus senantiasa dilakukan.

Momentumlah yang diambil oleh Nelson, untuk mengingatkan seluruh masyarakat dimanapun berada.

Sumatera Selatan sendiri adalah bagian dari bumi ini, tercakup dalam sebuah sistem kehidupan yang tidak bisa dilepaskan pengaruhnya atau dipengaruhi pihak lain. Oleh karena itu, kerusakan bumi yang terjadi di Sumsel, hakekatnya juga adalah kerusakan yang mempengaruhi belahan bumi lainnya. Sebelum sampai ke belahan bumi lain, maka bumi Sumsel sendiri yang akan merasakan dampaknya pertama sekali.

Atas dasar itu, bisa dilihat bagaimana dinamika bumi di Sumsel ini sendiri. Ini bisa dimulai dengan sebuah pertanyaan, bagaimanakah perlakuan manusia yang hidup di Sumsel ini terhadap bumi yang didiaminya? Apakah perlakuan itu memberikan efek positif bagi bumi ini, ataukah justru lebih dominan merusak tatanan bumi itu sendiri?

Pertanyaan di atas terfokus pada manusia, walau sejatinya isi bumi bukan hanya manusia. Tetapi, melihat pada sejarah ilmu pengetahuan dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan manusia, cenderung mengambil titik sentral dari sudut pandang manusia. Ini tidak berjalan demikian saja, gagasan filsafat dari Cartesian yang terkenal dengan ucapannya "aku berpikir maka aku ada" adalah permulaan yang kemudian diadopsi banyak pihak. Bumi adalah untuk manusia, sepanjang mendatangkan keuntungan pada manusia, maka bumi bisa diperlakukan dalam bentuk apa saja. Kaum etika lingkungan menyebut ini dengan antroposentris. Paham yang kemudian nyata-nyata merusak keseluruhan ekosistem yang ada di bumi.

Jika ditilik lebih jauh lagi, jauh sebelum Cartes mengemukakan gagasannya, sebenarnya para leluhur, nenek moyang, para *puyang*, sudah sedari awal menyadari kesatuan hubungan manusia dengan bumi ini. Sebuah ikatan yang saling mempengaruhi dan tidak bisa dipisahkan. Manusia bisa memperlakukan bumi, sebaliknya bumi ini juga punya sikap terhadap manusia. Ada hubungan simbolik yang kerap kali, saat ini, terlupakan. Padahal, para nenek moyang, termasuk di Sumsel ini, sudah menggariskan berbagai tata aturan yang intinya menjaga keutuhan pola hubungan yang terjadi.

Sebagai salah satu contoh, kenapa masyarakat Semende Darat Ulu dan Tengah di Kabupaten Muara Enim, sampai saat ini tetap melaksanakan sawah dengan jenis padi tinggi yang berusia 8 bulan (1 x panen setahun)? Apakah itu karena mereka yang tidak mau berubah? Penjelasan ilmiah bisa menjelaskan hal tersebut. Ternyata inilah hasil interaksi atau hasil pemaknaan simbolik para *puyang* terhadap bumi, lingkungan di sekitar mereka. Jenis padi tinggi punya ciri khas kemampuan menyerap sinar matahari yang banyak dan menyimpannya, yang berbeda dengan padi rendah yang berusia pendek. Untuk wilayah Semende yang berada di 1.040-1.400 dpl, jelas sinar matahari sangat sedikit, karena itu perlu tanaman yang mampu menyimpan sinar matahari. Padi pendek tak mampu melakukan itu.

Banyak daerah lain di Sumsel yang memiliki warisan para *puyang*, yang menunjukkan kemampuan memperlakukan bumi sebagai satu kesatuan dengan bumi. Para Sosiolog dan Antropolog menyebut ini dengan kearifan lokal, tapi saya lebih ingin spesifik lagi dengan mengatakan itulah bentuk komunikasi lingkungan masyarakat lokal di Sumsel.

Selama sekian waktu, nilai-nilai kebersamaan dengan bumi ini, terus diwariskan, dikomunikasikan ke generasi-generasi berikutnya. Sampai beberapa waktu masih bisa bertahan. Sayangnya, gelombang modernisasi kemudian menggerus itu. Akhirnya, mekanisme dan pola komunikasi yang berangkat dari masyarakat tutur, berangsur-angsur bergerak ke masyarakat industri yang mendahulukan aspek materi ketimbang substansi. Realitas inilah yang dialami sekarang, hampir di semua lapisan dan kelompok yang ada.

Tidak hanya unsur masyarakat lokal yang kemudian berubah, tapi kebijakan pemerintahpun ikut mendorong hal itu untuk semakin kuat dilakukan. Titik antroposentris, memandang lingkungan dari sisi kepentingan manusia sendiri, menjadi landasan kebijakan pembangunan. Tak usah heran jika eksploitasi batu bara dilakukan besar-besaran, dengan alasan penting untuk sumber energi kehidupan manusia. Pembangunan kebun kelapa sawit diperluas, lagi-lagi dengan alasan kebutuhan manusia. Lantas dimana kepentingan lingkungan atau bumi itu sendiri? Ia hanya jadi diskusi kecil dalam pembuatan kebijakan, atau sekedar muncul dalam dokumen AMDAL.

Momentum hari bumi saat ini, semestinya bisa mendatangkan sedikit kesadaran bersama, bahwa bumi ini bukan hanya milik manusia zaman sekarang. Bumi adalah milik generasi masa datang sebagai pewaris yang juga akan meneruskan lagi. Hari bumi hanyalah momentum, yang semestinya terus dicanangkan dan terus disuarakan, sehingga melekat dalam aplikasi sehari-hari. Tak ada gunanya satu hari saja memperingati hari bumi, sementara besok geliat tambang batu bara, pembakaran hutan, *illegal logging*,

penimbunan rawa-rawa, pembuangan limbah beracun secara sembarangan, kembali menggelora.

Tanggung jawab memelihara bumi adalah tanggung jawab bersama. Hal ini kemudian dibebankan kepada pemerintah selaku pihak yang didaulat untuk bisa mengawasi dan melaksanakan pembangunan yang bertanggungjawab terhadap keselamatan bumi. Andaikan ada oknum masyarakat yang bertindak merusak tatanan yang ada, maka semestinya pemerintah harus bertindak, karena dari konstitusi saja, pemerintah sudah diberikan kuasa untuk itu. Seandainya pemerintah tidak bertindak, atau tidak mampu bertindak, maka selorohan dari teman-teman aktifis penggiat lingkungan mungkin ada benarnya, bahwa "kalau bukan penyelesaian masalah, jangan-jangan justru si pembuat masalah". Semoga kesadaran itu muncul dalam memaknai bumi pada posisi yang sebenarnya. Selamat Hari Bumi.

**) Tulisan ini sudah dipublikasikan di HU Berita Pagi, 22 April 2015*

7

SENSITIVITAS KASUS LINGKUNGAN, *Berkaca pada Kasus PT. BMH*

Kiranya tak ada yang bisa membantah bahwa persoalan lingkungan hidup (LH) sudah berada di titik terendah kehidupan manusia saat ini, khususnya di Sumatera Selatan. Titik terendah artinya, sudah ada di level sangat berbahaya dan tak bisa dipandang remeh. Kasus-kasus yang terjadi tidak lagi pada level satu orang, satu kampung atau satu wilayah saja, tapi sudah mengganggu satu provinsi, bahkan lintas negara. Entah itu Presiden, Gubernur, Bupati, Pangdam, Kapolda, Profesor, Dokter, ataupun masyarakat biasa, ikut dalam penderitaannya. Itulah kabut asap yang dirasakan di tahun 2014 dan berlanjut ke 2015 lalu. Penyebabnya satu, adanya lahan luas yang terbakar, dan asapnya menyebar kemana-mana.

Oleh karena itu, menjadi sangat wajar saja ketika beberapa hari lalu (30 Desember 2015) majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang membebaskan PT Bumi Mekar Hijau (BMH) dari semua tuntutan tim kuasa hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI terhadap tuduhan pembakaran lahan, publik menjadi kecewa dan marah. Website PN Palembang diretas, Hakim

Parlas Nababan di*bully* habis-habisan. Dikatakan wajar kecewa, karena masalah asap sudah jadi masalah bersama, dan sudah masuk dalam kebenaran logika publik bahwa asap adalah bahaya. Karenanya siapapun yang diduga sebagai pembakar lahan, apalagi perusahaan, harus dihukum. Itu wujud kekecewaan publik.

Satu hal yang selalu jadi kunci dalam persoalan hukum di pengadilan, adalah pembuktian di persidangan. Seberapa kuat fakta-fakta dimunculkan, dan seberapa kuat kemampuan para pengacara dan penuntut hukum untuk bertarung, itulah yang menjadi dasar keputusan hakim. Ini idealnya, bahwa di luar itu ada faktor-faktor X lainnya, sulit untuk dijadikan alasan hukum, kecuali memang ada pembuktian terhadap hal tersebut.

Keputusan hakim harus dihormati, kalau tidak puas, majulah ke tahap berikutnya, banding. Itulah yang akan terjadi. Karena itu patut kita berikan beberapa catatan, baik dari sisi penggugat maupun logika hakim dalam memberikan keputusan. Semua ini coba dibingkai dari kacamata masyarakat yang melihat kasus tersebut, masyarakat yang selama ini menderita oleh kabut asap. Dalam kasus ini, penggugat (KLHK), katakanlah mewakili aspirasi jutaan manusia yang terkena dampak kabut asap selama sekian waktu. Kekuatan pihak KLHK punya korelasi dengan harapan masyarakat banyak.

Pertama, tentu saja soal materi gugatan, karena disinilah titik awalnya. Pertanyaan penting adalah, seberapa kuat argumen hukum yang diberikan? Ini menjadi dasar utama yang menunjukkan kekuatan dan keseriusan KLHK dalam mengajukan tuntutan hukum. Dikhawatirkan, kelemahan pada wilayah ini akan menjadi amunisi bagi tim kuasa hukum PT BMH. Pada materi gugatan, kelemahan ini

sudah terlihat, seperti kriteria untuk menyebutkan fakta terjadinya kebakaran lahan. Bagian ini jelas memerlukan rincian yang detail termasuk areal, luasan, sumber api, efek, dan sebaran. Begitu pula dengan klaim bahwa terjadi kerusakan lahan akibat pembiaran yang mencapai 20.000 Ha. Ini tentu saja memerlukan rincian yang jelas lengkap dengan letak pastinya. Membaca pada materi gugatan yang diajukan, belum terlihat secara jelas aspek ini, setidaknya pada beberapa aspek masih bisa diperdebatkan.

Dalam salinan putusan No. 24/Pdt.G/2015/PN.Plg, harus diakui banyak gugatan yang diajukan, kemudian terbantahkan oleh tergugat, dan itu kemudian menjadi dasar bagi majelis hakim. Ini mau tidak mau mengharuskan kita untuk berkaca bahwa menggugat kasus LH memerlukan energi yang besar, kualitas gugatan yang kuat, dan tim yang solid.

Kedua, masalah LH, apalagi masalah kebakaran lahan dan kabut asap adalah masalah yang menimpa semua orang, terutama di Sumsel. Tahun 2014 dan tahun 2015, dan bahkan beberapa tahun sebelumnya, masyarakat sudah mengalami itu. Untuk itu, dukungan masyarakat terhadap semua kasus pelanggaran LH harus kuat. Apalagi, persoalan LH yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang memiliki aspek permodalan yang kuat, maka partisipasi dari masyarakat sangat dipentingkan. Terhadap kasus BMH ini, keterlibatan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil, khususnya di Sumsel, boleh dikatakan masih minim. Ini perlu jadi catatan penting, sehingga masukan dan saran dari berbagai pihak akan semakin memperkuat posisi ataupun secara psikologis. Perlu kiranya penggalangan opini publik, minimal untuk memberikan dukungan moril dengan dasar keadilan dan kemaslahatan bersama. Soal siapa

yang menang dan kalah, tentu hukum juga yang akan menjawabnya.

Ketiga, bagi masyarakat Sumsel dan juga masyarakat lain yang pernah terpapar kabut asap, pedihnya asap dan terganggunya kesehatan, jelas adalah soal krusial. Andai ditanya ke warga Sumsel, apakah membakar lahan yang menyebabkan kabut asap adalah merusak lingkungan atau tidak, saya yakin jawabannya setuju. Hal inipun sudah tercantum pula dalam ketentuan hukum, terutama di UU No. 32/2009 pada ketentuan umumnya, yang berbunyi kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ada semacam pertautan antara kebenaran logika publik dengan kebenaran yang kemudian diatur dalam undang-undang, yang kiranya tak perlu diperdebatkan lagi. Karena itu, menjadi aneh ketika ada logika hakim yang mengatakan bahwa kebakaran lahan tidak ada indikasi bahwa tanah telah rusak, lahan masih berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya sebagai lahan Hutan Tanaman Industri, diatas bekas lahan yang terbakar tersebut tanaman akasia dapat tumbuh kembali secara baik (hal 114 pada Putusan No. 24.Pdt.G/2015/PN.Plg). Dengan kata lain, tidak merusak lingkungan. Logika yang bertentangan dengan logika publik, undang-undang, dan saya yakin logika pribadi si hakim tersebut, karena sang hakimpun pernah merasakan pedihnya kabut asap.

Masalahnya disini, dalam materi gugatan dan tuntutan tidak ada menyebutkan soal kabut asap yang ditimbulkan. Yang dimunculkan justru soal kerusakan lahan. Agaknya dari sini juga

mengapa logika hakim menjadi seperti itu. Ini menjadi masalah yang harus dijadikan catatan penting bagi semua pihak.

Mungkin memang betul PT BMH tidak terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan (dalam versi hakim), tetapi tetap saja jika logika di atas terus dipakai, ia akan memberikan preseden buruk bagi penegakan kasus-kasus lingkungan hidup di masa datang. Ada konsep penting dalam masalah LH yang membuatnya berbeda dengan kasus lain, yaitu sustainability/keberlanjutan. Pada UU 32/2009 ini dijadikan asas yang dituliskan sebagai pelestarian dan keberlanjutan. Inti penting dari makna keberlanjutan ini adalah, bumi ini bukan hanya milik manusia hari ini, tapi diwariskan pada generasi-generasi berikutnya. Karena itu, logika dalam melihat masalah LH juga harusnya adalah logika yang berkelanjutan, bukan logika sempit dan jangka pendek.

Keempat, melihat kasus LH, tidaklah bisa secara parsial. LH adalah sebuah ekosistem yang memiliki berbagai unsur didalamnya, bersifat saling terkait. Ada unsur alam secara fisik, ada unsur flora dan fauna, dan ada manusia yang hidup didalamnya. Semua ini adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang-orang tua kita sejak dulu sudah berkata, "tidak ada asap kalau tidak ada api", artinya semua hal itu saling berhubungan. Kebakaran lahan memang terhubung langsung ke tanah, tapi ia juga terhubung ke udara, cuaca, hutan, hewan, dan termasuk manusia. Dalam perspektif komunikasi lingkungan, ini disebut sebagai sebuah kesatuan hidup semua unsur dalam lingkungan alam. Rusaknya salah satu unsur, mempengaruhi banyak unsur lainnya, bukan hanya satu.

Keempat, kita berharap keputusan pengadilan yang membebaskan PT BMH dari tuntutan, tidak akan semakin memperparah kerusakan lahan dan kebakaran hutan di Sumsel dan di daerah lain. Patut kita berkaca dari kasus Budi Gunawan yang memenangkan pra peradilan dengan KPK beberapa waktu lalu, dimana ini kemudian memicu munculnya praperadilan-praperadilan lainnya. Semoga untuk kasus kebakaran dan kabut asap ini, tidak akan terjadi kasus serupa. Andaipun itu terjadi, maka lembaga-lembaga LH harus semakin memperkuat diri, memperkuat argumen, dan mampu mematahkan logika-logika pendek dalam pengambilan keputusan. Saat ini kita sama-sama menunggu proses banding yang akan diajukan KLHK. Kita berharap, semua kelemahan yang ada akan diatasi, dan unsur-unsur lain di masyarakat ikut dilibatkan, agar KLHK tidak seperti jalan sendiri, minimal ada yang menemani dan tentu saja ikut mengawasi.

**) Tulisan ini sudah pernah dimuat di www.mongabay.co.id tanggal
13 Januari 2016*

8

BAMBU dan MAKNA LINGKUNGAN

Saat masih kanak-kanak dulu, sekitar tahun 1980-an, saya dan teman-teman paling suka main bedil-bedilan kecil dari buluh cina (*Bambusa multiplex*). Jenis bambu ini seperti rumput atau ilalang karena ukurannya kecil. Warga di desa kami sering menjadikan tanaman ini sebagai pagar di halaman rumah. Tingginya paling-paling sekitar 1 m, dan jarang menjadi lebih tinggi karena dipotong untuk mempercantik bentuknya. Memainkan ini asyik sekali, dan memang sebagai kanak-kanak di desa, jenis mainan seperti inilah yang bisa kami lakukan. Kami berlagak bagai seorang prajurit yang bertempur, menembak dengan peluru dari biji-bijian atau kertas koran yang dibasahkan.

Di masa dulu juga, orang-orang tua kami suka mencari bambu dengan berbagai jenis, dan kemudian direndam di aliran air atau rawa-rawa selama sekitar sebulan. Bambu yang direndam dipercaya menjadikannya berkualitas bagus dan tahan terhadap rayap. Bambu ini kemudian diolah menjadi dinding rumah, pagar, lantai rumah dan sebagainya. Begitupun, setiap menjelang lebaran, nenek dan ibu-ibu biasanya sibuk mengolah jenis bambu talang (*Schizostachyum brachycladum* Kurz), mengambil serus-seruas, diisi beras, dibakar dengan posisi berdiri, maka jadilah ia leman. Menu luar biasa dan wajib kala itu.

Bambu memang melekat sekali dengan komunitas masyarakat pedesaan, komunitas awal pembentuk masyarakat lain yang lebih luas. Bisa dipastikan dimanapun lokasinya, penduduk Indonesia sangat kenal dan dekat tumbuhan yang satu ini. Tumbuhan ini menjadi sangat dekat dengan masyarakat karena memang sangat mudah diperoleh (kala itu) dan ia bisa tumbuh dimanapun. Tak perlu dipupuk dan dibersihkan, bahkan tergeletakpun di tanah, ia akan tumbuh dengan sendirinya.

Bisa kita lihat bagaimana sebaran bambu ini ada di seluruh daerah Nusantara. Tiap daerahpun punya sebutan sendiri untuk bambu ini, yang menunjukkan bahwa mereka mengenal dan dekat dengan tanaman jenis rumput ini. Orang Aceh menyebutnya Trieng, di Bali sebut Ting, orang Batak menamai dengan Bulu, di Sumbar di sebut Buluh, Madura mengatakan Keles/Pereng, di Jawa disebut Pring/Bambu, dan sebutan lainnya di berbagai daerah. Semuanya merujuk pada tanaman yang sama.

Pribahasa Melayu sendiri juga banyak yang menggunakan kata-kata bambu, seperti "bagai aur dengan tebing", "bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat", "bagai pohon bambu ditiup angin", dan lain sebagainya. Dalam konteks masyarakat Melayu, juga komunitas tradisional lain yang lazim pakai sastra tutur, sebuah pribahasa ataupun pantun, biasanya tidak muncul begitu saja. Kata-kata itu mengandung petuah, ajaran, yang datangnya dari melihat realitas alam semesta tempat mereka hidup. Pemaknaan terhadap realitas alam inilah yang kemudian dijadikan bagian dari kehidupan sehari-hari, yang mewujud dalam berbagai bentuk kebudayaan. Orang komunikasi menyebut ini sebagai bentuk etnoekologi komunikasi.

Masyarakat memaknai alam, memaknai lingkungannya, memaknai semua yang ada disekitarnya. Sudah kelaziman pula,

memaknai ini didasarkan pada nilai guna dan fungsinya bagi keutuhan dan kelangsungan hidup manusia. Pada titik tertentu, pemaknaan ini bisa berubah, bergeser, yaitu pada saat realitas sosial di masyarakat juga berubah. Perubahan ini bisa karena faktor internal masyarakat, dan yang paling dominan karena faktor eksternal, terutama industrialisasi dan modernisasi. Saat pula pikir masyarakat dari generasi ke generasi terus digerus dengan godaan-godaan materialistis sebagai imbas dari industrialisasi, maka lingkungan alampun dimaknai sebagai wilayah materi semata. Terjadilah eksploitasi besar-besaran, bukit di pangkas, rawa ditimbun, sungai dikeringkan, tanah digali. Untuk sesaat, manusia masih merasakan untungnya, tapi hanya sesaat. Jangka panjang, kemelaratan, kekeringan, longsor, banjir, kebakaran hutan, kabut asap, jadi menu sehari-hari.

Pada kondisi demikian, ada kecenderungan bahwa manusia sudah berada pada taraf melupakan identitasnya sendiri, identitas dalam arti kata hubungannya dengan lingkungan alam ini. Banyak unsur di alam ini yang sebenarnya adalah identitas bagi manusia disekitarnya, tapi sayang identitas ini kerap dianggap tidak penting, atau terkadang justru dibuat identitas baru yang menghilangkan identitas awal. Saya percaya bahwa identitas masyarakat tersebut ada pada alam disekitar mereka. Orang Antropologi menyebut ini dengan kosmologi.

Atas dasar itu, sebagaimana penggambaran di awal tulisan ini, ataupun berbagai pengalaman dan kebiasaan di masyarakat lokal, maka bambu sebenarnya adalah identitas. Bukankah negara ini adalah wilayah tropis? Bambu sendiri adalah salah satu tanaman tropis, yang sedari awal sudah diketahui sebagai tanaman ramah lingkungan, multifungsi, mudah dalam budidaya, dan punya peran besar dalam menyimpan air dalam tanah dan luar tanah. Tentu kita

masih ingat bagaimana cerita-cerita orang tersesat dalam hutan yang kehabisan air minum. Batang bambu adalah solusi, tinggal pancung, didalamnya ada air siap minum. Itulah cadangan air luar tanah.

Identitas itulah yang kemudian melekat dalam semua aktifitas masyarakat, walaupun kemudian muncul pula pandangan negatif, bahwa orang yang menggunakan bambu untuk rumahnya, adalah orang miskin. Karena tidak mampu membeli kayu, pohon bambupun jadilah. Saya pikir ini adalah masalah kuasa struktur. Sedari dulu, kita sudah dibiasakan (distrukturkan) untuk memandang kayu, dan cenderung disebabkan karena kayu punya nilai jual tinggi. Sifat kayu yang mudah diolah, bisa dipaku, lebih cepat bisa difungsikan. Alhasil, ramai-ramailah kayu ditebang, dibelah, dijual dan dijadikan segala macam produk. Ini sangat dekat dengan struktur ekonomi kapitalistik, dan memang itulah yang terjadi. Persoalannya, saat kayu sudah habis, apa yang bisa dilakukan? Inilah titik lemahnya, sehingga kayu tidak punya argumen kuat untuk dijadikan identitas masyarakat.

Peremajaan kayu (reboisasi) tidak bisa sebentar, butuh bertahun-tahun, umumnya di atas 10 tahun. Berbanding terbalik dengan bambu, ia bisa tumbuh cepat dan banyak dalam satu rumpun. Bambu juga sangat tahan terhadap api, misalnya kebakaran. Walau batang dan daunnya sudah habis, dalam waktu singkat ia akan tumbuh lagi. Sebuah referensi pernah menyebutkan, saat bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, satu-satunya tanaman yang tersisa adalah bambu.

Karena itulah bambu sebenarnya adalah identitas masyarakat daerah tropis, terutama Indonesia, termasuk tentu saja orang Melayu. Bambu adalah identitas, sebagaimana Cina yang menggadang-gadangkan diri sebagai Negara Tirai Bambu. Sudah

saatnya identitas ini dikembalikan ke orang-orang Melayu, dan tentu saja dengan memulai menanamnya, membudidayakan, dan memanfaatkan.

Saat ini, semua itu menjadi begitu relevan, terutama dengan program pemerintah untuk melakukan restorasi atau perbaikan dan penghijauan kembali lahan gambut yang pernah terbakar hebat di 2014 dan 2015 silam. Gambut adalah salah satu wilayah habitat pohon bambu. Tak salah, dan bahkan harus didorong agar bambu masuk dalam skema pelaksana restorasi nantinya. Tentu saja, karena identitas masyarakat bukan hanya bambu, tapi seluruh yang ada di alam ini, maka perlu dimasukkan tanaman lain seperti Sagu, Aren, Pinang, dan Jelutung. Ibarat pepatah, sekali merengkuh dayung, dua pulau terlampaui. Sekali merestorasi, banyak manfaat tercapai, lahan hijau, karhutla bisa dicegah, dan identitas masyarakat bisa ditegakkan kembali.

9

BAMBU LEBIH CEPAT MERESTORASI LAHAN GAMBUT

Sebuah kisah menarik pernah dituliskan oleh Suharyo Padmodiwiryo dalam novelnya "Badak Terakhir". Novel ini mengisahkan perjalanan sang penulis, saat itu sebagai Pangdam IX Mulawarman, ketika menjelajahi hutan perawan di Kalimantan Timur, sekitar tahun 1960-an. Misi utamanya adalah untuk melihat apa benar ada sosok Badak, yang sempat dimitoskan oleh masyarakat setempat. Singkat cerita, berbagai belukar, semak, lembah dan bukit ditempuhnya. Pepohonan besar dan rimba lebat yang tak pernah terjamah manusia, juga dilalui. Setelah sekian lama hidup di hutan, Sang Jenderal dan dua orang Dayak temannya, akhirnya menemukan binatang langka tersebut, tidak hanya satu, tapi bergerombol dengan yang lain. Dimanakah ia menemukan si Badak? Novel ini mengisahkan secara detil sebuah suasana hutan yang sangat menarik. Disebutkan disitu adanya sekumpulan hutan bambu, mungkin ratusan hektar, yang seolah-olah muncul begitu saja setelah menelusuri tinggi dan rapatnya hutan Borneo tersebut. Semilir angin di antara dedaunan bambu menciptakan bunyi yang begitu khas dan merdu. Di sela-sela itulah kawanan Badak berjalan menuju kekubangannya.

Saya tidak akan bicara soal Badak atau tentang Brigjen Hario Kecik tersebut, tetapi penggambaran penulis tentang suasana hutan Kalimantan dan kerimbunan bambu menjadi sesuatu yang menarik. Membacanya saya seolah-olah teringat kisah fiksi novel silat Ko Phing Ho, yang banyak menceritakan pertempuran pendekar Cina dengan latar hutan bambu. Begitupun, di waktu kecil dulu, bersama teman-teman kami sangat suka memainkan meriam bambu, bunyinya yang berdentum menjadi penyemangat bagi kami, walau risikonya juga cukup fatal.

Di lain sisi, saya juga teringat bagaimana *pance-pance* yang banyak ditemukan di Muara Enim dan beberapa daerah Uluan, terbuat dari susunan bilah bambu. Hal terbaru, saya sering membayangkan bagaimana sebenarnya wilayah Sumatera Selatan ini dulunya dipenuhi oleh hutan bambu dengan berbagai jenis. Prasasti Talang Tuwo yang ditemukan di daerah Talang Kelapa, sudah bicara banyak tentang itu. Artinya, sejak zaman Sriwijaya dulu, bahkan jauh sebelumnya, bambu sudah jadi bagian kehidupan masyarakat.

Tapi sayangnya, seiring berjalannya waktu, sejalan pula dengan berbagai kebijakan pemerintah di sektor perkebunan, pertanian dan kehutanan, bambu-bambu itu lambat laun menghilang. Menghilangnya bambu ini, sejalan pula rupanya dengan habisnya ribuan pohon-pohon besar. Kayu sudah habis, bambu ikut menipis. Bedanya, kayu habis karena ditebang dan dijual dengan harga tinggi, sementara bambu kebanyakan hanya dibuang begitu saja. Nilai ekonomis yang rendah dan pemasaran sangat terbatas, jadi penyebab utama.

Realitas ini terkait sekali dengan kecenderungan selama ini, bambu dianggap sebagai wilayahnya masyarakat kelas bawah, kelas tiga. Bisa dibuktikan, kalau anda punya rumah berdinding bambu, berlantai bambu pula, maka anda akan dikategorikan kelompok masyarakat Pra Sejahtera atau bisa jadi Sejahtera I. Ini stigma yang sering dikembangkan sehingga efeknya bambupun jadi tanaman kelas tiga.

Sebuah penelitian dari INBAR (International Network fo Bamboo and Rattan) menegaskan bahwa bambu sebenarnya adalah tanaman yang luar biasa. Ia tidak hanya berguna untuk keperluan perabotan atau material bangunan, tetapi juga punya fungsi ekologis yang sangat baik. Simpanan karbon cukup tinggi, bahkan bambu juga bisa menjadi sumber energi alternatif. Ini menjadi relevan dengan apa yang dilakukan para *puyang* dulu, tanaman bambu telah dikenal nenek moyang kita, dan banyak sekali disebut dalam berbagai cerita-cerita lama, entah itu legenda atau dongeng, seperti Legenda Si Pahit Lidah yang dikabarkan takut dengan bambu kuning.

INBAR juga menyebutkan bahwa bambu seharusnya menjadi tanaman yang sangat strategis. Bambu bisa tumbuh dengan mudah, baik lahan basah ataupun kering. Penanaman sangat mudah, cenderung tanpa perlu rekayasa teknologi, bisa panen lebih cepat ketimbang tanaman reboisasi lainnya. Bambu bisa menjadi tempat penyimpan karbon terbesar (di China telah dikaji dengan perkiraan 1.018 Juta Metrik Ton hingga 2050 nanti), dan juga punya nilai ekonomis yang tinggi. Artinya, tanaman ini terbukti ramah terhadap lingkungan dan punya nilai ekonomis.

Atas dasar itu, ketika sekarang pemerintah ribut-ribut mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang banyak terjadi pada kawasan gambut, solusi terbaik adalah memulihkan yang terbakar menjadi hijau kembali, salah satunya dengan tanaman Bambu. Bisa juga dengan Sagu, Aren, Pinang, Jelutung, dan lainnya. Semua tanaman tersebut jelas punya fungsi konservasi yang sangat baik, dan jelas cocok dengan kawasan gambut.

Mengapa harus Bambu? Data dari INBAR kiranya sudah bisa memberikan legitimasi ilmiah bahwa tanaman tersebut paling sesuai dengan maksud konservasi dan sisi ekonomi. Tetapi tentu saja, bambu tidak boleh dijadikan tanaman monokultur. Pengelolaan kawasan gambut harus dengan sistem multikultur, karena itulah Sagu, Jelutung, Pinang, Aren, bisa ikut mendampinginya. Prasasti Talang Tuwo, sekali lagi, sudah sangat jelas mengatakan itu. Artinya, kalau kita kembali ke tanaman-tanaman tersebut, setidaknya kita kembali mengingat pesan para leluhur.

Memandang lahan gambut, pada dasarnya akan memandang kesatuan manusia dengan alam. Perspektif etnoekologi komunikasi sudah berbicara tentang ini. Manusia memiliki sudut pemaknaan tersendiri terhadap alam sekitarnya, dan itu diwujudkan dalam bentuk aliran informasi, energi dan materi. Tiga aspek ini menjadi saluran keutuhan ekosistem yang ada. Tidak heran ketika tim Balar Palembang beberapa waktu lalu menemukan bukti-bukti peninggalan kerajaan Sriwijaya di daerah gambut di Cengal, OKI. Temuan itu menunjukkan interaksi manusia dengan lahan sekitarnya, dan mereka memanfaatkan semua karakteristik yang ada, tanpa harus merusak. Bambu, Jelutung, Aren, Kelapa, Pinang, Sagu, adalah tanaman-tanaman yang akrab dengan kehidupan

manusia dan itu menjadi sangat kontekstual saat itu dan saat sekarang.

Oleh karenanya, ketika sekarang gambut disulap menjadi hamparan perkebunan sawit atau semata-mata hamparan sawah, titik keseimbangan aliran energi, materi, dan informasi itu seakan-akan diabaikan. Gambut membutuhkan sesuatu yang bervariasi. Hasil penelitian dari Sutiyono (Puslitbang Peningkatan Produktifitas Hutan, Bogor), pernah menyebutkan bahwa bambu merupakan tanaman yang menarik dan bisa ditanam di lahan basah. Lahan gambut adalah salah satu yang bisa dijadikan lokasi. Sutiyono juga berkata bahwa bambu adalah hasil hutan bukan kayu yang sangat potensial mensubstitusi kayu, dan terpenting ramah lingkungan.

Kita menantikan restorasi gambut yang saat ini akan berjalan, akan bisa "menyulap" kawasan-kawasan tersebut menjadi hijau, hidup, dan sehat. Kawasan yang selama ini menjadi penyumbang masalah seperti asap, akan menjadi sumber kehidupan bagi semua umat. Syarat utama adalah multikultur dan adanya partisipasi warga, bukan lagi dominasi pemodal besar. Semoga ini akan terlihat buahnya 5, 10, 20 tahun lagi dan sampai selamanya.

**) Tulisan ini sudah dimuat dalam www.sriwijayapeat.org.*

Tanggal 16 Mei 2016

10

GAMBUT YANG HARUS DIMAKNAI

Beberapa waktu lalu, di pertengahan Maret 2016 ini, tim Balai Arkeologi (Balar) Palembang berhasil menyusuri kawasan pantai timur Sumatera Selatan. Berada di Desa Ulak Kedondong, Cengal, Kabupaten OKI, tim Balar berhasil menemukan berbagai situs yang diperkirakan berasal dari sisa peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Bentuknya berupa pecahan keramik, sisa-sisa tiang rumah, dan beberapa benda artefak lainnya. Keterangan dari Nurhadi Rangkuti, sebagian besar sudah hilang karena diperjualbelikan, tinggal sisa-sisa yang dianggap tidak punya nilai ekonomis (www.mongabay.co.id). Tapi bagi tim Balar Palembang, sisa-sisa itu sudah bisa menjadi bukti bahwa keberadaan kerajaan Sriwijaya juga terlacak di pesisir timur Sumatera.

Penelusuran tim Balar Palembang juga menemukan fakta bahwa sebagian situs tersebut rusak tidak hanya karena ulah sekelompok pengejar harta karun, tetapi lebih parah karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seperti tahun 2014 dan 2015 lalu. Lokasi situs tersebut berada pula di kawasan gambut, yang dimusim kemarau lalu sangat rentan untuk terbakar. Ini yang mengkhawatirkan karena kerusakan akibat karhutla, punya dampak

serius yang memusnahkan berbagai ekosistem didalamnya, termasuk situs bersejarah daerah ini.

Pada titik inilah, pembicaraan mengenai karhutla menjadi semakin penting. Efeknya tidak sekedar kabut asap yang menghantam hampir semua warga Sumsel, tapi juga berpotensi melenyapkan bukti-bukti sejarah masyarakat di bumi Sriwijaya ini. Patut pula jadi catatan bahwa sebagian besar bukti-bukti sejarah itu ada di areal gambut, kawasan rawa, yang di musim kemarau belakangan ini menjadi kering. Disinilah perlunya dimaksimalkan upaya perlindungan kawasan gambut, di restorasi, dipelihara, karena banyak aspek penting tersimpan di kawasan tersebut.

Khusus di wilayah Sumsel, agaknya perhatian terhadap kawasan gambut harus mendapat perhatian lebih. Terjadinya karhutla tahun 2015 lalu, terbukti banyak terjadi di kawasan ini dan menimbulkan problema besar. Pemerintah sendiri melalui Badan Restorasi Gambut juga menetapkan dua kabupaten di Sumsel (Muba dan OKI) sebagai wilayah prioritas yang harus diselesaikan. Ini menunjukkan bahwa gambut adalah masalah krusial.

Kawasan gambut memang termasuk kawasan unik. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki areal ini, hanya daerah yang punya kawasan rawa seperti Sumsel, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah yang punya ekosistem gambut. Kalaupun ada di provinsi lain, jumlahnya relatif sedikit dan kedalamannya tidak signifikan. Di sisi lain, gambut memiliki nilai sangat penting, baik bagi ekosistem sekitar maupun keseimbangan iklim.

Sejarah mencatat bahwa pembukaan kawasan gambut sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala. Ada ahli yang berpendapat bahwa sejak era Majapahit, pengelolaan gambut sudah mulai

dilakukan dengan kemampuan teknologi masyarakat saat itu. Kemudian di era penjajahan Belanda juga sudah dilakukan dengan sistem kolonisasi atau identik dengan transmigrasi. Pembukaan secara besar-besaran berlangsung dalam tiga era yaitu (1) era periode 1945-1960an, (2) era periode 1969-1995an dan (3) era periode 1995-2000an. Masing-masing periode memiliki karakteristik dan tipologi tersendiri, kendati pembukaan secara besar-besaran dimulai sekitar 1990-an sampai sekarang. Moratorium pernah dilakukan tahun 2011, namun faktanya, lahan gambut tetap mengalami kerusakan. Data dari UPTD Dinas Kehutanan Sumsel menyebutkan bahwa 1 juta Ha lahan gambut di Sumsel terbakar sejak 2006-2014.

Hal penting dari semua itu, kerusakan lahan gambut dalam bentuk karhutla, sangat mengganggu berbagai aspek kehidupan. Ancaman kemusnahan bukti sejarah, sebagaimana dilansir Balar Palembang, adalah sisi lain yang sangat mencemaskan. Memaknai gambut sebagai sebuah kawasan khusus harus segera dilakukan, baik pemaknaan pada level kebijakan pemerintah, aktifitas masyarakat, termasuk aktifitas perusahaan perkebunan. Gambut harus dilindungi, terutama yang memiliki kedalaman tertentu, dan lokasi yang didalamnya terdapat bukti-bukti sejarah.

Adanya PP No. 71/2014 serta hadirnya Perpres No. 1/2016 tentang Badan Restorasi Gambut, memang sudah menunjukkan perhatian pemerintah untuk menjaga kawasan ini. Namun tentu tidak cukup itu saja, perlu komitmen kuat untuk menjadikan kawasan gambut sebagai kawasan lindung, bukan kawasan ekonomis atau budidaya. Perlu tindakan nyata, jangan justru menjadi sarana pencitraan semata. Eksploitasi oleh masyarakat lokal,

dimungkinkan untuk dilakukan, karena bisa dilakukan pembatasan dan metode yang tepat. Tetapi eksplorasi secara besar-besaran dengan masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit ataupun hutan tanaman industri (HTI), harus sesegera mungkin dihentikan.

Oleh karena itu, dalam melakukan perlindungan terhadap lahan gambut ini, melibatkan masyarakat lokal dan memberikan kepastian hukum, adalah kunci utama. Ini yang dimaksud dengan merestorasi gambut berbasis pendekatan budaya. Mengapa ini harus dilakukan? Catatan sejarah menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat sudah sangat terbiasa dalam pengelolaan kawasan gambut. Sejak era Sriwijaya di Sumsel, gambut sudah dikenal dan selama ini cenderung tidak menjadi masalah. Titik persolaannya ada pada perlakuan terhadap kawasan yang berawal pada sudut pandang masyarakat.

Tentu saja, masyarakat era sekarang berbeda dengan masyarakat zaman dulu. Untuk itu, langkah pertama adalah menyiapkan masyarakat melalui berbagai pendidikan kepedulian lingkungan. Ini penting karena disinilah basis pengelolaan gambut ditanamkan dan kesadaran warga juga dimunculkan. Generasi sekarang ini yang sudah bisa dikatakan mulai tercerabut pemahamannya dari akar lingkungan, kembali dimunculkan. Menyadarkan dan membangkitkan pengetahuan tentang keterikatan dengan alam, adalah pintu masuk yang harus dilakukan. Setelah itu, barulah diturunkan menjadi kebijakan formal, serahkan lahan gambut pada masyarakat, atau kelola lahan gambut berbasis pada nilai-nilai budaya yang berlaku.

Budaya yang dimaksud disini bisa diterjemahkan sebagai aspek kebudayaan secara luas yang berlaku dan berkembang di

masyarakat. Ada unsur mata pencaharian, ada unsur religi dan sistem kepercayaan, ada unsur ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Semua ini menjadi dasar dalam mengelola kawasan gambut, dengan pertimbangan tertinggi, lahan gambut harus untuk kesejahteraan dan kemakmuran, bukan untuk eksploitasi kelompok kapitalis. Apabila ditarik lebih jauh lagi, ini menjadi sesuai dengan amanat dalam Prasasti Talang Tuwo era Sriwijaya dulu yang mencatatkan aspek pengelolaan ruang dan wilayah sebagai hal penting, karena semua yang ada di alam ini harus ditujukan untuk kemakmuran. Disinilah pentingnya memaknai gambut, yang bisa disamakan dengan memaknai tatanan alam semesta ini.

**) Tulisan ini sudah dimuat di HU Sriwijaya Post, 28 Maret 2016*

11

KAMPANYE GAMBUT, KAMPANYE ANTI ASAP

Sejak Ramadhan lalu hingga memasuki pertengahan Juli 2016, kondisi cuaca di Sumatera Selatan sudah terasa menyengat. Sesekali memang masih ditetesi buliran air hujan. Kemarau basah, begitulah orang menyebutnya. Semakin lama, sengatan panas matahari makin terasa. Seiring itu pula, kekhawatiran munculnya derita kabut asap, sebagaimana 2015 lalu, mulai menghantui. Jadi pertanyaan penting, akankah Sumsel bebas asap tahun ini akan terealisasi? Tak ada yang bisa memastikan, tapi berharap sudah pasti.

Masalah dasar munculnya kabut asap di Sumsel, sudah sama-sama diketahui berasal dari terbakarnya lahan gambut. Rawa bawah tanah ini, mengering di musim kemarau yang bisa disebabkan oleh banyak hal, bisa karena cuaca sangat panas dalam jangka waktu lama, bisa pula karena siklus aliran airnya yang terganggu. Siklus yang terganggu ini sangat potensial disebabkan oleh ulah manusia yang melakukan aktifitas disekitar lahan gambut, sehingga keringlah lahan itu di musim kemarau. Sesuatu yang kering, jelas menjadi sumber bahan bakar api yang utama.

Sebagai catatan di tahun 2015 lalu, luas lahan gambut yang terbakar di Sumsel mencapai 144.410 ha dan non gambut 214.690 Ha. Kabupaten terluas sebagai sumber api ada di OKI dan MUBA. Atas dasar itu juga, Sumsel menjadi salah satu wilayah prioritas restorasi gambut yang masuk dalam cakupan kerja Badan Restorasi Gambut (BRG) pusat.

Apakah dengan berulangnya peristiwa kebakaran sejak beberapa tahun lalu, lantas pemerintah berdiam diri? Tidak juga. Disini harus kita jujur, dibanding tahun-tahun sebelumnya, persiapan menghadapi kemarau 2016 ini sedikit lebih baik dan lebih tertata. Sistem antisipasi awal sudah diterapkan, deteksi dini juga dijalankan. Maka itulah yang terjadi saat jajaran Polres Muba beserta tim melakukan reaksi cepat terhadap titik api, dan menangkap pelakunya.

Kesiapan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ini setidaknya tampak dari telah berjalannya Tim Restorasi Gambut (TRG) Sumsel, mulai aktifnya kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), serta gerak cepat beberapa perusahaan perkebunan besar untuk mengantisipasi titik api yang timbul. Satgas-satgas pemadam api juga sudah bersiaga di berbagai lokasi yang dianggap strategis. Setidaknya, sampai hari ini, ancaman kabut asap belum tampak, ini sudah bisa jadi prestasi tersendiri.

Mengatasi masalah kabut asap bukanlah kerja perorangan atau satu tim saja. Dukungan nyata dari semua unsur, baik terlibat langsung atau tidak, harus ada. Kabut asap harus dijadikan masalah bersama, sehingga secara bersama-sama pula ini diantisipasi dan diselesaikan. Karhutla bukan hanya tugas TRG, BNPB, Tagana, ataupun unsur-unsur struktural lainnya. Termasuk juga bukan

semata-mata pekerjaan perusahaan pemilik konsesi yang wilayahnya ikut terbakar. Semua pihak harus terlibat dan dilibatkan. Karhutla dengan efeknya pada kabut asap harus dijadikan masalah bersama, kondisi yang sudah sangat luar biasa (*extra ordinary*).

Disinilah, penggalangan opini publik, pelaporan kepada masyarakat, termasuk mengajak publik ikut mengawasi bersama-sama semua kegiatan yang dilakukan, harus dilaksanakan. Saya yakin, TRG yang sekarang jadi motor terdepan dalam hal pencegahan karhutla di wilayah gambut, akan sangat kerepotan jika hanya jalan sendiri, bahkan mungkin tak bisa berbuat apa-apa. Titik penting yang harus diperhatikan adalah kampanye lingkungan, terutama kampanye anti karhutla. Memperkuat pada sisi ini akan menegaskan aspek pencegahan ketimbang penindakan.

Apa unsur terpenting dalam aktifitas ini? Publik dalam arti kata masyarakat secara luas, baik masyarakat yang berada langsung di sekitar lokasi potensial karhutla, ataupun masyarakat yang hanya menerima dampak asapnya saja, adalah komponen utama. Kelompok ini harus digalang opini dan kepeduliannya kepada keutuhan kawasan gambut. Kepedulian ini bisa dalam bentuk aksi tidak membakar hutan dan lahan, memadamkan titik api yang sudah terlihat, ataupun melaporkan sedini mungkin semua potensi karhutla. Di sisi lain, bisa juga dengan mengajak kelompok lain untuk peduli, baik himbauan ataupun sumbangsih nyata. Intinya adalah kepedulian dan rasa keterlibatan bahwa karhutla harus dicegah bersama-sama.

Tentu saja, semua sikap kepedulian itu tidak akan datang begitu saja, kendati sebenarnya deraan kabut asap tahun lalu sudah cukup jadi pemantik kesadaran. Tetapi, menilik dari realitas

masyarakat yang sudah banyak berubah, maka pendekatan budaya untuk membangkitkan kesadaran, kiranya perlu pula dilakukan. Kebiasaan selama ini untuk tidak peduli dengan apa yang terjadi, harus dibuang dan dimunculkan rasa perlu tersebut. Sikap membebankan tanggungjawab pada satu pihak saja (pemerintah) harus pula disingkirkan. Ini sudah masalah luar biasa (*extra ordinary problem*).

Guna membangun opini publik dengan membangkitkan kesadaran inilah, diperlukan pula dukungan media massa. Komponen ini ada di titik terdepan yang akan mengawal proses pencegahan karhutla. Jangan justru dijadikan pelengkap saja, atau semata-mata sarana publikasi kegiatan, tetapi sebagai motor penggalang opini masyarakat dan pengawal proses. Untuk katagori media massa *mainstream* (surat kabar, televisi dan radio), adanya Forum Jurnalis Karhutla bisa jadi titik awal. Artinya media massa memiliki kelompok jurnalis yang fokus pada karhutla, memahami seluk beluk karhutla, termasuk berbagai dinamika didalamnya. Fokusnya bukan hanya memberitakan (melaporkan) semata, namun membangun opini masyarakat melalui berita.

Selain itu, eksistensi media online, juga sangat efektif untuk dimanfaatkan, baik jejaring media sosial maupun media massa online. Di beberapa hal, sangat mungkin dikembangkan kelompok-kelompok jurnalisme warga, yang mampu untuk memproduksi berita sendiri dan kemudian memberitakannya pula. Perangkat teknologi sekarang sudah sangat memungkinkan untuk melakukan itu. Oleh karena itu, adanya inisiatif dari beberapa rekan jurnalis lingkungan di Sumsel beberapa waktu lalu, yang melakukan pelatihan jurnalisme warga di beberapa desa, patut sekali

diapresiasi. Tidak untuk mendidik mereka menjadi wartawan, tetapi melatih mereka untuk mampu melaporkan segala hal berkaitan karhutla sedini dan setepat mungkin. Sangat baik sekali jika pelatihan jurnalisme warga berorientasi karhutla dan lahan gambut diperbanyak dan tentu saja difasilitasi.

Saat ini, kehadiran jejaring media sosial juga punya aspek yang luar biasa. Inipun bisa dimanfaatkan secara efektif. Setahu saya, TRG Sumsel sudah mulai melakukan itu, terutama lewat Facebook. Ketua TRG Sumsel termasuk yang paling rajin melakukan ini. Ini adalah hal positif, karena publik sudah bisa melihat apa dan bagaimana kegiatan yang terjadi. Melalui media ini juga, dialog lebih terbuka dan langsung, dan publik bisa unjuk saran. Prinsip transparansi sudah terlihat pada mekanisme ini. Maksimalisasi aspek ini yang perlu didorong dan diperluas.

Pada dasarnya, mekanisme kampanye lingkungan yang fokus pada kampanye gambut anti asap, harus memaksimalkan semua media yang ada. Sasaran utamanya, membangun kesadaran bersama dan kepedulian pada areal gambut. Sekali lagi tak mungkin TRG, BNPB, Tagana, Manggala Agni, Perusahaan Perkebunan, ataupun kelompok lain bekerja sendiri, ataupun koordinasi sesama mereka saja. Kalau hanya itu, peristiwa 2015 lalu akan terulang lagi. Lakukanlah kampanye efektif tentang gambut, libatkan media secara efektif, bentuk media sendiri, dan bangunlah kesadaran semua pihak.

Kekeliruan berpikir jangan sampai terulang lagi, seperti penggunaan prinsip "tak perlu bicara, yang penting bukti". Dalam ranah karhutla dan kabut asap, prinsip ini tak sepenuhnya berlaku. Bukti kinerja memang penting, tetapi menyampaikan (berbicara)

kepada orang banyak juga sangat penting, apalagi dalam konteks persoalan yang sudah sangat luar biasa. Kerja mengatasi karhutla bukan kerja individu, disinilah pentingnya mengkomunikasikan ke semua pihak. Semoga kita semua sadar akan masalah ini.

**)Tulisan ini sudah dimuat di HU Sriwijaya Post,*

12

KAMPANYE LINGKUNGAN YANG (TIDAK) PENTING

Adakah yang masih bisa membantah bahwa masalah lingkungan bukan sesuatu yang penting di saat ini? Saya yakin, tidak ada yang berani berkata tidak. Semua akan menjawab persoalan lingkungan hidup sangat strategis sekali. Tetapi, adakah di antara kita yang berani berkata bahwa ia sudah melakukan sesuatu yang baik untuk lingkungan di hari ini? Saya yakin, banyak di antara kita menggeleng ataupun sukar menjawabnya. Tak ada jawaban yang memuaskan. Itulah realitas yang melanda manusia saat ini. Menyadari masalah itu ada, tapi tak pernah berbuat agar masalah tak muncul lagi.

Kota Palembang dan Sumatera Selatan secara umum, dalam beberapa tahun terakhir ini, sudah menunjukkan dan sudah mengalami bagaimana dahsyatnya masalah lingkungan. Tahun 2014 dan 2015 lalu, kabut asap yang sangat mengganggu telah dirasakan dimana-mana. Di penghujung kemarau, banjir dan tanah longsor menjadi langganan pula. Alhasil, dalam setahun tak ada waktu bebas dari masalah lingkungan. Publik seolah-olah dibiasakan oleh persoalan ini.

Kenyataan itu bisa jadi akan membawa kita pada opini bahwa masalah lingkungan itu sudah biasa saja, bahkan mungkin sudah pula dikatakan itu takdir. Berbagai referensi dan juga pengetahuan bersama, sebenarnya sudah memberi tahu pada masyarakat bahwa yang dirasakan selama ini adalah aspek hilir dari carut marut tata lingkungan, bukan inti masalahnya. Dengan kata lain, kabut asap dan banjir, itu bukan inti persoalan, itu hanya hilirnya, dampak dari akar persoalan. Apa inti masalahnya? Eksploitasi sumber daya alam, eksploitasi bumi ini, itulah pokok masalah. Bisa dibuktikan dari bagaimana kondisi alam di Palembang yang dominan rawa-rawa dan tempat genangan air, kemudian dieksploitasi dengan menimbun, dijadikan ruko, perumahan, dan sebagainya. Nilainya menjadi tinggi, harga jual naik tajam. Efeknya, banjir jadi hal yang rutin.

Di berbagai daerah dimarakkan dengan pembukaan perkebunan kelapa sawit. Tempat-tempat yang selama ini adalah resapan air, dikeringkan dijadikan kebun. Hutan dan pepohonan yang menyejukkan, ditebang, dijadikan kebun pula. Tidak cukup 10-20 ha, dibukalah luasan mencapai ribuan hektar. Akibatnya, musim kemarau menjadi tambah panjang dan panas, kebakaranpun jadi langganan. Tetapi sekali lagi, manusia cenderung menganggap itu hal yang biasa, sudah seperti itulah, dan kerepotan baru terjadi ketika masalah di hilir tampak nyata.

Apa titik penting dari hal ini? Inilah problem dasar yang selama ini terlupakan, yaitu Kampanye Lingkungan. Jika dilihat dari perjalanan waktu dalam beberapa tahun terakhir ini, ketika masalah itu semakin merepotkan, sangat minim kampanye lingkungan dilakukan. Kalaupun ada, bentuknya adalah himbuan, ajakan,

larangan, dan penangkapan. Selesaikah masalah lingkungan? Nyatanya justru semakin parah.

Memang di berbagai tempat kita menemukan baliho-baliho, spanduk, yang bertuliskan "Go Green, Save Earth" dan sebagainya. Di media massa kita juga lihat banyak pejabat yang bersuara lantang, harus selamatkan lingkungan, dilarang membakar lahan, dan seterusnya. Itu mungkin dianggap sebagai bentuk kampanye lingkungan, tetapi itu adalah kampanye yang sebatas pencitraan semata, seakan hanya berupaya jangan sampai tidak ada usaha.

Kampanye lingkungan, sebenarnya hampir-hampir mirip dengan kampanye politik, yaitu bagaimana mengajak orang lain agar melakukan sesuatu sesuai yang diarahkan. Kalau anda ingin terpilih jadi kepala daerah atau anggota legislatif, anda harus ajak orang untuk memilih. Maka dipasanglah spanduk, iklan, baliho, dan sebagainya dimana-mana. Fungsinya agar orang kenal dan tertarik. Tetapi cukupkah itu saja? Tentu tidak, anda harus memiliki "mesin" yang bertugas mensukseskan. Itulah tim sukses. Cukupkah tim sukses belaka? Tidak juga, karena publik sekarang sudah cerdas, ia akan menilai dan mengkaji, siapa dan bagaimana anda sebenarnya. Rekam jejak, latar belakang, pengalaman selama ini, akan diperhatikan pula. Kalau semuanya terpenuhi, hampir bisa dipastikan, anda terpilih.

Masalah lingkungan yang akan dikampanyekan pun seperti itu. Ia butuh spanduk, baliho, iklan, dan sebagainya yang berfungsi "meramaikan" wacana publik. Fungsi dasarnya adalah meramaikan, bahwa masalah lingkungan adalah penting bagi semua orang. Tetapi itu tidak cukup, meramaikan saja hanya akan berujung retorika dan sebatas pencitraan. Ada sebuah saran dari Jurin (2010) yang berpendapat, mengkampanyekan lingkungan sehat, butuh

komitmen dan tindakan nyata, bukan beretorika belaka. Ini yang kemudian menjadi faktual sekali.

Kampanye lingkungan harus dilakukan sedari dini, sejak saat ini, bahkan sebenarnya sejak puluhan tahun lalu. Kampanye ini akan berkaitan dengan *grand design* dalam menata sebuah wilayah. Akan menjadi sia-sia saja, jika saat ini digembar-gemborkan penyelamatan lingkungan, namun tidak ada langkah nyata ke arah itu. Isu lingkungan kemudian menjadi barang jualan semata.

Sumatera Selatan, sudah dipastikan membutuhkan metode kampanye lingkungan yang bersifat partisipatif, bukan lagi retorika dan wacana semata. Sumsel sudah darurat masalah lingkungan. Semestinya kampanye ini masuk dan terintegrasi dalam visi-misi tiap kepala daerah dan diturunkan ke program kerja masing-masing SKPD. Kampanye lingkungan jangan hanya wilayah Badan Lingkungan Hidup saja, tapi semua unit dan perangkat pemerintahan, dari level atas hingga ke bawah. Saya mengusulkan agar setiap unsur pemerintahan harus disadarkan dengan melakukan literasi lingkungan, pencerdasan tentang masalah lingkungan. Literasi adalah unsur terpenting dalam kampanye lingkungan, yang akan menjiwai semua aktor terlibat.

Misalnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), aspek apa yang harus dipahaminya? Tugas pokoknya tentu saja berkaitan dengan pencatatan penduduk dan data-data kependudukan. Saat dinas ini dilibatkan dalam kampanye lingkungan, berarti meluaskan tupoksi tersebut yang terkait isu lingkungan. Misal, setiap pencatatan penduduk harus disertai dengan arahan kesadaran lingkungan di tingkat keluarga. Kantor Urusan Agama (KUA) misalnya, tugasnya jangan hanya didominasi soal pernikahan warga saja, tapi bagaimana agar nilai-nilai

beragama dipahami sebagai sisi penting dalam menjaga lingkungan. Urusan banjir, kabut asap, sampah, itu juga bagian dari aktifitas beragama. Hal yang sama bisa pula dilakukan ke instansi lain, apapun tupoksinya.

Syarat utamanya adalah, niat baik dan visi yang jelas dari eksekutif daerah. Untuk itu, perlu penyadaran khusus kepada semua level pemerintahan, bahwa Sumsel sekarang sudah darurat masalah lingkungan. Saya yakin, jika soal lingkungan hanya diatur oleh BLH sendirian, masalah ini tak akan pernah selesai. Kampanye itu bersifat menyeluruh, dan terpenting lagi adalah bukti nyata, karena yang dibutuhkan sekarang adalah realisasi dari semua niat baik tersebut.

Sebagai contoh, akan menjadi blunder saja jika Pemkot Palembang selalu menyuruh warga buang sampah pada tempatnya, sementara fasilitas tempat sampah sangat minim sekali. Untuk buang sampah warga harus mencari dulu dimana TPS yang disediakan pemerintah. Ini kontradiktif sekali, karena itu harus komprehensif dan diikuti semua unsur yang ada.

Guna penyelamatan lingkungan, kampanye adalah salah satu metode, disamping ia harus ditunjang oleh aspek lain. Tetapi, semua adalah satu sistem, yaitu sistem pengelolaan lingkungan hidup. Andai salah satu unsur sistem itu bermasalah, maka terganggu seluruh sistem. Karena itu, mulailah dengan kesadaran bahwa kampanye lingkungan itu penting dan mendesak, bukan kerja satu atau dua orang, karena lingkungan ada dan dirasakan oleh semua pihak.

**) Tulisan ini sudah dimuat di HU Sriwijaya Post*

13

TALANG TUWO dan HARI BUMI

Tanggal 23 Maret 684 M, sekitar dua abad yang lalu, nenek moyang kita di masa Sriwijaya telah mencanangkan kepedulian dan keharusan untuk mengelola dan menjaga lingkungan alam. Bumi yang kita tempati, tanah yang didiami, air yang mengalir, sudah diperintahkan oleh raja agar diatur dan ditata sebaik mungkin. Tujuannya satu, untuk kemakmuran seluruh umat manusia. Nasehat ataupun mungkin berupa perintah itu, bisa kita baca pada pahatan tulisan di atas batu yang kemudian dikenal dengan Prasasti Talang Tuwo. Inilah bukti konkrit keberadaan Sriwijaya di Palembang, sekaligus juga menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan sudah dipikirkan dan dilakukan oleh leluhur negeri ini sejak bumi ini masih terasa begitu lapang dan longgar.

Prasasti Talang Tuwo yang ditemukan di Palembang, dekat Bukit Siguntang, adalah satu-satunya prasasti tentang keberadaan Kerajaan Sriwijaya yang teksnya cukup panjang. Sebelumnya sudah ada Prasasti Kedukan Bukit (682 M) yang mengukuhkan posisi Sriwijaya. Prasasti Talang Tuwo punya makna strategis, yaitu pengaturan lingkungan dan tata ruang secara berkelanjutan. Jika dibaca semua bait-bait dalam prasasti ini, yang sebelumnya sudah

diterjemahkan oleh Georde Coedes, isinya menegaskan tentang pentingnya memahami dan mengelola lingkungan hidup. Dalam bahasa Nurhadi Rangkuti, mantan Kepala Balai Arkeologi Palembang, ini disebutnya sebagai "kemakmuran".

Salah satu kutipan penting pada prasasti Talang Tuwo berbunyi "... Semoga yang ditanam di sini, pohon kelapa, pinang, aren, sagu, dan bermacam-macam pohon, buahnya dapat dimakan, demikian pula bambu haur, waluh, dan pattum, dan sebagainya; dan semoga juga tanaman-tanaman lainnya dengan bendungan-bendungan dan kolam-kolamnya, dan semua amal yang saya berikan, dapat digunakan untuk kebaikan semua makhluk, yang dapat pindah tempat dan yang tidak, dan bagi mereka menjadi jalan terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan ..." Kutipan di atas memberikan penjelasan penting bahwa ruang hidup ini harus ditata, dikelola, diatur, dan ditujukan untuk kebahagiaan/kemakmuran orang banyak. Kata-kata yang disebutkan sebagai titah baginda Sri Baginda Sri Jayanasa dalam pembangunan taman Sriksetra kemudian menjadi momentum penting yang harusnya tidak pernah dilupakan.

Makna terdalam dari prasasti tersebut adalah penjagaan terhadap bumi dengan segenap isinya. Bisa dibayangkan, di awal-awal tahun masehi, penguasa saat itu sudah punya pikiran jauh kedepan dalam memandang alam semesta. Masa-masa dimana hutan masih begitu luas, ruang masih begitu longgar, penduduk belum sepadat saat ini, penataan ruang yang baik dan ramah lingkungan, sudah dipikirkan dan sudah dilakukan. Inilah titik penting penghargaan terhadap bumi yang diatur dalam mekanisme kebijakan formal pemerintahan.

Nilai penting lain dalam prasasti Talang Tuwo adalah adanya tiga unsur penting dalam menata lingkungan dan alam semesta ini, yaitu Tata Ruang, Tata Kelola, dan Tata Manfaat. Naskah prasasti ini sudah menegaskan secara baik bahwa ruang-ruang yang ada harus diurus, ditata dan diatur sedemikian rupa. Dimana posisi taman dan bagaimana mengatur tanamannya, semua sudah dipikirkan. Begitu juga dalam hal pengelolaan, siapa yang bertanggungjawab dan prinsip-prinsip apa yang harus dipegang, juga dijelaskan. Terpenting lagi, ruang wilayah yang ada harus digunakan atau dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan semua umat, siapapun itu, baik warga Sriwijaya maupun warga lainnya.

Apabila kita lihat realitas persoalan lingkungan saat ini, tiga aspek tersebutlah yang selalu bermasalah. Akibatnya berbagai hal negatif melanda manusia, seperti kabut asap, kekeringan, tanah longsor, kelaparan, dan sebagainya. Penataan ruang tidak dilaksanakan secara baik, hanya untuk kepentingan ekonomi sesaat belaka. Terbukti, lahan gambut yang sejatinya harus dilindungi, dikonservasi, justru menjadi lautan perkebunan sawit ataupun hutan tanaman industri. Ruang yang harusnya dijadikan tempat penampungan air, justru menjadi ruko dan perumahan permanen. Begitupun, alam yang mestinya dikelola secara adil dan berbasiskan kearifan lokal masyarakat, justru dieksploitasi oleh kelompok pemodal besar. Efeknya, manfaat dari pengelolaan lingkungan, cenderung dinikmati segelintir orang saja, sementara eksek negatifnya menerpa semua kalangan.

Membaca dari hal tersebut, maka sebenarnya kita sudah tercerabut dari semangat dan spirit penataan lingkungan yang sudah digagas oleh para leluhur. Disinilah pentingnya mengembalikan spirit bumi untuk kemakmuran bersama,

sebagaimana Raja Sriwijaya menitahkannya. Momentum Prasasti Talang Tuwo di abad ke-7 M bisa menjadi momentum Hari Bumi, yang tidak saja untuk masyarakat Sumatera Selatan, tapi seluruh umat di muka bumi ini.

Momentum ini menjadi signifikan untuk dikedepankan karena digagas oleh sebuah kerajaan terbesar di nusantara yang pernah berkuasa meliputi kawasan Asia Tenggara, mulai dari Semenanjung Malaysia hingga ke Thailand. Artinya, titah penguasa Sriwijaya saat itu memberikan pengaruh pada kawasan Asia Tenggara. Titah raja saat itu, juga tidak menyebutkan satu kelompok masyarakat, tapi seluruh makhluk. Disinilah hari bumi bisa diterima secara logis karena pengaruh dari prasasti tersebut mencakup kewenangan raja yang begitu besar dan luas.

Dalam kajian lain hari bumi sering diidentikkan dengan fenomena Ekuinoks Maret, yaitu posisi matahari berada di garis Khatulistiwa. Ini pernah diusulkan PBB tahun 1969, melalui aktifis perdamaian John McConnel, sebagai momentum hari bumi. Ekuinoks sendiri adalah fenomena alam, berdasarkan perlintasan matahari. Hari bumi pernah pula dicanangkan tanggal 22 April, yang digagas oleh Gaylord Nelson tahun 1970. Dasarnya adalah fenomena musim semi di belahan bumi utara dan musim gugur di selatan. Sementara momentum dalam prasasti Talang Tuwo, bukan semata didasarkan fenomena alam, tetapi kesadaran dan kepedulian penguasa saat itu untuk menjaga bumi yang ada. Walaupun perhitungan sang raja kala itu, tetap tidak lepas dari fenomena matahari dan perputaran bumi. Kesadaran ini kemudian bukan sekedar kearifan lokal masyarakat, tetapi dilegalkan melalui kebijakan formal (titah) penguasa.

Apa yang sudah dicanangkan oleh Raja Sriwijaya sebenarnya juga menjelaskan bahwa segala teori-teori tentang etika lingkungan yang pernah dikenal selama ini, sudah didahului oleh leluhur masyarakat Bumi Sriwijaya. Aldo Leopold yang pernah menyebutkan tentang Etika Bumi (*land ethics*) di tahun 1949, jelas jauh setelah pemikiran penguasa Sriwijaya. Begitu juga Rene Descartes yang menyebutkan tentang Antroposentris, juga baru muncul belakangan. Apalagi tokoh-tokoh etika lingkungan seperti Arne Naess, David Rothenberg, Calicott, Chamberlain, dan sebagainya, semua baru muncul belakangan. Karena itulah, momentum hari bumi perlu kita kembalikan ke momentum Prasasti Talang Tuwo dari Kerajaan Sriwijaya.

Tugas bersama masyarakat Sumsel-lah untuk merumuskan nilai-nilai yang ada, bahkan sampai ke wilayah praktis. Setidaknya hal itu sudah coba dimulai beberapa waktu lalu oleh sekelompok seniman, jurnalis, akademisi dan arkeolog dari Tim Spirit Sriwijaya untuk menelusuri semangat dari Prasasti Talang Tuwo, hingga ke pembuatan replikanya. Satu hal yang terpenting, lingkungan tetap harus dikelola, bukan didiamkan atau diharamkan untuk diolah, tetapi harus dengan pertimbangan aspek manfaat bagi semua umat dan makhluk di muka bumi ini. Hal ini menjadi sangat kontekstual, ketika hampir setiap tahun masyarakat Sumsel diterpa kabut asap, banjir, tanah longsor, yang pangkal mulanya adalah pengelolaan lingkungan yang tidak memperhatikan hak-hak bumi ini. Bumi bukan tidak boleh diolah, silahkan saja, tetapi aspek manfaat bagi seluruh umat manusia harus menjadi prasyarat utama. Semoga spirit Prasasti Talang Tuwo bisa diaplikasikan pada era sekarang ini.

14

SPIRIT LINGKUNGAN DARI TALANG TUWO

Beberapa waktu lalu, sejumlah kalangan di Sumatera Selatan mencoba membangkitkan batang terendam, menelusuri keberadaan Prasasti Talang Tuwo, yang diyakini dibuat semasa Kerajaan Sriwijaya, Abad ke-7 M silam. Lokasinya berada di sekitar daerah Talang Kelapa saat ini. Prasasti aslinya sendiri sudah lama dipindahkan ke Arsip Nasional Jakarta. Tetapi lokasi ditemukannya prasasti tersebut, hanya sebagian kecil yang tahu tempatnya.

Prasasti Talang Tuwo bisa dikatakan adalah salah satu bukti sejarah terbesar yang ditinggalkan oleh Kerajaan Sriwijaya, karena berisi tulisan yang cukup panjang dibandingkan prasasti lain yang sudah ditemukan sebelumnya. Isi dari prasasti ini juga memiliki perbedaan dari prasasti lain, yaitu fokus pada penataan lingkungan dan pembuatan taman-taman. Intinya bicara tentang bagaimana lingkungan harus dikelola, ditata dan dimanfaatkan. Baginda Sri Jayanasa adalah tokoh utama yang disebutkan dalam prasasti tersebut, yang memelopori pendirian Taman Sriksetra.

Masalah sejarah atau pentingnya Prasasti Talang Tuwo sebagai bukti kebesaran peradaban jaman dulu, tentunya ini sudah

banyak diketahui publik. Para sejarawan jauh hari sudah menggali dan mengkaji hal tersebut. Tetapi makna apa yang disampaikan oleh batu bertulis tersebut dan apa relevansinya terhadap persoalan masyarakat saat ini, itu yang minim diinformasikan. Ini menjadi penting karena sejatinya spirit yang sudah dibangun oleh para leluhur menjadi begitu aktual, jika melihat realitas masalah lingkungan sekarang.

Prasasti ini mengawali dengan mengatakan bahwa "... Semoga segala yang ditanam di sini, pohon kelapa, pinang, aren, sagu dan bermacam-macam pohon, buahnya dapat dimakan, demikian pula bambu haur, wuluh dan pattum, dan sebagainya; dan semoga juga taman-taman lainnya dengan bendungan-bendungan dan kolam-kolamnya, dan semua amal yang saya berikan, dapat dipergunakan untuk kebaikan semua makhluk, yang dapat pindah tempat dan yang tidak, dan bagi mereka menjadi jalan terbaik untuk mendapatkan kebahagiaan..." Naskah di atas dikatakan adalah niat dari Baginda Sri Jayanasa terhadap taman Srisektra yang akan dibangun.

Perlu dicatat di sini, tulisan pada batu tersebut ditulis tahun 684 M, 1.332 tahun yang lalu, seabad lebih. Mari kita membalikkan ingatan, mencoba membayangkan seperti apa Palembang ini pada masa tersebut. Yang terlintas adalah pepohonan besar dan kecil, hutan yang lebat, sungai-sungai jernih, besar maupun kecil saling melintangi daerah ini. Berbagai hewan buas dengan mudahnya hidup dan berkembang biak, hewan-hewan yang mungkin tidak ditemukan lagi saat ini, hidup secara bebas. Semak belukar dan hutan belantara masih menyelimuti daerah-daerah sekitar Talang Kelapa, Sukarami, Alang-Alang Lebar dan lainnya. Keramaian mungkin hanya ada di sekitar keraton kerajaan saja, selebihnya

pondok-pondok yang dijadikan rumah penduduk. Mungkin ilustrasi itu tidak terlalu tepat, tetapi saya yakin tidak jauh berbeda dengan apa yang kita bayangkan.

Pada masa itulah, di saat-saat semuanya masih serba longgar dan lapang, Sang Baginda sebagai pengambil kebijakan tertinggi sudah menitahkan penataan lingkungan yang apik dan asri. Makna mendasar adalah kesadaran bahwa lingkungan alam ini adalah untuk kemakmuran umat manusia, bukan segelintir orang saja. Tidak untuk kerabat kerajaan saja, tidak pula untuk pemilik modal, tapi untuk semua orang. Sudah ada kesadaran bahwa lingkungan alam ini akan diwariskan untuk generasi mendatang, yang dalam bahasa sekarang disebut *sustainable*/berkelanjutan.

Tetapi, realitas yang disampaikan dalam amanat Prasasti Talang Tuwo, menjadi hilang maknanya di masa sekarang. Jarang terdengar gagasan penyelamatan dan perlindungan lingkungan dari petinggi daerah. Kalaupun ada, cenderung menjadi inkonsisten dengan realitas yang ada. Tahun 2014, kita pernah dengar bahwa tahun 2015, Sumsel harus zero asap. Faktanya, 2015 justru kabut asap semakin tebal. Maraknya pembukaan kebun sawit di areal bergambut, jelas merusak ekosistem yang ada, tapi toh tetap berlangsung. Sudah sama-sama diketahui bahwa eksploitasi batubara secara besar-besaran tidak memberikan efek positif dominan bagi masyarakat setempat, namun *toh* permukaan bumi semakin gencar digali untuk dikeduk batubaranya. Kemiskinan jadi meningkat, kriminalitas naik, kemacetan jalan pun semakin parah. Lantas, dimanakah kemakmurannya?

Era otonomi daerah, sejak dicanangkan di awal tahun 2000-an dulu, diharapkan bisa membangkitkan ekonomi masyarakat yang

berlandaskan pada kekayaan sumber daya alam. Maka dilangsungkanlah berbagai pemilihan kepala daerah secara langsung, yang diharapkan akan memperoleh legitimasi kuat dari masyarakat setempat. Sayangnya, dari sekian banyak kepala daerah yang sudah terpilih, minim sekali yang mengedepankan vis penyelamatan lingkungan. Masyarakat tak pernah diajak untuk peduli lingkungan, karena dari sang kepala daerah sendiri tidak punya visi utama ke arah sana. Kalaupun ada yang tertulis, fakta di lapangan selalu bertolak belakang.

Masalah lingkungan, baru menjadi wilayah kebijakan pada saat malapetaka itu sudah dirasakan. Artinya, *grand design* yang jelas tentang lingkungan, belum terlihat. Ini patut dicermati, karena mengelola lingkungan hidup yang baik, tidaklah bisa dilakukan secara parsial, harus interkoneksi antar masing-masing instansi. Semisal, BLH daerah selalu meributkan soal limbah dan pencemaran, tetapi lembaga perizinan terus mengeluarkan rekomendasi. Ini menjadi inkonsisten dan masalah lingkungan tak pernah selesai.

Grand design adalah titik terpenting dalam pengelolaan lingkungan. Didalamnya sudah harus tercantum berbagai potensi, masalah, strategi, tahapan-tahapan, termasuk program kampanye lingkungan. Rancangan ini semestinya dijadikan panduan bersama tentang pengelolaan LH di sebuah wilayah, bukan hanya kewenangan satu SKPD semata. Karena itu, visi seorang Kepala Daerah menjadi penting.

April 2016 ini, BMKG sudah memprediksi akan dimulainya masa kemarau. Artinya dalam beberapa bulan kedepan, ancaman kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, sudah didepan mata.

Pemerintah memang sudah menyiapkan berbagai strategi, seperti program Desa Peduli Api, kanalisasi rawa, penyelamatan kawasan gambut, hingga membentuk tim pendeteksi dini titik api. Tentang ini, kita patut apresiasi, karena sudah ada program sedia air sebelum kemarau. Tetapi sekali lagi, program-program yang ada tersebut, cenderung bersifat menunggu, menanti jikalau kebakaran itu terjadi. Tekanannya bukan pada wilayah pencegahan.

Yang diinginkan sebenarnya adalah upaya yang bersifat interkoneksi untuk menjaga dan mengamankan kawasan di Sumsel dari resiko kebakaran dan kabut asap. Sifatnya bukan menunggu, tetapi jemput bola agar masalah tidak terjadi. Oleh karena itu, kebijakan yang bersifat proaktif dan komprehensif sangat diperlukan. Apa yang harus dilakukan? Titik terpenting adalah, kampanye lingkungan ke semua elemen dan dilakukan oleh semua unsur, pelibatan masyarakat menjaga kawasannya sejak dini dengan memanfaatkan untuk lahan produktif, membatasi ekspansi perusahaan perkebunan besar dengan alasan apapun, konsistensi penegakan hukum dengan memunculkan kepala daerah yang "berani". Beberapa hal di atas harus dijadikan dasar dalam pembuatan *grand design*, sehingga tidak lagi seperti pencitraan semata.

Spirit untuk menyelamatkan lingkungan di bumi Sriwijaya ini, harus dijadikan spirit bersama, disinilah pentingnya kampanye lingkungan yang sehat. Akan sangat bijak dan baik sekali, andai pemerintah daerah memiliki komunitas/tim khusus kampanye lingkungan yang punya kewenangan lintas instansi. Kampanye lingkungan bukan sekedar memasang spanduk atau himbauan agar tidak merusak lahan, tetapi dimulai dari aksi nyata yang ada di level

kebijakan. Kampanye bukanlah membangun opini publik, tapi membuktikan kepada publik.

Spirit Talang Tuwo sudah bicara itu. Inilah yang seharusnya mengilhami berbagai kebijakan yang dibuat. Persoalannya sekarang, bagaimana pelaku kebijakan di Sumsel, memandang prasasti tersebut sebagai benda yang punya makna faktual saat ini, bukan sekedar benda bersejarah yang hanya tersimpan di museum. Aktualisasi Prasasti Talang Tuwo harus dimulai, dan kebijakan pemerintahlah yang akan menjadi ujung tombaknya.

**) Tulisan ini sudah dipublikasikan di HU Sriwijaya Post,
Rabu 13 April 2016*

15

BELAJARLAH KE DESA

Suatu ketika saya pernah melihat dan mendengar demonstrasi mahasiswa di sebuah kampus. Mereka mengajukan beragam tuntutan yang intinya ingin ada perubahan di kampus itu agar menjadi lebih baik. Tetapi saya kaget ketika mendengar salah satu tuntutan adalah, hapuskan mata kuliah Kuliah Kerja Nyata (KKN). Alasannya karena mereka berasal dari program studi komputer dan sistem informasi, jadi tidak ada hubungan dengan orang dusun. Selama ini KKN selalu diadakan ke dusun-dusun (desa), dan mereka berkata bahwa jika mereka tamat nanti, mereka juga tidak akan bekerja di dusun. Karena itu, bagi program studi mereka (komputer dan sistem informasi), KKN ke dusun itu tidak ada gunanya sama sekali, karena mereka bukan “wong dusun”.

Terus terang, apa yang dituntut oleh mahasiswa di atas membuat miris dan menjadi sebuah tanda tanya sendiri, beginilah sekarang asumsi masyarakat (apalagi kalangan muda berpendidikan) tentang desa. Muncul semacam asumsi yang lebih bernuansa *stereotype* bahwa desa itu adalah daerah yang lebih rendah, kolot, tidak maju, dan parahnya, dianggap tidak punya apa-apa sama sekali untuk dijadikan tempat belajar.

Saya tidak akan membahas soal penting atau tidaknya mata kuliah KKN di perguruan tinggi, tetapi mari kita lihat bagaimana sebenarnya yang dikatakan desa dan mengapa kita tidak boleh melupakan hakekat desa itu. Ini adalah titik dasar pemahaman untuk membawa kita nantinya pada kesimpulan umum bahwa di desa itulah sumber pengetahuan yang sebenarnya. Pengetahuan tentang alam semesta, pengetahuan tentang ikatan sosial kemasyarakatan, pengetahuan tentang lingkungan hidup, serta pengetahuan tentang makna manusia itu sendiri.

Secara konseptual, istilah desa bisa kita acu pada pandangan Kartohadikoesoemo (1984;49) sebagai kesatuan masyarakat hukum yang telah ada jauh sebelum negara ini ada, berhak mengatur rumah tangga sendiri, memilih pemimpin sendiri, dan mengatur pemerintahannya sendiri. Sedikit banyak ini identik juga dengan model-model sistem pemerintahan tradisional yang dikenal oleh berbagai masyarakat di Indonesia. Pemerintahan Marga di Sumsel, Nagari di Sumbar, Kampong di Aceh, adalah bentuk-bentuk riil dari desa yang sebenarnya. Desa yang kemudian menjadi akar terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia ini.

Titik awal negara ini ada pada desa. Itu realitas yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa kemudian terjadi perubahan, pergeseran, dinamika, sehingga kemudian konsep desa yang asli, sebagaimana pandangan di atas sudah sangat jarang kita temukan, itu adalah fakta lain. Modernisasi, pembangunan, perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat, termasuk berbagai kebijakan pemerintahan, menjadi hal yang kemudian menggerus keaslian desa tersebut. Pada wilayah ini, kita juga harus mengakui bahwa komunitas desa bukanlah komunitas yang statis, tertutup dan tidak

menerima perubahan. Desa-desanya pada berbagai hal memang sudah mengalami perubahan penting. Dalam bahasa ahli-ahli Sosiologi, telah terjadi proses industrialisasi besar-besaran di wilayah pedesaan ini.

Mengenai ini, seorang pakar lingkungan, Otto Soemarwoto pernah berkata bahwa realitas perubahan itu, justru disebabkan oleh dominasi komunitas perkotaan, yang pada banyak hal melakukan dominasi berbagai pengetahuan ke wilayah desa. Atas nama pengetahuan dan kemajuan, desa kemudian didorong agar berubah. Dorongan terbesar adalah menjadikan desa sebagai objek "buangan" dari berbagai temuan baru di masyarakat kota. Maka berkembanglah asumsi besar bahwa jika desa ingin maju, jadilah seperti masyarakat kota. Ini yang kemudian dikenal dengan istilah modernisasi.

Pola-pola untuk merubah desa ini masuk dalam berbagai sektor. Mulai dari teknologi pertanian, pendidikan, media massa, kebijakan pemerintah, sampai pada mekanisme pemerintahan di desa itu sendiri. Desa kemudian menjadi objek pembangunan, yang pada beberapa segi justru tidak disadari oleh orang desa itu sendiri. Tahu-tahu mereka sudah berubah. Hanya dalam jangka waktu singkat, misal lima tahun, seorang warga desa sudah bisa berkata, "dulu, lima tahun yang lalu, daerah ini tidak seperti ini...sekarang sudah jauh berbeda."

Realitas perubahan sosial memang menempatkan desa sebagai objek perubahan. Pendekatan difusi inovasi, yang mendominasi pendekatan pembangunan di tahun 1980-an, menjadi salah satu motor utama penggerak perubahan. Sayangnya pula, perubahan itu hanya berkuat di sektor hilir, yaitu apa yang bisa

dirubah dan apa yang bakal di dapat. Tidak pernah ada upaya untuk mempersiapkan masyarakat dari awal, bahwa seandainya ada perubahan besar, apa yang mesti diperhatikan. Hampir tidak ada upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Maka jadilah realitas seperti sekarang, dan berkembang pesat pula di generasi muda, kalau ingin dikatakan maju, jadilah seperti orang kota, jangan jadi *wong dusun*. Desa semakin termarginalkan, bahkan oleh orang desa itu sendiri.

Akan tetapi, apabila kita mau menelisik lebih jauh, tetap akan ditemukan bahwa di desa itulah sebenarnya sumber pengetahuan terbesar, terutama pengetahuan yang berkaitan dengan alam semesta, termasuk bagaimana menempatkan lingkungan pada posisi sejajar dengan kepentingan manusia. Orang desa sering mengatakan istilah, *ajaran puyang*, sebenarnya ini berkaitan dengan aspek pengetahuan dasar masyarakat desa, yang tentu saja tidak akan mudah dipahami oleh orang yang jarang, apalagi tidak pernah masuk ke desa.

Saya pernah ke beberapa desa di Semende Darat Ulu dan Tengah, Kabupaten Muara Enim. Wilayah ini berada di dataran tinggi Bukit Barisan. Kelaziman warga disini memanfaatkan daerahnya untuk ditanami padi sawah dan kopi. Sebagai tanaman sela ada ragam sayur-sayuran, yang cukup untuk konsumsi rumah tangga. Walaupun kopi dan padi cukup dominan, tapi ini bukan pertanian monokultur. Tanaman utama yang termasuk warisan dari *puyang* sebenarnya adalah padi, kopi justru adalah tanaman yang dikenalkan oleh kaum pendatang terutama kolonial Belanda.

Hal menarik bagi saya adalah padi yang ditanam adalah jenis *jambat teghas*, jenis padi lokal yang sudah berusia ratusan tahun.

Ciri khasnya berbatang tinggi dan berusia panjang (8 bulan panen). Akibatnya, pola persawahan di Semende Darat hanya satu kali setahun, beda dengan daerah lain yang sekarang sudah mengenal panen hingga 3 kali setahun. Mengapa *jeme Semende* ini tetap bertahan sekali setahun? Jawaban singkat mereka, ya inilah ajaran *puyang*. Tidak ada yang berani melanggar karena hasilnya tidak akan bagus.

Benarkah itu semata-mata ajaran *puyang* ? Saya coba telusuri melalui penjelasan ilmiah, terutama sisi ilmu pertanian. Fakta kemudian menunjukkan, bahwa daerah Semende Darat Ulu dan Tengah, berada di ketinggian mencapai 1.400 m dpl. Untuk daerah seperti ini, sinar matahari menjadi minim, kelembapan udara cukup tinggi dan curah hujan cenderung banyak. Padi lokal yang berbatang tinggi dan daunnya banyak, akan sangat baik tumbuh disini, karena memiliki kemampuan menyerap dan menyimpan sinar matahari dalam jumlah banyak. Sebaliknya, padi jenis unggul yang berbatang pendek, sulit tumbuh baik karena minim dalam penyerapan sinar matahari. Sementara tanaman padi butuh sinar matahari. Oleh karena itu, jika mencoba mencanangkan program padi 3 kali setahun di daerah ini, dipastikan tidak akan berhasil. Inilah kiranya makna *ajaran puyang* versi warga Semende tadi.

Selain itu, jawaban ringkas dari warga juga bisa dijadikan acuan bahwa, "jika kami bersawah tiga kali setahun, kapan lagi nak ngurus kopi, habis oleh padi saja waktu." Ini punya makna dalam, yaitu sistem pertanian multikultur dan ketahanan pangan. Sejalan pula dengan filosofis padi bagi warga Semende yaitu sebagai tanaman simbol kesejahteraan dan kekuasaan dalam sebuah keluarga. Padi bukanlah komoditas dagang, tapi lambang

ketahanan pangan sebuah keluarga. Sebaliknya, kopi justru adalah tanaman komoditas ekonomis, untuk diperjualbelikan. Orang Semende sering berseloroh, "kalau nak beli TV atau motor, buatlah kebun *kawe* (kopi), jangan jual padi."

Dua hal pokok di atas, hanya akan ditemukan di desa. Saya yakin desa-desa lain punya gagasan dan kebiasaan yang hampir sama, yaitu punya mekasmisme tersendiri untuk bertahan hidup, dalam kondisi apapun. Tumpuannya adalah pada alam semesta, lingkungan hidup disekitar mereka. Karenanya, memperlakukan alam dengan baik, adalah kunci bertahan hidup bagi orang desa. Disinilah menjadi jelas makna komunikasi lingkungan bagi orang desa, yaitu memahami realitas lingkungan sebagai satu kesatuan dengan masyarakat dan itu senantiasa diwariskan ke generasi berikutnya.

Sekali lagi, semua itu hanya bisa ditemukan di desa, tempat asal mula manusia di negara ini. Kita tentu menjadi sangat prihatin jika banyak di antara generasi muda saat ini, yang enggan dan bahkan alergi untuk masuk ke desa. Sebagaimana contoh di awal tulisan ini, mahasiswa yang enggan ke desa, pada akhirnya akan melahirkan ilmuwan-ilmuwan menara gading, tidak paham dengan realitas sosial, sibuk dengan ilmunya sendiri. Ilmuwan yang melawan pesan dari nenek moyangnya sendiri bahwa 'Alam Berkembang Jadikan Guru."

**) Tulisan ini sudah pernah diterbitkan Tabloid Desa, edisi Desember 2015.*

16

HAKIM SEBAGAI KOMUNIKATOR

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Parlas Nababan menjatuhkan vonis yang membatalkan semua tuntutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH), 30 Desember 2015 lalu. Akibatnya, PT BMH yang awalnya dituduh terlibat dalam pembakaran lahan dan hutan tahun 2014, yang menjadi salah satu penyebab kabut asap di Sumsel, dinyatakan tak bersalah. Jauh sebelum kasus Hakim Parlas, pernah pula hakim Sarpin mengambil keputusan untuk menerima pra peradilan yang diajukan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, yang berakibat pada bebasnya sang jenderal dari status tersangka korupsi yang sudah ditetapkan KPK. Selain dua kasus yang cukup menyita perhatian publik ini, banyak pula kasus-kasus lain yang dinilai banyak pihak mencederai rasa keadilan publik. Intinya adalah, sang hakim dianggap publik tidak mengambil keputusan secara adil.

Buntut dari keputusan tersebut, publik ramai-ramai mencera sang hakim, mencaci maki, mem*bully* dengan berbagai cara. Yang paling heboh tentu saja melalui media sosial, seperti *facebook*, *twitter*, *WA*, dan sebagainya. Hampir semuanya memberikan

tohokan yang sama, hakim telah tidak adil dalam mengambil keputusan. Pada kasus PT BMH, kekecewaan terhadap Hakim Parlas, tidak saja melalui media sosial, di beberapa tempat di Kota Palembang, ditemplei poster bergambar Hakim Parlas, dilengkapi dengan kalimat yang menyatakan kekesalan terhadap dirinya.

Apa yang bisa dimaknai dari semua peristiwa tersebut? Para pakar hukum tentu saja akan membahasnya dari sisi hukum, membahas materi gugatan dan proses peradilan yang berlangsung. Lewat kaca mata dan sudut pandang masing-masing, banyak analisa akan muncul. Tetapi, selain dari soal hukum, mari kita lihat sisi lain. Saya menyebutnya bahwa saat ini, hakim, mau tidak mau, sudah harus memposisikan diri sebagai seorang komunikator dalam komunikasi publik. Segala keputusan hakim, terutama untuk kasus-kasus yang berhubungan dengan kepentingan publik, akan disoroti dan dicermati. Masyarakat akan memaknai segala keputusan, dan makna itu akan dihubungkan dengan pengetahuannya tentang kasus tersebut. Benar atau tidaknya makna tersebut, tidaklah penting, yang jelas publik akan memberikan interpretasinya sendiri.

Hal seperti ini tentu saja menjadi sangat dilematis. Bagi hakim, selalu ada dua pilihan ketika memutuskan sesuatu, dipuja atau justru dicerca. Ia akan dipuja ketika putusannya memiliki korelasi dengan opini publik yang sudah terbangun sejak awal, sebaliknya ia akan dicerca dan dicemooh ketika itu berbeda. Hakim Parlas dan hakim Sarpin sudah merasakan itu, dan banyak contoh kasus lainnya, seperti hakim Imron Anwari yang pernah membebaskan tersangka bandar narkoba. Resiko profesi, itulah jawaban terbaik untuk membesarkan hati.

Pada konteks inilah saya ingin katakan bahwa saat ini, mau tidak mau, suka tidak suka, hakim sudah menjadi seorang komunikator, orang yang berkomunikasi dengan publik melalui profesinya, dan tertuang dalam putusannya. Memang dalam Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim yang sudah disepakati oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, disebutkan bahwa hakim bersifat mandiri, independen dan tidak boleh terpengaruh oleh apapun sehubungan dengan perkara yang disidangkannya. Bahkan secara tegas disebutkan bahwa hakim tidak dibenarkan memberikan keterangan apapun sehubungan perkara. Artinya hakim hanya berbicara pada saat persidangan saja. Di luar itu, hakim tidak boleh memberikan komentar, termasuk pula disini adalah membela diri dari cemoohan masyarakat.

Tetapi disini pulalah kita harus mengakui bahwa perkembangan rezim yang berlaku, perubahan iklim politik dan sosial masyarakat, menyebabkan masyarakat memiliki kuasa baru untuk ikut menilai putusan seorang hakim dan bahkan menilai sang hakim. Persidangan yang diharuskan bersifat terbuka, akses lembaga media massa yang begitu mudah, akses informasi yang berlimpah, serta adanya jejaring media sosial, memungkinkan publik memperbincangkan suatu kasus dengan banyak orang di seluruh dunia, berpengaruh sekali terhadap kiprah lembaga penegak hukum ini. Kesakralan lembaga kehakiman, yang dijamin dulu begitu ditakuti, sekarang justru sudah mencair dan orang bisa berkata apa saja tanpa takut ataupun merasa terancam.

Saat ini, kiranya sulit bagi hakim untuk tetap berlingung dan berpegang pada norma kode etik yang menyebutkan bahwa hakim dilarang berkomentar. Manusiawi saja, orang mana yang akan tahan

jika dihina, di*bully*, dicaci dengan berbagai macam perkataan. Pada titik ini, harus diakui bahwa hakim itu juga manusia, punya keluarga, punya lingkungan sosial, dan sebagainya. Tetapi memang dilema itu akan tetap muncul, di satu sisi ada tuntutan publik, disisi lain ada realitas fakta persidangan yang harus dicermati hakim sebagai dasar pengambilan putusan dan itu diikat pula oleh Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim.

Oleh karena itu, memahami bahwa posisi hakim saat ini sudah menjadi seorang komunitor harus dilihat dengan baik. Dalam keilmuan komunikasi, komunikator ini adalah orang yang melakukan komunikasi, dan dalam perspektif komunikasi linear ataupun interaksional, komunikator ini adalah pihak yang memulai komunikasi dan kemudian direspon oleh pihak lain. Sementara inti dari komunikasi sendiri adalah persepsi, yang disejajarkan pula dengan istilah pemaknaan pesan. Komunikasi sudah dianggap terjadi, saat pesan sudah dimaknai. Disadari atau tidak, diketahui atau tidak oleh pelakunya, saat pihak lain memaknai aktifitas orang lain, maka saat itulah komunikasi sudah terjadi.

Menjadi jelas, bahwa saat seorang hakim membacakan putusannya di depan banyak orang, disiarkan stasiun TV atau dituliskan pada berita di koran atau disampaikan pula oleh radio, maka saat itu komunikasi sudah terjadi. Indikasinya adalah publik sudah memberikan penilaian/pemaknaan terhadap hakim tersebut. Hakim mungkin tidak menyadari bahwa ia sedang berkomunikasi dengan publik, tetapi sebenarnya itu sudah terjadi. Oleh karena itu, jangan pernah menganggap tidak ada orang lain, karena publik senantiasa menyoroti. Munculnya *bully* terhadap hakim di media

sosial, termasuk penempelan poster di ruang publik, adalah bentuk pemaknaan publik terhadap sang hakim.

Pada dasarnya, hakim bisa menjawab hal itu dengan berpegang teguh pada norma yang ada, serta mematuhi ketentuan perundang-undangan itu sendiri. Aspek terpenting adalah taat pada prinsip dasar etika hakim, yang dua hal terpenting yaitu prinsip arif dan bijaksana, serta prinsip bersikap profesional. Hakim dituntut untuk senantiasa melek terhadap semua realitas yang ada, termasuk realitas di masyarakat, bukan hanya pada bukti di persidangan semata. Pengetahuan hakim terhadap kenyataan di masyarakat, tentu saja akan ikut bermain pada wilayah subjektifitasnya. Memang, realitas di masyarakat, termasuk opini publik, bersifat relatif dan cair, bahkan juga bisa menjadi bias. Disinilah perlunya pengetahuan dan kearifan seorang hakim. Mengapa ini perlu dipertimbangkan? Karena hakim sekarang sudah menjadi seorang komunikator, yang tidak lagi sekedar memakai kacamata kuda pada persidangan semata.

Apalagi untuk kasus-kasus tertentu, seperti kasus lingkungan, fakta-fakta lain di masyarakat sangat berhubungan. Lingkungan berhubungan dan dirasakan kerusakannya oleh masyarakat. Persoalan lingkungan tidak pernah berdiri sendiri, karena ia adalah sebuah ekosistem, yang berkait dan berkelindan dengan banyak aspek. Karenanya, kebenaran versi masyarakat perlu pula dipertimbangkan.

Sekali lagi, semua ini akan menjadi sangat dilematis dan mungkin jadi perdebatan, tetapi tak ada pilihan lain bahwa hakim sekarang ini sudah menjadi seorang komunikator, dan itu mesti disadari oleh para hakim. Keputusan seadil-adilnya tetaplah yang

nomor satu, karena itu adalah tugasnya hakim. Harapan kita, dengan dengan memahami posisi sebagai komunikator, akan semakin meningkatkan kualitas keputusan yang adil tersebut. Semoga.

**) Tulisan ini sudah dimuat di harian Sriwijaya Post,
Senin 18 Januari 2016*

17

PERLU, “EKSPLOITASI” LINGKUNGAN DI TV

Hiruk pikuk di media massa saat ini, khususnya televisi (TV), ramai menyuguhkan isu-isu terkait politik. Perhatian publik mau tidak mau tersedot pada carut marutnya dunia politik dan hukum di Indonesia. Seakan-akan Indonesia ini akan segera tamat, sehingga begitu besarnya porsi tayangan yang harus disajikan. Padahal di sisi lain, banyak masalah publik yang luput ataupun mendapat perhatian kecil dari media TV. Salah satunya adalah isu lingkungan. Lingkungan baru akan mendapat porsi ketika sudah ada korban yang jatuh, terjadi longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan banjir.

Dilihat dari sisi kajian kritis terhadap media massa, khususnya TV, sebagaimana gagasan dari media TV bukanlah wilayah netral. Selalu ada kepentingan di balik penayangan sebuah peristiwa. Bisa kepentingan secara politis, ideologis, dan tentu saja kapitalis/modal. Semuanya bisa berkelindan menjadi satu, dan dari perspektif ekonomi politik media, posisi media sebagai industri menjadi faktor penting. Melihat TV sebagai sebuah institusi ekonomi, maka yang muncul adalah tayangan-tayangan yang akan

mendatangkan keuntungan secara ekonomis, pesan kapitalis sangat menonjol sekali.

Berdasarkan pertautan dari TV sebagai ranah industri, maka mengacu pada pandangan Marx, semua yang terjadi hakekatnya adalah proses eksploitasi dengan sasaran akhir keuntungan secara ekonomis, dan berpotensi kuat untuk diikuti kepentingan ideologis. Dari sudut pandang ini, maka sangat wajar kalau kita mengklaim bahwa, tayangan agama di TV, kelompok pengamat, intelektual, anak-anak, etnis, dan sebagainya, semua adalah dalam kerangka eksploitasi ekonomi. Tak heran jika muncul asumsi, dalam sesaat anda bisa dijadikan orang terkenal melalui TV, namun dalam sesaat juga anda bisa dibenamkan ke titik terendah. Hitungan keuntungan ekonomis adalah titik pentingnya.

Menyadari pada wilayah itu, maka isu-isu yang diangkat oleh TV selalu berubah-ubah. Selagi itu masih memiliki nilai ekonomis, ia akan terus diangkat. Sebaliknya, jika tak lagi punya nilai jual, ia akan hilang. Memang semua tidak sesederhana itu, karena TV juga punya strategi khusus untuk menjadikan sesuatu punya nilai jual. Akan tetapi, apapun itu, kepentingan terbesar ada pada lembaga penyiaran tersebut. Bisa dibuktikan, bagaimana sebuah sinetron yang dari sisi konten jauh dari unsur mendidik, namun tetap dianggap layak tayang (layak jual), bahkan hingga sampai 1.500 episode.

Menyelesaikan masalah-masalah seperti itu tidaklah mudah, bahkan bisa dikatakan mustahil, karena era sekarang memang era media. Rezim kebebasan informasi menutup peluang untuk membatasi media ke wilayah tersebut. Lebih rumit lagi, banyak kaum intelektual, pengamat, termasuk akademisi, ikut bermain

dalam wilayah tersebut. Mereka seperti menikmati pula eksploitasi yang dilakukan TV.

Pada titik ini, kita menjadi prihatin dan miris, di tengah-tengah negeri yang sebenarnya sudah dalam wilayah darurat lingkungan, darurat bencana, justru porsi tayangan tentang isu lingkungan sangat minim sekali. Andai pun ada, tayangannya adalah tentang peristiwa bencana, yang pada satu sisi ini tidak menimbulkan kesadaran lingkungan. Melalui perspektif kritis, kita bisa katakan, karena isu lingkungan tidak punya nilai jual.

Publik harus menerima dan mengerti bahwa yang terjadi sekarang ini adalah eksploitasi realitas oleh TV. Karena itu walau sedikit apatis, yang bisa dilakukan adalah menerima dan ikut bermain dalam wilayah eksploitasi tersebut. Yang bisa dilakukan adalah mendorong stasiun TV agar eksploitasi dilakukan pada wilayah kepentingan publik luas dan punya aspek keberlanjutan yang positif bagi masyarakat. Salah satunya adalah isu lingkungan.

Mungkin akan jadi perdebatan serius jika isu lingkungan masuk ranah eksploitasi di TV, namun dalam kondisi darurat bencana seperti saat ini, kita masih bisa menerima eksploitasi itu dilakukan. Hal penting adalah bagaimana agar kesadaran dan kewaspadaan publik terhadap masalah lingkungan bisa dimunculkan. Tentu kita berharap agar wilayah eksploitasi itu tidak justru menjadi bumerang bagi upaya pelestarian lingkungan, karena rezim pemilik bisnis media saat ini, juga banyak yang beroperasi di wilayah rentan terhadap problem lingkungan.

Mengenai strategisnya soal lingkungan, kiranya tak ada yang bisa membantah. Dalam beberapa tahun terakhir, bisa disaksikan peristiwa rutin yang terjadi, di musim hujan ada bencana banjir dan tanah longsor. Sementara di musim kemarau, kebakaran hutan,

kabut asap, kekeringan, selalu datang. Sebagai catatan, data dari BNPB menyebutkan bahwa untuk daerah Jawa Barat saja terjadi sebanyak 322 bencana alam sepanjang 2014. Bentuk yang paling dominan adalah banjir dan tanah longsor, bencana yang disebabkan oleh perilaku manusia. Jumlah ini meningkat dibanding tahun sebelumnya (2013) yang tercatat sebanyak 286 kejadian. Sangat dimungkinkan di tahun 2015 ini statistiknya akan terus meningkat.

Lantas kemanakah TV ? Ini pertanyaan kritis yang membutuhkan dorongan kuat dari publik untuk menjawabnya. Dalam diskursus ekonomi politik media, yang diyakini sudah sulit dihentikan, kita hanya berharap agar media TV lebih bisa untuk intens melirik sisi krusial ini. Tidak apalah isu lingkungan di eksploitasi oleh pemberitaan TV, publik jugalah nanti yang akan mengawal. Diharapkan ini nanti akan masuk dalam wilayah opini publik yang lebih luas.

Menyelesaikan persoalan lingkungan memang bukan tugas media saja. Tetapi media TV berperan besar dalam membentuk opini publik, mendorongnya pada wilayah kebijakan publik. Walaupun ada eksploitasi, setidaknya tidak akan terlalu berefek signifikan terhadap persoalan sosial budaya maupun ekonomi masyarakat. Masalah lingkungan adalah masalah konkret, bisa dicermati lewat panca indera manusia, tidak bisa diabu-abukan. Efeknya langsung nyata. Karena itu, andaikan eksploitasi pemberitaan nantinya mengarah pada kepentingan bisnis pemilik media, namun efek negatif kerusakan lingkungan tidak akan bisa ditutu-tutupi. Kawalan dari elemen publik, baik penggiat lingkungan, komunitas adat, pemerintah, akademisi, akan bisa mendorong kepentingan publik luas sebagai acuan mendasar.

18

KOMUNIKASI LINGKUNGAN dan CERITA RAKYAT

2 November 2013 lalu, saya tampil sebagai pembahas buku berjudul "Cerita Rakyat Batanghari Sembilan: Lahat" karya dari Frieda Amran dan Sofie Retorika. Awalnya saya agak ragu dengan beberapa alasan. *Pertama*, saya bukanlah seorang sastrawan apalagi kalau mesti disebut seorang budayawan. *Kedua*, saya juga bukanlah seorang sejarawan, kendati kerap juga membaca-baca sejarah Sumatera Selatan. *Ketiga*, dikarenakan dua hal di atas, saya sendiri belum pernah menulis buku atau mengulas tentang cerita rakyat. Namun tawaran yang datang, sangat menarik dan menantang. Setelah berpikir beberapa saat, tawaran saya terima dan mulailah saya merenung, apa yang mau saya bahas?

Disinilah saya merasa sangat "beruntung" memilih bidang ilmu komunikasi sebagai peminatan ilmiah. Berbekal prinsip dasar, komunikasi ada dimana-mana dan tak ada bidang kehidupan yang tak lepas dari komunikasi, saya bahas buku itu dari perspektif komunikasi. Kerangka Analisis Wacana dari Van Dijk saya gunakan sebagai pisau bedah.

Namun tulisan kali ini, saya ingin lakukan analisis yang sedikit berbeda, walau tetap dalam ranah komunikasi. Saya akan coba bahas dari perspektif komunikasi lingkungan, bidang yang sekarang juga sedang saya geluti.

Buku bersampul warna kuning karya dua wanita cerdas dari Sumsel ini, memang menarik. Selain cara penceritaan melalui gaya cerita pendek populer, muatan isinya juga sarat dengan pesan-pesan kearifan lingkungan dan interaksi masyarakat Sumsel (khususnya Besemah) dengan alam di sekitar mereka. Hampir tak ada bagian dari karya ini yang tidak membahas keterkaitan dua unsur utama (manusia dan lingkungan alam). Perspektif komunikasi lingkungan sangat kental dalam cerita-cerita tersebut.

Richard Jurin (2010;15) pernah berkata bahwa komunikasi lingkungan adalah sebuah generasi sistematis dan pertukaran pesan manusia dalam, dari, untuk, dan tentang dunia disekitarnya dan interaksinya dengan alam. Manusia memiliki keterikatan erat dengan alam, sekaligus manusia sebenarnya mengkonstruksi alam disekitarnya. Gagasan ini kemudian tampak jelas dalam karya yang ditulis Frieda Amran dan Sofie Retorika.

Kisah diawali dengan asal mula (puyang) orang Besemah. Tersebutlah disini nama Atong Bungsu, yang memulai perjalanannya setelah mendapat petuah dari sang ayah, Ngawak Raje Nyawah (hal. 5). Salah satu pesan dari sang ayah adalah membuka pemukiman baru di Kaki Gunung Dempo. Ketika kemudian Atong Bungsu harus berseTERU dengan orang Rejang yang juga membuka lahan diwilayah itu, Atong Bungsu "mengakali" dengan pohon kelapa tua dan tumpukan sampah sebagai penanda bahwa ia yang paling awal didaerah tersebut.

Apa makna dari kisah pertama ini? Menggunakan komunikasi lingkungan, kita dapat lihat bahwa, *pertama*, perintah dari ayahnya adalah “kaki” Gunung Dempo, bukan di lereng atau di puncak. Kaki gunung biasanya adalah daerah dataran, tempat yang subur karena tempat berkumpulnya kikisan tanah dari atasnya. Kaki gunung juga merupakan daerah aman, karena terbebas dari kemungkinan bencana longsor, dan tidak memiliki resiko berarti jika dilakukan penebangan pohon untuk membuka ladang. Selain itu, menggunakan tanda-tanda alam sebagai penanda kepemilikan seseorang, menunjukkan bahwa tanah dan hutan yang ada, bukan untuk digunduli tetapi untuk ditanami. Setiap penanaman harus ada tanaman berumur panjang (tua), dalam hal ini kelapa.

Uniknya dari kisah tersebut, semua pihak bisa menerima ketentuan yang ada. Kendati tidak ada aturan tertulis, namun masyarakat setempat mempercayai dan meyakini bahwa itu adalah kebenaran. Darimana keyakinan ini muncul, tentulah dari kisah dan cerita yang sudah diturunkan generasi-generasi sebelumnya. Cerita yang semuanya berangkat dari pemahaman terhadap alam semesta. Sangat jelas bagaimana pertukaran pesan dari dan untuk manusia dengan lingkungan alamnya. Semua kisah mengenai alam semesta, selalu diturunkan ke generasi-generasi berikutnya, baik melalui tata cara berdongeng, mempraktekkan dalam membuka ladang, ataupun dengan melihat tanda-tanda alam. Semua ini adalah peristiwa komunikasi, dan terbukti kemudian memang hal itu melekat kuat pada diri masyarakat Besemah.

Kisah berikutnya, merupakan kisah paling terkenal dalam cerita rakyat di Sumsel, yaitu si Pahit Lidah dengan nama asli Serunting Sakti. Kesaktian utama tokoh ini adalah pada lidahnya, sesuai namanya. Apapun yang dikatakannya (disumpahi) akan

menjadi kenyataan. Kisah ini dimulai dari sejarah kelahirannya (anak dari Puyang Panjang), memperoleh kesaktian (setelah berguru di Bukit Siguntang gara-gara dikhianati istrinya), menikah lagi dengan bidadari Sanggul Bagulung, sampai dengan kematiannya di tangan Si Mata Empat.

Cerita si Pahit Lidah bisa dimaknai dalam berbagai versi. Salah satunya, yang kerap muncul di berbagai kalangan, bahwa sejarah masyarakat Sumsel adalah "sejarah persumpahan". Dalam analisa lain, ini bisa dikatakan sebagai bentuk pengakuan salah satu prinsip dasar komunikasi yaitu *irreversible*, ketika seseorang sudah berkata (berkomunikasi) maka ia tak bisa dibatalkan. Penyesalan mungkin akan terjadi, kesalahan diselesaikan dengan minta maaf, namun peristiwa komunikasi itu sudah berlangsung. Sebuah hal penting untuk mengatakan bahwa berhati-hatilah dengan ucapanmu, mulutmu harimaumu. Kisah Pahit Lidah sudah memperlihatkan hal tersebut secara nyata.

Munculnya kisah Pahit Lidah tentu tidak lepas dari berbagai situs-situs berbentuk bebatuan yang tersebar banyak di daerah Besemah. Para ahli arkeologi tentu punya teori sendiri mengenai keberadaan batu-batu ini, yang menunjukkan adanya eksistensi masyarakat di zaman Megalit. Namun, masyarakat Besemah punya teori sendiri juga, itulah "Teori si Pahit Lidah". Dalam perspektif komunikasi lingkungan, ini menunjukkan bagaimana tingginya daya imajinasi masyarakat setempat dalam melihat kehidupan disekeliling mereka. Agaknya mereka menyadari bahwa batu-batu tersebut adalah benda yang keramat, sebagian disebut dengan istilah "keramat", dan untuk melindungi serta mengidentifikasi keberadaannya, diciptakanlah tokoh Pahit Lidah.

Saya sempat berpikir sedikit melenceng, kenapa si Pahit Lidah selalu menyumpahi orang yang tidak disukainya dengan batu? Kenapa tidak menjadi kayu, sungai, hewan atau mungkin benda-benda keras lain (semacam besi misalnya). Imajinasi saya berkata bahwa di zaman itu, pengetahuan masyarakat tentang benda yang langgeng dan bertahan sampai kapanpun adalah batu. Batu adalah benda yang tak lekang oleh panas tak lapuk oleh hujan. Melalui ini, kebesaran dan cerita kesaktian Pahit Lidah akan bisa dilihat buktinya oleh generasi-generasi berikutnya. Sebuah bentuk kesadaran pula bahwa di daerah Besemah, sebagaimana lazimnya daerah hulu sungai dan kaki gunung, banyak ditemukan bebatuan besar.

Aspek penting dari semua itu adalah menunjukkan bagaimana masyarakat Besemah memandang alam semestanya, sebagai sebuah kesatuan yang holistik dengan kehidupan mereka. Kesatuan ini diwariskan dan diturunkan secara berjenjang maupun menyebar ke generasi berikutnya. Komunikasi lingkungan menjadi kentara sekali, bahwa masyarakat memiliki ragam konstruksi tersendiri dalam melihat alamnya. Konstruksi pengalaman yang kemudian diwujudkan dalam sebuah cerita. Apakah kemudian konstruksi-konstruksi tersebut dan makna-makna komunikasi lingkungan akan diteruskan ke generasi-generasi berikutnya? Entahlah, terutama dalam konteks kemajuan teknologi informasi saat ini, sertanya terjadinya perubahan pola pikir masyarakat dalam memandang alam. Namun setidaknya, buku cerita rakyat tersebut sudah mencoba "mengkomunikasikan" hal itu ke generasi sekarang dan masa datang. Semoga proses itu berlanjut dengan munculnya karya-karya berikutnya.

**) Tulisan ini sudah dimuat di HU Berita Pagi*

19

TNI DAN KEPEDULIAN LINGKUNGAN

5 Oktober adalah hari bersejarah bagi militer Indonesia. Tonggak sejarah berdirinya institusi keamanan negara ini, dinyatakan syah berdiri pada tanggal tersebut. Selama sekian puluh tahun pula timbul tenggelam dan riak-riak negara ini, tidak terlepas dari riak-riak dan dinamika di tubuh TNI. TNI memang bagian tak terpisahkan dari republik ini, ia akan selalu ikut dalam setiap isu, keberhasilan, maupun masalah yang ada. TNI bukan sekedar soal pertahanan, keamanan, perang, dan senjata. TNI juga berhubungan dengan masalah kemiskinan, pendidikan, bencana alam, tak terkecuali masalah lingkungan hidup.

Persoalan lingkungan hidup agaknya saat ini sudah menjadi isu vital. Saban tahun negara ini dilanda berbagai masalah dengan alam. Saya tidak pakai kata-kata bencana alam, karena dominan apa yang terjadi selama ini bukanlah karena faktor alam, tapi ulah manusia itu sendiri, kecuali kasus bencana gunung meletus, gempa bumi, dan Tsunami. Lebih tepat jika dikatakan adalah bencana manusia, malapetaka yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri.

Data dari BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) menyebutkan bahwa sampai periode Agustus 2016 saja, tercatat

sudah ada 1.509 kasus bencana yang terjadi. Ini terbagi atas banjir dan tanah longsor, abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan/lahan (karhutla), transportasi air, letusan gunung api, puting beliung, dan tanah longsor. Khusus untuk karhutla, tercatat sudah mencapai 160 kasus. Terbesar adalah banjir yang mencapai 535 kejadian. Sebuah data yang mencengangkan, dan seharusnya bisa membuat sadar semua pihak bahwa kita memang sudah banyak masalah dengan lingkungan alam.

Selama ini, ada kecenderungan keterlibatan TNI dalam persoalan lingkungan, muncul pasca kejadian. TNI bersama unsur lain menjadi andalan dalam penyelamatan korban, perbaikan, dan pertolongan. Aspek ini tentu saja bisa dikatakan sudah menjadi tupoksi lembaga ini, karena mereka memiliki kemampuan dan fasilitas untuk melakukan hal itu. Tetapi apakah yang dilakukan TNI hanya sekedar itu saja? Disinilah perlu dicermati bahwa TNI sebenarnya punya kemampuan dan kapasitas lebih untuk melakukan berbagai kegiatan yang bersifat pencegahan.

Berbagai kajian yang pernah dilakukan banyak pihak, termasuk pengamatan langsung selama ini, terjadinya bencana manusia ini banyak kaitannya dengan aspek kebijakan, yang berimplikasi praktis dalam kegiatan di lapangan. Contoh saja, banjir yang saban musim hujan merendam sebagian besar Palembang, disebabkan oleh tertutupnya tempat genangan air. Tertutupnya genangan air banyak pula disebabkan oleh rawa-rawa yang ditimbun. Begitu juga saat terjadi derita kabut asap tahun 2014 dan 2015 lalu, disebabkan oleh terbakarnya lahan, terutama kawasan gambut di Sumsel. Terbakarnya lahan gambut disebabkan oleh keringnya area gambut yang menyebabkannya mudah terbakar.

Pengeringan ini karena aktifitas manusia yang membuka areal perkebunan. Pembukaan areal gambut bermula karena kebijakan pertanian dan perkebunan.

Melawan alam, termasuk melakukan kebijakan yang merubah kondisi alam, secara langsung akan mendatangkan reaksi cepat dari alam. Terjadilah kabut asap, banjir dan tanah longsor. Bagaimana solusinya? Mengembalikan kondisi alam atau menciptakan kondisi alam yang bisa beradaptasi terhadap berbagai situasi adalah solusi yang memungkinkan. Untuk itu peran serta semua pihak yang mau bertindak cepat dan terstruktur adalah kuncinya. Aksi nyata adalah tindakan yang sangat diperlukan. Masalah ekologis bukan lagi masalah bulan depan, tahun depan atau sepuluh tahun kemudian. Masalah itu ada sekarang dan butuh solusi sekarang. Cepat, tepat, dan tanggap.

Pemerintah, selaku motor kebijakan sebenarnya sudah banyak berbuat, minimal dalam bentuk produk kebijakan. Untuk kasus kabut asap dan karhutla, adanya Tim Restorasi Gambut (TRG) dan Badan Restorasi Gambut (BRG), munculnya komunitas masyarakat peduli api, adalah bukti-bukti yang sudah dilakukan. Di kasus banjir, terutama konteks Palembang, adanya peraturan daerah yang bicara larangan penimbunan rawa, sudah menjadi bukti kepedulian tersebut. Di tingkat nasional, dibentuknya BNPB bahkan sampai ke daerah, adalah upaya serius ke arah tersebut.

Tetapi fakta yang terjadi kemudian, masalah itu tetap saja terjadi. Karhutla tetap saja ada, banjir tetap menggenang, bahkan bertambah luas. Kejadian yang cukup menggembirakan hanya pada kasus kabut asap. Dibanding 2015, tahun ini mereda. Selain usaha berbagai pihak, faktor cuaca yang terus hujan juga ikut membantu.

Begitupun, dibanding jenis masalah LH yang lain, kasus karhutla agaknya jadi perhatian sangat serius. Namun, kekhawatiran kejadian serupa kembali terjadi jika kemarau panjang datang, tetapi saja muncul.

Pada konteks inilah TNI punya kartu As, dan itu yang kita butuhkan. Ciri khas tentara adalah kemampuannya berpikir dan bergerak secara cepat dan tepat. Strategi dimatangkan pada tingkat rencana, selanjutnya bertindak. Kalaupun dalam kondisi darurat, militer biasanya sudah punya rencana A, B, dan C. Kesiapsiagaan dan kedisiplinan dalam berbagai situasi adalah modal besar yang dimiliki TNI, sebaliknya kurang dimiliki oleh kelompok masyarakat sipil.

Oleh karena itu, dalam konteks persoalan lingkungan hidup saat ini, harapan pada TNI untuk lebih proaktif dalam proses pencegahan terjadinya masalah lingkungan bisa disandarkan. Akan sangat efektif apabila kolaborasi militer-sipil dimaksimalkan, bukan bergerak sendiri-sendiri. Jaringan institusi militer yang memang sudah ada sampai ke tingkat masyarakat bawah, Babinsa, bisa jadi ujung tombak. Tinggal lagi bagaimana kalangan sipil melakukan kolaborasi dan memaksimalkan ini. Kita juga yakin dan selama ini terbukti, pendekatan yang dilakukan TNI bisa ampuh. Artinya disini, stigma militer yang seram dan keras, tidak terpakai dalam konteks masalah lingkungan. Pendekatan sosial budaya, juga jadi sudut pandang.

Terobosan strategis sudah dilakukan oleh institusi militer. Terbukti dengan inisiatif dari Korem 044/Gapo yang melakukan riset dan menghasilkan produk Bios 44 serta Busa Nusantara 44, untuk mengatasi terjadinya kebakaran di kawasan gambut. Lewat bios 44,

rongga lahan gambut bisa dirapatkan sehingga potensi kebakaran bisa diperkecil. Kesuburan tanah juga bisa ditingkatkan. Sementara Busa Nusantara 44 merupakan busa yang dirancang untuk memadamkan api dan ramah lingkungan. Dimotori oleh Danrem 044/Gapo, Kolonel Kunto Arief Wibowo, bus 44 mendapat sambutan positif dari Kementerian LHK dan direkomendasikan mendapat sertifikasi paten.

Apa yang dilakukan oleh Korem 044/Gapo bisa menjadi salah satu bukti bahwa TNI bisa berbuat banyak untuk mencegah terjadinya masalah lingkungan. Saat ini, produk tersebut sudah langsung disebar dan semuanya merupakan inisiatif TNI. Kata kunci terpenting adalah kemauan, kecepatan dan inovatif. TNI mungkin tidak terlalu memusingkan soal aturan administrasi, tupoksi dan sebagainya. Yang jelas, masalah itu sudah didepan mata, itu butuh solusi sekarang juga.

Selain efek langsung pada masalah LH, inovasi dari Korem 044/Gapo pada dasarnya memiliki dua implikasi penting. *Pertama*, ini menjadi sarana pencitraan positif bahwa TNI bisa berada di ranah manapun. Stigma negatif tentang TNI yang sering dikaitkan dengan kekerasan, bisa dibantahkan dengan inovasi ini. *Kedua*, sebuah kritikan juga bagi institusi sipil bahwa kerja seperti ini sebenarnya bisa dilakukan oleh kalangan sipil, asalkan ada kemauan dan tidak sekedar pencitraan semata. Masalah lingkungan butuh kerja nyata, bukan sekedar retorika atau sekedar dapat penghargaan sekelas adipura. Indikatornya sederhana, kalau hujan tidak banjir, jika kemaru tidak kabut asap.

Tak berlebihan jika pada konteks hari TNI tahun ini, kita harapkan bisa jadi momentum pula bagi jajaran TNI lainnya untuk

terus berinovatif dan semakin memperkuat tindakan nyata yang peduli terhadap lingkungan. Stabilitas lingkungan, walau bagaimanapun adalah bagian integral dari NKRI, yang menjadi semboyan tak tergoyahkan. Persoalan pencegahan masalah lingkungan memang bukan tupoksi utama TNI, tapi jika kondisi itu sudah darurat, jika urusan administratif jadi kendala, maka lembaga yang mampu bertindak cepat dan tepat jadi harapan utama.

**) Tulisan ini sudah dimuat di HU Sriwijaya Post, 5 Oktober 2016*

20

TUMBAL IWAK BELIDO

Jika tidak ada aral melintang, Pemerintah Kota Palembang akan segera merealisasikan pembangunan patung Iwak (Ikan) Belido di tengah-tengah pelataran Benteng Kuto Besak. Patung yang dikabarkan setinggi 12 m ini akan menjadi ikon baru Palembang, konon juga akan menyaingi patung Merlion di Singapura. Sebuah mimpi besar dari Pemkot Palembang, besar bukan pada mewujudkan patungnya, tapi mimpi besar terhadap efek patung tersebut. Satu lagi ornamen budaya massa akan hadir di kota ini, dan warga Palembang akan dibuat terpana olehnya.

Membangun sesuatu yang monumental pada sebuah kota yang kemudian menjadi ikon utama kota tersebut, sudah menjadi gejala umum di berbagai tempat. Untuk kawasan Asia, dikenal Patung Merlion (berupa ikan kepala singa) di Singapura, Twin Tower Kualalumpur, Tugu Monas di Jakarta, Grand Royal Palace di Bangkok, Masjid Sultan Omar Ali Syaifudin di Bandar Sri Begawan (Brunei), Teluk Ha Long Bay di Vietnam, Angkor Wat di Kamboja, Pagoda Emas di Myanmar, Tembok Raksasa di China, Taj Mahal di India. Palembang sendiri sebenarnya sudah punya ikon yang selama ini dikenal yaitu Jembatan Ampera.

Hampir semua objek tersebut, sengaja dibuat manusia dengan begitu spektakuler disebabkan berbagai alasan. Kecuali Teluk Ha Long Bay, yang lainnya adalah benda fisik buatan manusia yang memiliki sejarahnya tersendiri. Diciptakan karena ada peristiwa penting yang kemudian diabadikan melalui bangunan fisik. Taj Mahal dibangun karena kecintaan seorang raja pada istrinya, Monas dibangun sebagai bukti politis perjuangan rakyat Indonesia, Tembok China dibangun karena alasan membentengi diri dari ancaman pihak luar, Patung Merlion dibangun sesuai legenda terbentuknya Singapura, begitu juga dengan bangunan-bangunan lain yang kemudian menjadi simbol penting bagi sebuah kota.

Apabila dikelompokkan, pendirian bangunan-bangunan tersebut, bisa disebabkan dua hal, yaitu karena ingin mengenang sesuatu, atau bisa juga karena alasan fungsional dari bangunan tersebut. Bentuk fisiknya yang unik, megah, sehingga punya nilai lebih, menjadi alasan penting kenapa ia harus dijadikan ikon. Manusia zaman sekarang, terkagum-kagum, membayangkan sebuah bangunan luar biasa, dibangun di masa semuanya serba terbatas dan minim teknologi.

Hampir bisa dipastikan semua ikon-ikon yang dibangun tersebut punya nilai sejarah dan nilai fungsional. Nilai-nilai yang berkaitan dengan manfaat positif bagi manusia disekitarnya. Sangat jarang sebuah benda dijadikan ikon jika tidak memiliki dampak positif bagi manusia secara keseluruhan. Misalnya, kita tidak mengenal Patung Fir'aun dibuat ulang untuk dijadikan ikon, kecuali peninggalan yang dibuat semasa Fir'aun itu sendiri. Kalaupun sekarang melihat patung Fir'aun berupa spink di Mesir, yang

terlintas dipikiran manusia adalah, inilah orang yang durhaka pada Tuhan.

Oleh karenanya, sebuah ikon pada dasarnya menggambarkan peristiwa penting di daerah tersebut yang berhubungan langsung dengan benda yang dijadikan ikon. Ada sejarah dan ada fungsi positif yang melekat padanya. Kalaupun tidak didasari hal positif, seperti Fir'aun, maka ia menjadi ikon kemungkarannya, ketidakadilan, kezholimannya, dan sebagainya. Yang jelas ia punya manfaat bagi yang melihat dan mengenangnya.

Dalam konteks masyarakat massa saat ini, kehadiran ikon kemudian tidak luput dari aspek budaya massa pula. Budaya yang dibesarkan oleh kepentingan-kepentingan sesaat dan sangat kuat bermotifkan materialisme dan konsumerisme. Jembatan Ampera, sebagai bangunan bersejarah yang menjadi ikon kota Palembang, tidak luput dari fenomena budaya massa ini. Pertandanya tampak dari perlakuan terhadap jembatan itu sendiri, yang tidak lagi melihat sisi sejarahnya. Publik cenderung terpesona pada fisiknya dan merasa begitu bahagia ketika bisa berphoto dengan latar belakang jembatan hasil pampasan perang ini. Kebahagiaan ini kemudian disebar ke berbagai media, terutama media sosial, maka jadilah Ampera sebagai ajang komoditi, pertanda kesenangan bahwa sudah sampai ke tempat ini. Lebihkah dari itu? Tidak, hanya itu saja.

Ampera sebagai jembatan bersejarah, yang dalam faktanya memang punya sisi strategis bagi bangsa ini, dan sampai saat ini sangat fungsional bagi masyarakat Palembang, mendapat perlakuan sebatas itu saja. Konon lagi sesosok ikan "elit" yang bernama Belido/Belida (*Chitala lopis*), mau dijadikan ikon pula. Yang terjadi kemudian adalah semakin memakmurkan budaya massa,

menjadikan masyarakat-masyarakat yang terus berpacu dengan kesenangan-kesenangan sesaat, namun tak pernah tahu hakekat sesuatu itu.

Dilihat sisi sejarahnya, ikan ini tidak punya nilai lebih bagi daerah ini (Palembang), kecuali rasanya yang dianggap lezat untuk bahan racikan pempek dan kemplang. Karena rasanya yang lezat itu pula, Belido punya nilai tinggi yang tidak semua orang mampu mendapatkannya. Kalangan menengah atas adalah pihak yang paling memungkinkan mengkonsumsi ikan ini. Jika dicermati kebiasaan ikan ini, justru Belido adalah salah satu jenis predator, ikan yang memangsa ikan lainnya. Apabila dilihat sebarannya, ikan ini juga tidak punya Sumsel saja, tapi banyak pula didaerah lainnya, seperti Kalimantan. Kalau kemudian populasinya dianggap langka dan semakin berkurang, budidaya adalah solusinya. Saya agak pesimis kalau ikan ini akan musnah, karena ia punya nilai jual tinggi dan bisa dibudidayakan.

Oleh karena itu, menjadikan Ikan Belido sebagai ikon baru di Palembang, saya pikir bukan pada nilai sejarah ikan ini yang dianggap punya peran penting bagi Palembang, tapi karena sisi fungsionalnya bagi kalangan tertentu. Fungsi sebagai bahan baku pembuatan pempek dan kemplang yang bernilai tinggi, tentu saja harganya juga tinggi. Begitupun ia punya hubungan langsung dengan fenomena kerusakan perairan di Sumsel, sebagai habitat utama ikan ini.

Andai hanya pada aspek itu saja dasar pembuatan ikon baru ini, inilah dasar fenomena budaya massa. Tak perlu ada pijakan sejarah, yang jelas ini punya nilai jual dan akan dilihat banyak orang. Sektor pariwisata mungkin sisi terkena langsung, patung itu akan

jadi lokasi berphoto baru yang akan jadi magnet manusia-manusia narsis. Inilah yang capaian budaya massa. Masa bodoh soal siapa dan apa itu Ikan Belido, yang jelas ada tempat nongkrong baru. Sederhana sekali.

Dalam perspekti ilmu komunikasi, inilah yang disebut dengan makna simbolik yang bersifat sembarang. Patung Ikan Belido adalah simbol yang dimaknai orang dalam perspektifnya masing-masing. Disebabkan aspek filosofis ikan ini yang "tidak membumi", maka pemaknaannya pun sebatas yang tampak dipermukaan, tak ada kajian mendalam mengapa dan apa itu Belido. Pada konteks generasi sekarang adalah generasi narsis, maka patung itu akan dimaknai pula sebagai patung tempat narsis. Publik tentu saja akan menyenangi ini, karena harus diakui Palembang minim sarana-sarana narsis seperti itu.

Di sisi lain, adakah yang paham bahwa Belido langka ataupun musnah karena kerusakan habitatnya (lingkungan) akibat ulah manusia itu sendiri? Saya meragukan itu. Tapi baiklah, jika suatu saat nanti, sekitar 10-20 tahun lagi, saat ikan ini sudah benar-benar musnah, anak cucu kita masih bisa melihat bahwa inilah jenis ikan yang menjadi pertanda carut marutnya tata kelola air di Sumsel dan kerusakan lingkungan. Ikan Belido akhirnya jadi tumbal pembangunan berbasis budaya massa nan materialistis. Intinya Patung Ikan Belido hanya sebatas kenangan dan nostalgia masa lalu, yang sebenarnya tidak pula bermakna banyak bagi keseluruhan publik Sumsel.

**) Tulisan ini sudah dimuat di www.ibubumi.com,
tanggal 11 April 2016*

21

MENYOAL HUTAN DESA DI SEMENDE

Masyarakat Semende akhirnya bisa bernafas lega. Terhitung Juni 2014 ini, delapan kawasan di Semende akan dijadikan status hutan desa. Kawasan ini meliputi delapan desa dengan total luas mencapai 11.185 Ha. Melalui status ini masyarakat bisa berkebun secara aman dan sah di kawasan hutan yang ada (Sumeks, 30/5/2014). Ketakutan-ketakutan yang mungkin selama ini dirasakan, bisa hilang dengan keluarnya ketetapan dari Menteri Kehutanan nanti.

Pengelolaan hutan desa sebenarnya bukan hal baru dalam sistem pengelolaan kehutanan di Indonesia. Permenhut No. P.49/2008 tentang hutan desa yang kemudian diperbarui dengan Permenhut No. P 53/2011, tegas menyatakan adanya hutan desa , yang nantinya diharapkan bisa menjadi penunjang peningkatan kesejahteraan warga.

Berdasarkan aturan tersebut, yang dinamakan sebagai hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan warga desa. Dalam hal ini, warga yang ingin beraktifitas di hutan ini, diperbolehkan asal sesuai aturan

main yang ada. Salah satunya yang terpenting adalah tidak dibolehkan merubah kepemilikan menjadi pribadi. Masyarakat diberikan hak kelola dan hak manfaat selama 35 tahun.

Adanya aturan tersebut, pada satu sisi memang memberikan status hukum yang jelas dan pasti kepada masyarakat. Tidak ada lagi kekhawatiran tuduhan sebagai perambah hutan ilegal. Di sisi lain, perlu pula dilihat leih jauh, bahwa sebenarnya konsep hutan desa sebagaimana di atur dalam Permenhut di atas, sudah lama dikenal masyarakat. Mereka menyebutnya sebaga kawasan hutan adat, hutan marge dan sebagainya.

Semende sendiri adalah sebuah dataran tinggi di Sumatera Selatan. Ciri khas daerah ini adalah produsen kopi dan padi. Orang Semende memiliki keunikan tersendiri yaitu adanya pranata adat Tunggu Tubang, yang titik pentingnya adalah sistem pewarisan pada anak perempuan tertua. Harta warisan Tunggu Tubang adalah harta komunal, bukan kepemilikan pribadi.

Adanya aturan dari Permenhut sebenarnya memiliki korelasi dengan struktur masyarakat Semende yang sangat terikat dengan hutan dan sawah yang mereka kelola. Logika sederhanya, setiap orang Semende pasti punya Tunggu Tubang, dan setiap Tunggu Tubang pasti punya sawah. Punya sawah artinya punya lahan pertanian. Begitu juga dengan perkebunan, terutama kebun kopi (*kawe*). Semende sangat identik dengan kopi, bahkan disinyalir inilah satu-satunya tumpuan ekonomi terpenting. Karena itu, walaupun kebun kopi bukan masuk warisan Tunggu Tubang, tapi berkebun kopi sudah melekat dalam identitas orang Semende.

Berkebun kopi tentu saja harus dilakukan di bukit-bukit di sekitar dusun. Ajaran dari nenek moyang orang Semende, sudah

melakukan pembagian wilayah-wilayah khusus, yaitu ada areal perkampungan (disekitar jalan desa), areal persawahan (kerap disebut daerah *ataran*, berada di sekitar permukiman, dan areal perkebunan yang berada di wilayah terluar setelah *ataran* sawah.

Areal perkebunan berada di kaki-kaki bukit (utamanya Bukit Barisan dan Bukit Balai). Daerah perbukitan, persawahan serta permukiman adalah satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Selain kebun kopi, di daerah bukit ada sumber air utama untuk mengairi sawah dan air bersih ke rumah tangga. Orang Semende menyebutnya dengan *cughup* dan *babakan*. Oleh karenanya, dari dulu hingga kini, walaupun dibuka untuk kebun kopi, namun sumber air di bukit-bukit tersebut tetap dijaga.

Saya menyaksikan sendiri bahwa tanpa adanya legalitas aturan dari Menteri Kehutananpun, sebenarnya orang Semende sudah memiliki aturan dan kearifan tersendiri untuk menjaga sumber mata pencaharian dan kehidupannya. Hal ini sudah menjadi ritme kehidupan yang senantiasa terpelihara dan berlangsung dari generasi ke generasi.

Memandang Semende haruslah dalam kacamata Semende pula. Semende adalah masyarakat yang unik dan mereka memiliki siklus kehidupan yang sulit dipisahkan dari ritme alam semesta. Kita menyambut baik adanya Permenhut tentang legalitas hutan desa, namun disisi lain, harus juga ditekankan sudut pandang bahwa orang Semende punya pandangan hidup tersendiri yang berangkat dari komunikasi mereka dengan lingkungan alam. Pemerintah, agaknya tidak perlu terlalu banyak mengintervensi dengan aturan-aturan lain yang nantinya dikhawatirkan justru memudarkan semangat adat Semende. Sebagai contoh, orang Semende punya

perhitungan tersendiri terhadap musim yang berlaku. Mereka memiliki kalender musim yang berbeda dengan perhitungan tahun masehi yang dikenal selama ini. Mereka tahu sekali kapan harus bertanam kopi, dan kapan harus bertanam padi.

Hal yang perlu dikhawatirkan adalah apabila legalitas ini sudah dilaksanakan, apakah ada jaminan bahwa warga Semende tetap punya kuasa atas tanah dan bukitnya? Apakah tidak mungkin ini akan mengundang kehadiran pihak luar untuk masuk dan menanamkan kuasa barunya pula pada masyarakat? Kita perlu khawatir, karena sampai saat ini pola pertanian di Semende masih dikuasai oleh pribadi-pribadi masyarakat, dan mereka sangat nyaman dengan mekanisme tersebut. Andaikan tatanan ini dirusak, maka Semende lambat laun akan bergeser, berubah, dan selanjutnya hanya menyisakan nama dan keelokan alam semata. Kita khawatir karena Semende adalah jamrudnya Sumsel, tapi belum terpublikasikan secara luas.

Di Semende terdapat keelokan alam yang tidak ada bandingannya di Sumsel. Di Semende terdapat Tunggu Tubang, satu-satunya sistem adat yang berbeda dengan daerah lain di Sumsel. Di Semende juga adalah sentra kopi, padi, sayuran, dan berbagai tanaman pegunungan lainnya. Karena itu, munculnya Permenhut perlu dikawal dan ditindaklanjuti, agar koridornya tidak keluar. Keterlibatan masyarakat adalah kuncinya, dan itu sangat dituntut dalam Permenhut tersebut. Semoga Semende dan kesejahteraannya tetap tampak di masa-masa datang.

22

BURUNG MIGRAN dan KOMUNIKASI LINGKUNGAN

Sekitar bulan Oktober hingga Desember setiap tahunnya, ribuan dan bahkan jutaan burung dari berbagai belahan dunia, terbang menyusuri berbagai benua, melintasi samudra, dan selama beberapa waktu mampir ke Sumsel, tepatnya di Taman Nasional (TN) Sembilang, pinggiran daerah Kabupaten Banyuasin, untuk kemudian pindah lagi ke tempat lain. Ini dikenal dengan fenomena burung migran, dan beruntunglah Sumsel karena menjadi salah satu tempat persinggahannya. Paling tidak, melalui fenomena ini, kita bisa saksikan keragaman aneka burung di dunia ini, dan paham juga bagaimana keterkaitan keseimbangan ekosistem.

Fenomena burung berpindah ini, kemudian dijadikan ajang wisata sekaligus perlombaan oleh Forum Komunikasi Daerah Kompas Gramedia (FKDKG), dan diliput secara khusus oleh dua surat kabar terbesar di Sumsel (Sriwijaya Post dan Tribun Sumsel), 12-13 Desember lalu. Tentu saja, ini akan semakin memperkuat dan mempromosikan TN Sembilang, sekaligus juga akan semakin meningkatkan kesadaran bersama bahwa burung adalah komponen terpenting dalam ekosistem manusia, sekaligus juga

mempromosikan TN Sembilang dan Sumsel secara umum. Ajang yang juga dilaksanakan tahun lalu, direncanakan akan terus berlanjut di tahun depan.

Pada tulisan ini, saya ingin menekankan menariknya kasus burung migran sebagai sebuah fenomena yang sebenarnya sudah sangat lazim ditemui di masyarakat. Ada semacam keterikatan antara manusia dengan fenomena kehadiran burung pada periode tertentu. Hubungan yang kalau ditilik perjalanan hidup manusia, terutama konteks masyarakat pedesaan, sudah memiliki keterikatan yang sangat dekat.

Fenomena burung migran sebenarnya terjadi di banyak daerah. Ada yang level migrasinya yang sangat jauh, melintasi antar benua, melintasi samudra, ada juga yang levelnya adalah antar daerah terdekat saja, dari gunung ke lembah, dari kawasan sungai ke areal persawahan, dari hutan ke belukar, dan berbagai pola migrasi lainnya. Oleh karena itu, Campbell (1985) menyatakan bahwa migrasi ini adalah pergerakan populasi burung yang terjadi pada waktu tertentu setiap tahun, dari tempat berbiak menuju tempat mencari makan selama iklim di tempat berbiaknya itu tidak memungkinkan. Di tempat baru tersebut, burung-burung ini tidak akan berbiak, dan baru berbiak jika sudah kembali ke tempat asal pada musim berbiak berikutnya.

Para ahli yang menekuni soal fenomena burung ini, menyatakan bahwa sebenarnya terdapat dua macam migrasi yaitu berdasarkan lokasi dan waktu. Dari sisi lokasi, biasanya adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain yang lebih baik (*latitudinal migration*). Dari sisi waktu, disebut migrasi balik (*return migration*), yaitu berpindah sementara dan kemudian balik lagi ke

daerah asal. Bentuk kedua ini yang paling banyak ditemui, karena dominan disebabkan perubahan kondisi cuaca.

Kelihatan juga bahwa alasan utama burung bermigrasi adalah ketersediaan bahan makanan di sebuah wilayah. Ini sebenarnya logika dasar pada semua makhluk hidup, mencari tempat baru yang memungkinkan untuk bertahan hidup. Sesulit apapun, sejauh apapun itu, demi kehidupan akan senantiasa ditempuh. Burung-burung yang bermigrasi membuktikan hal itu secara konkrit.

Migrasi burung yang mampir ke TN Sembilang, bisa dipastikan adalah migrasi balik, karena hanya bersifat sementara, menyesuaikan kondisi cuaca. Akan tetapi, kendati hanya sebentar, saya yakin bahwa kehadiran burung-burung ini memiliki makna tersendiri bagi komunitas atau masyarakat yang dilintasinya. Makna yang saya yakin berhubungan dengan aspek pengetahuan lingkungan masyarakat setempat, apalagi daerah TN Sembilang adalah daerah pinggiran laut berupa semenanjung. Apalagi fenomena burung ini bukan terjadi setahun dua tahun ini saja, namun sudah puluhan tahun lalu. Bisa jadi akan banyak mitos-mitos, cerita rakyat, dan mungkin kepercayaan lokal yang didasarkan atas fenomena kehadiran burung-burung tersebut.

Sebagai perbandingan, ada sebuah fenomena menarik yang dikenal di masyarakat Semende Darat, Muara Enim, dan juga beberapa daerah uluan lainnya, seperti Lahat dan Pagar Alam, yaitu kehadiran Burung Jejut (*motacilla cinerea*), salah satu jenis burung migran. Dalam bahasa setempat, Jejut diartikan sebagai "menjungkit-jungkit", karena ciri khas burung ini memang selalu menggerakkan ekornya seperti menjungkit. Burung ini sangat lincah, sulit untuk mendekatinya, selalu bergerak kesana kemari.

Sepintas burung ini tidaklah menarik, terutama dari fisik dan suaranya. Tubuhnya kecil, lebih mirip burung Ciblek sawah, dan suaranya hanya bercuit-cuit saja. Mungkin karena alasan itu juga, sampai sekarang burung ini masih banyak ditemukan dan jarang diincar manusia.

Tetapi, bagi warga Semende Darat, Burung Jejut punya makna lain yang tidak sekedar burung liar semata. Hewan ini hanya muncul di awal bulan Oktober hingga awal November. Setelah itu tidak kelihatan lagi, karenanya diyakini ini adalah jenis burung migran yang datang untuk mencari makanan pada musim tertentu.

Makna penting burung Jejut bagi orang Semende adalah pertanda sudah masuknya musim *Njawat* (musim menggarap sawah). Andai Jejut belum kelihatan, berarti musim bersawah belum dimulai. Kehadiran Jejut sendiri memiliki tiga pola utama. *Pertama*, burung ini terbang dan hinggap ke Kayu, terus ke Batu, lantas ke Tanah. Jika ini yang terjadi, berarti sudah mendekati musim bersawah, tetapi belum masuk masanya. *Kedua*, burung ini terbang dan hinggap ke Batu, langsung ke Tanah (tanpa melalui kayu), berarti musim bersawah sudah sangat dekat. *Ketiga*, burung ini terbang dan langsung hinggap ke tanah, tanpa melalui kayu dan batu lagi, berarti masa bersawah sudah dimulai.

Umumnya masyarakat Semende sangat paham akan hal itu, dan sampai sekarang tetap masih jadi acuan dalam bersawah. Generasi mudapun, terutama yang bermukim di Semende, dipastikan tahu fenomena ini. Bahkan, dalam beberapa hal, Burung Jejut sering juga disebut dengan *Burung Diwe* (burung Dewa).

Apa makna penting dari hal itu? Saya mengatakannya, inilah salah satu bentuk komunikasi lingkungan masyarakat di pedesaan.

Mereka menangkap fenomena alam, simbol-simbol yang dilihat, kemudian dimaknai dan dijadikan sebuah pengetahuan bersama. Gagasan etnoekologi komunikasi bisa menjelaskan hal ini, yaitu keterkaitan masyarakat dengan sekitarnya. Burung Jejuit awalnya tidak berarti apa-apa, dan mungkin tidak punya nilai bagi orang di luar Semende. Tetapi bagi komunitas Semende Darat, burung ini adalah sebuah tanda dimulainya siklus penting dalam kehidupan mereka. Hampir mirip dengan nelayan dilaut yang mampu menerjemahkan rasi bintang sebagai pertanda cuaca dan penentu lokasi.

Jejuit pada hakekatnya adalah burung migran. Beberapa komunitas ini ditemukan juga di daerah aliran sungai berbatu, seperti Sungai Lematang. Tetapi pada bulan tertentu, mereka menghilang dan kemudian muncul lagi. Perpindahan ini jelas adalah alasan ketersediaan makanan.

Tampak jelas bahwa komunitas masyarakat, terutama di pedesaan, mampu dan memiliki instrumen tersendiri dalam memaknai berbagai fenomena alam. Fenomena yang kemudian dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupannya. Menjadi jelas juga bahwa, manusia menyesuaikan diri dengan fenomena alam, bukan justru mensiasati atau memanipulasinya. Kehadiran burung migran bisa dijadikan sebuah pengetahuan tersendiri, bahwa fenomena alam bukan untuk dilawan, tetapi disesuaikan.

Fenomena burung migran, semestinya tidak dilihat hanya sebatas keindahan fisik dan menakjubkannya fenomena yang terjadi. Apabila ada jutaan ekor burung migran di TN Sembilang setiap tahun, seharusnya juga diikuti dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana burung-burung tersebut, bagaimana

pandangan masyarakat setempat (makna yang diberikan), dan apa kaitannya dengan fenomena perubahan lingkungan. Gagasan Lomba Photo Burung Migran kali ini bisa menjadi ruang pembuka untuk menampilkan fenomena-fenomena tentang burung yang ada di dunia ini. Akan lebih menarik jika fokusnya tidak semata-mata mengekspos keindahan fenomena alam, namun diikuti uraian singkat tentang hubungan burung tersebut dengan masyarakat setempat.

**) Tulisan ini sudah dipublikasikan di HU Sriwijaya Post, 30
Desember 2015*

23

SEMENDE, NEGERI PARA TUNGGU TUBANG

Apabila kepada kita ditanyakan tentang Semende (sering disebut Semendo), tentu yang terlintas adalah cita rasa kopi yang harum dan nikmat. Tak salah memang, Semende adalah salah satu produsen kopi terbesar di Sumatera Selatan, di samping Pagar Alam dan Lahat. Akan tetapi, apakah Semende hanya sekedar kopi saja? Tidak, banyak hal lain yang bisa kita ceritakan tentang negeri di atas bukit ini, keelokan alamnya, keunikan adat, keharuman berasnya, dan seabreg lagi cerita menarik tentang daerah ini. Catatan berikut mencoba menggambarkan beberapa hal menarik yang mungkin selama ini belum terpublikasikan.

Siang itu, (21/2/14) minibus yang saya tumpangi melaju membelah jalanan aspal di sela-sela hamparan sawah. Awalnya, suasana masih terasa ramai, lalu lalang kendaraan besar dan kecil, sering melintas. Selepas dari jalan lintas Sumatera di Muara Enim, kemudian Tanjung Enim, dan selanjutnya memasuki daerah Simpang Meo, jalanan mulai terasa sepi. Muara Meo, atau lazim disebut Simpang Meo adalah perhentian terakhir, sebelum memasuki Semende, negeri di atas bukit, di ujung Provinsi Sumatera Selatan.

Perjalanan dari Palembang hingga Simpang Meo sebenarnya cukup melelahkan, karena jarak yang cukup jauh. "Normalnya sekitar 5 jam kalau dihitung dari Palembang," ujar sopir *travel* yang saya tumpangi. "Sampai di Pulau Panggung nanti sekitar satu jam lagi lah," lanjutnya sambil tetap asyik memutar stir mobil. Saya melirik arloji, memperkirakan bahwa sekitar jam 15.00 WIB sore ini saya sudah berada di Semende. Masih sekitar 1 jam lagi.

Apa yang dikatakan sang sopir ternyata memang benar. Pukul 15.10 WIB, deretan rumah panggung yang bagian bawahnya dijadikan toko, tampak berjejer di pinggir jalan. Di bagian lain tampak kios-kios, semacam pasar di pedesaan. *Kalangan*, orang sini menyebutnya. Inilah Pulau Panggung, daerah paling ramai di Semende, sekaligus daerah *transit* utama bagi masyarakat. Dari desa ini, penumpang akan terpecah. Ada yang melanjutkan ke Semende Darat Tengah dan Ulu, ada juga yang hanya sampai Pulau Panggung ataupun meneruskan ke Semende Darat Laut. Saya sendiri meneruskan ke Semende Darat Tengah.

Jalanan yang dilalui makin berliku. Sang sopir terlihat terampil memainkan stir di jalanan sempit yang diapit oleh perbukitan dan jurang-jurang. Hampir tak ada jalan lurus dan mendatar. Mata saya dimanjakan oleh hamparan pepohonan kopi dan deretan sawah bertingkat, khas daerah pegunungan. Dari catatan saya, daerah tertinggi di Semende berada di ketinggian 1.800 m dpl. Sejuk atau lebih tepatnya dingin, itulah udara yang menerpa kulit.

Perjalanan sudah memasuki jantung Semende, sebelum sampai ke dusun terjauh di Semende Darat Tengah, yaitu Desa Swarna Dwipe. Sepanjang mata memandang, yang terlihat adalah panorama alam pegunungan yang luar biasa. Deretan kebun kopi,

sawah tebing, gemericik air yang teramat jernih, kolam ikan, ibu-ibu yang berjalan sambil menggendong *kinjar* (keranjang rotan), para lelaki yang menyandang *gerahang* (parang), dan rumah panggung, adalah suasana-suasana yang tak bisa dilewatkan. Dari kaca mobil, kamera saku saya tak henti-hentinya menjepret.

“Jika datang kesini di bulan September, maka di kiri kanan kita akan disuguhkan dengan hamparan padi yang menguning dan masyarakat yang disibukkan dengan menangkap ikan di kolam-kolam sekitar sawah,” suara sopir mengusik keasyikan menatap pemandangan. Belakang saya tahu, September-Oktober adalah masa panen raya di Semende. Masyarakatnya menyebutnya musim *ngetam*, setelah itu dilanjutkan dengan musim *bagok*, yaitu masa setelah panen. Di saat *bagok* inilah keramaian banyak dilangsungkan. Disinilah masanya menikahkan anak, berpesta setelah padi berhasil dipanen.

Padi memang salah satu tanaman utama di Semende, selain kopi. Dengan struktur daerah yang berbukit-bukit, padi ditanam dengan pola sawah tebing, bertingkat-tingkat seperti tangga. Jenis padi utama yang ditanam disini adalah *jambat teghas*, bibit lokal berwarna putih sedikit keabu-abuan yang usia tanamnya sekitar 6 bulan. Bersawah dilakukan sekali setahun, dan tidak pernah ada perubahan sejak jaman *puyang* dulu. “Kenapa sekali setahun? Karena begitulah tradisi disini. Jangan coba-coba menanam bibit yang bisa dua kali setahun. Tidak akan berhasil,” ujar salah seorang warga. Ketika saya coba telaah lebih lanjut, ternyata ini bukan sekedar tradisi saja, namun pengetahuan dasar warga mengenai alamnya. Ini berkaitan dengan cuaca, angin, hujan, serta hama yang mengancam.

Keelokan daerah Semende terus memanjakan mata saya. Hujan rintik-rintik semakin melarutkan pikiran, karena dari arah Bukit Balai dan Bukit Barisan, hamparan kabut tipis menghampiri. Kabut putih itu memperlihatkan bayangan samar-samar perbukitan dan diselingi dengan bayangan hitam rumah panggung serta *tengkiang* di tengah sawah. *Tengkiang* atau lumbung padi memang jadi satu kesatuan dengan sawah dan *dangau* (rumah/pondok di sawah). Sebuah simbol kesejahteraan masyarakat Semende.

Terpaan angin dan kabut tipis menerpa lembut di wajah. Saya merapatkan jaket menyelimuti tubuh dan mempererat *sebo* (kupluk) di kepala. "Segelas kopi Semende yang terkenal itu, tentulah akan menjadi hidangan nikmat di sore ini," lamunan itu melintas dipikiran. Saya tak perlu menunggu lama, begitu turun dari mobil dan masuk ke rumah Kepala Desa, kopi panas itu telah terhidang. Lupa akan basa-basi, setengah gelas pun ludes ke tenggorokan. Tak lama kemudian, nasi putih panas, goreng ikan mas, sambal terung *Belande*, lalapan umbut rotan, hadir dihadapan. Untuk sementara, program diet terlupakan, godaan lauk dan nasi harum yang masih berasap, terlalu sayang untuk dilewatkan.

"Kendati sekarang tidak musim panen, namun persediaan beras tetap ada, *tengkiang* masih terisi, karena ini adalah rumah *Tunggu Tubang*," ujar sang Kades di sela-sela suapan nasi yang entah ke berapa kali sudah masuk mulut saya.

Tunggu Tubang, ya itulah istilah yang sering terdengar. Ternyata ini adalah sebutan untuk anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga. Adat Semende punya ciri khas tersendiri, dimana pola pewarisan harta, terutama sawah dan rumah, jatuh pada anak perempuan tertua. Seorang *Tunggu Tubang* diberi kewenangan dan

tanggung jawab untuk mengelola dan mengurus harta warisan keluarga. Hanya anak perempuan tertua, selain itu harus keluar untuk mencari nafkah.

“Tak ada orang Semende yang tidak punya *tunggu tubang*, itu adalah identitas,” ujar Syaiful, seorang warga yang begitu setia menemani sekaligus memberi penjelasan seputar adat Semende. Adanya *tunggu tubang* pula yang menyebabkan sawah dan rumah di Semende tetap lestari, tidak hilang dan tidak punah. *Tunggu Tubang* adalah simbol Semende sekaligus simbol kekuasaan di masyarakat. Orang menjadi *tunggu tubang* adalah penguasa atas harta warisan, walaupun itu adalah kuasa kelola dan kuasa manfaat. Kepemilikan harta tetap bersama, namun pengelolaan ada pada *tunggu tubang*. Rumah yang ditempatinya ibaratkan “kantor” bagi keluarga tersebut, tempat berkumpul pada hari-hari tertentu.

Sebuah konsep adat yang unik. Dari sekian banyak daerah di Sumatera Selatan yang sudah saya jalani, hanya Semende yang punya adat berbeda. Sekilas saya teringat pada adat di Minangkabau dengan sistem matrilinealnya. Mirip walaupun tidak sama.

Semende, ibarat sebuah negeri dongeng. Disitu ada perbukitan yang diselimuti kabut, lurah-lurah dan jurang dalam berliku, hamparan kebun kopi yang memancarkan warna hijau dan merah, kuningnya padi di musim panen, deretan sawah berjenjang yang mempesona, kokohnya *tengkiang* di sebelah *dangau*, kecipak air dari pancuran di sela pematang sawah, dan senyum ramah warga setempat. Di malam hari, dari sela-sela gelungan kain sarung penahan dingin, sayup-sayup terdengar dentingan gitar dan alunan

suara remaja melantunkan syair Batang Hari Sembilan. Ah, gitar tunggal, musik yang selama ini hanya saya saksikan lewat TV.

Itulah negerinya para Tunggu Tubang. Negeri elok di pinggiran Sumatera Selatan. Terpikir oleh saya, jika selama ini dikenal Puncak di Bogor sebagai kawasan wisata, ataupun Pagar Alam dengan Gunung Demponya, kenapa Semende terabaikan dari pengetahuan kita. Suatu saat saya pasti mengulang kembali, menikmati kopi dan hidangan para *Tunggu Tubang*, sekaligus meresapi terpaan kabut dari Bukit Barisan dan memanjakan mata serta mengagumi karunia Tuhan saat memandang lekuk liku bukit dan jurang, melihat apakah *tengkiang* masih berdiri kokoh, dan apakah gitar tunggal masih berdenting di keheningan malam. Suatu saat nanti.

**) Tulisan ini sudah dimuat di halaman Panorama pada HU Berita Pagi, Minggu 1 Juni 2014*

Biodata Singkat Penulis



Dr. Yenrizal, M.Si. Lahir di Talu (Sumbar) 23 Januari 1974 silam, merupakan akademisi yang khusus mendalami bidang komunikasi lingkungan, sebuah kajian yang tergolong langka untuk disiplin ilmu komunikasi. Pendidikan S-1 ditamatkan di FISIP Universitas Sriwijaya, kemudian menyelesaikan S-2 Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran, Bandung. Studi S-3 (Doktor) juga ditamatkan di Unpad dengan predikat kelulusan *Cumlaude*. Disertasi yang diselesaikan berhasil memunculkan sebuah konsep baru dalam ilmu komunikasi yang disebut *Etnoekologi Komunikasi*. Gagasan ini juga sudah dipublikasikan di *International Journal of Applied Engineering Research Volume X, Number 16 (2015)*. Tahun 2015, penulis berkesempatan mengikuti program *Utrecht Summer School di Utrecht University, Netherland*. Saat ini penulis aktif sebagai dosen tetap di FISIP UIN Raden Fatah Palembang, khususnya Prodi Ilmu Komunikasi. Kesehariannya, penulis aktif sebagai peneliti komunikasi dan sosial budaya, khususnya berkaitan dengan aspek lingkungan. Hasil kajian, telaahan, riset, yang sudah dilakukannya, banyak yang dipublikasikan di berbagai media, baik media massa cetak/elektronik, termasuk melalui Jurnal Ilmiah yang baik berskala internasional maupun akreditasi nasional. Di media massa cetak, penulis sudah aktif menulis sejak tahun 1995 hingga sekarang. Selain itu, penulis juga aktif dalam penulisan buku bersama, menjadi narasumber dalam berbagai forum ilmiah, terutama berkaitan dengan kajian lingkungan. Penulis saat ini juga terlibat sebagai Tim Ahli pada Tim Restorasi Gambut (TRG) Sumatera Selatan, sriwijayapeat.org, Dewan Pakar ASPIKOM Sumsel dan Ketua Bidang Keilmuan ISKI Sumsel.



Lestarikan Bumi *dengan* **KOMUNIKASI LINGKUNGAN**

Editor: Taufik Wijaya | Henny Yusalia, M.Hum

Dr. Yenrizal, M.Si.

Pada lingkungan akademis, tugas siapakah mengkaji sekaligus menjaga lingkungan? Apakah hanya tanggung jawab ilmuwan lingkungan, antropolog lingkungan ataukah sosiolog lingkungan semata? Ini pertanyaan penting yang mesti dijawab. Lingkungan pada dasarnya adalah rumah bersama, entah itu antropolog, sosiolog, agamawan, pejabat, ahli matematika, ahli fisika, ilmuwan politik, termasuk ilmuwan komunikasi. Semua ada di area yang sama, yaitu bumi. Bumi adalah tanggungjawab semua pihak. Merusak bumi sama dengan merusak semua tatanan, karena itu tanggungjawab ada pada semua pihak.

Buku ini membahas tentang keterlibatan akademisi Ilmu Komunikasi dalam ranah bumi, ranah lingkungan, sesuatu yang selama ini belum banyak dibahas. Tekanan ilmu komunikasi adalah “pemaknaan pesan”, dan komunikasi lingkungan berbicara tentang itu. Sejauh pengamatan penulis, belum ada buku berbahasa Indonesia yang membicarakan Komunikasi Lingkungan, mungkin ini adalah buku pertama. Oleh karena itu hadirnya buku ini diharapkan bisa memberikan perspektif baru bahwa ilmu komunikasi juga harus bicara tentang lingkungan.

Disajikan dengan gaya bahasa populer dan sedikit *ngepop*, diawali dengan kajian teoritis, dan didominasi oleh telaahan dan analisa kasus kasus tertentu, maka diharapkan buku ini lebih mudah dipahami dan bisa masuk ke semua kalangan. Para penggiat lingkungan, akademisi komunikasi, pelaku kebijakan, peneliti, mahasiswa, dan siapa saja yang merasa bertanggungjawab terhadap keutuhan lingkungan, bisa memanfaatkan buku ini.



Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)
Jl. Rajawali, Gang Elang 6 No.3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581
Telp/Fax : (0274) 4533427
Email : deepublish@gmail.com
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)
Penerbit Deepublish www.deepublish.co.id @deepublisher

Kategori : Lingkungan

ISBN 602453157-7



9 786024 531577